ASPIRASI MAHASISWA TERBUNGKAM?

KENTINGAN

DETAK NURANI MAHASISWA

POTRET PENDIDIKAN TINGGI KITA

EDISI 02 / TH II / 1995

Prof. Drs. Harris Mudjiman, MA. PhD

Prof. Dr. Koento Wibisono Siswomiharjo

Kepemimpinan Baru

...dan yang belum pasti
apakah bermakna gantian fisik
Atau sekedar reparasi akhlak
Lebih beramah tamah dengan penduduk
Lebih sabar dengarkan keluhan
Mengganti roman muka garang
menjadi jernih
Setidaknya roman netral...

Petikan dari H. Mahbub Djunaedi,
Kolom Demi Kolom, 1989

Selamat Jalan Prof. Dr. Koento Wibisono Siswomiharjo!

Selamat Datang Prof. Drs. Harris Mudjiman, MA. PhD

SURAT REDAKSI

Keputusan mundurnya pengurus Senat Mahasiswa UNS periode 1994-1995 karena di tolaknya konsep Badan Eksekutif Mahasiswa oleh pihak rektorat ternyata cukup berdampak pada Majalah Kentingan. Kantor SM UNS yang selama ini juga sebagai tempat menumpang sekretariat Kentingan harus dikembalikan pada rektorat. Padahal, selama ini kantor itulah satu-satunya tempat berkumpulnya segenap wadya bala Lembaga Penerbitan Mahasiswa UNS yang berjumlah tak kurang dari 30 personil.

Beberapa kalangan mahasiswa bahkan menganggap *Kentingan* mengalami nasib sama dengan Komponen (majalah mahasiswa tingkat univeriteir yang hanya terbit sekali). Mengira pengunduran diri pengurus SM sama dengan matinya penerbitan Kentingan, karena mengira lembaga penerbitan mahasiswa tingkat universitas ini berada langsung di bawah senat mahasiswa.

Sementara itu berbagai upaya untuk dapat meminjam kantor SMPT ditolak dengan berbagai alasan pula. Menurut seorang pejabat di gedung rektorat, meminjamkan sepetak ruang yang berukuran kurang lebih 20 meter persegi tersebut akan membawa sejumlah dampak, baik politis maupun psikologis, bagi dinamika kemahasiswaan di kampus (sayangnya alasan ini tidak diterang lebih jauh). Sampai kini, jadilah kantor yang pernah kemalingan sebuah mesin ketik itu berdebu dan memfungsikan diri sebagai gudang.

Inilah tebengan sekretariat kita

Walhasil, untuk kepentingan rapat-rapat Kentingan harus meminjam ruang sidang yang lengang karena besarnya kapasitas, tentu dengan terlebih dulu melihat jadwal pemakaian dan mengajukan permohonan resmi. Untuk sebuah kerja penerbitan yang membutuhkan pertemuan sesering mungkin, tentu langkah ini sangat tidak praktis dan efisien. Karena tidak menemukan rumah kost yang dapat dijadikan sekretariat, akhirnya terpaksalah kami menggelar pertemuan-pertemuan lesehan di depan auditorium atau menumpang pada warung makan kampus yang telah tutup.

Sekarang kami hanya dapat berharap dengan adanya rektor yang baru, yang salah satunya ditinggali "PR" bubarnya SMPT, dapat segera memfungsikan student center yang satu tahun berselang ini telah berdiri megah. Sehingga permasalahan ketiadaan sekretariat yang dirasakan oleh banyak unit kegiatan mahasiswa selama ini dapat teratasi.

Redaksi

KENTINGAN
DITAK MURANI MAHASISWA

Diterbitkan oleh: Lembaga Penerbitan Mahasiswa Universitas Sebelas Maret (LPM UNS) • **Pelindung**: Rektor Universitas Sebelas Maret • **Penasehat**: Pembantu Rektor III UNS, Dr. Andrik Purwasito, Drs. Anto Suranto • **Pimpinan Umum** : Moh. Ridlo • **Pimpinan Redaksi**: Budi Nugroho Sw. • **Pemimpin Litbang**: Agus Priyono • **Pimpinan Perusahaan**:Nurul Hidayah • **Sekretaris Umum**:Suwarto Barkah • **Sekretaris Redaksi**: Rita Ardiyanti • **Dewan Redaksi** : Ali Rustamaji, Hening Purwati, Nanang BS, Nurul Hz, • **Reporter**:Ulin Ni'am, Robiatul Adawiyah, Sri Wahyuningsih, Makarti Rahayu, Budiono, Topik G • **Artistik**: Arena Yudi, Basnendar • **Dokumentasi**: Intarto SHP • **Penelitian**: Anik Dwi H.,Heri Purnama • **Pemasaran**: Komaeroh, Joko B, Susanti • **Alamat**: Kampus Mesen Jl.Urip Sumoharjo no. 110 Surakarta.

Redaksi menerima tulisan dan foto yang sesuai dengan isi dan misi majalah ini. Redaksi berhak mengubah tulisan sebatas tidak mengubah isi dan maknanya. Kiriman tulisan hendaknya diketik rapi dengan spasi ganda. Tulisan dan foto yang dimuat tidak selalu mencerminkan pendapat redaksi. Tulisan yang dimuat akan mendapatkan imbalan sepantasnya. Tulisan yang tidak dimuat akan dikembalikan bila disertai alamat dan perangko secukupnya.

SAJIAN

FOKUS UTAMA

POTRET PENDIDIKAN TINGGI KITA

Pendidikan tidak lagi murni, di sana terdapat kepentingan lain baik kepentingan ekonomi maupun kepentingan politik. Bukankah pendidikan yang baik merupakan salah satu jargon kemajuan ? Apakah selamanya pendidikan tinggi akan menghasilkan pengganggguran terdidik ? Lalu bagaimana masa depan bangsa ini ?

9

FOKUS KHUSUS

BILA ORNOP DICURIGAI

ORNOP (Organisasi Non Pemerintah) semakin dinamis dan semakin luas bidang garapnya. Sayang usaha mereka tidak mendapat dukungan yang berarti dari pemerintah, padahal upaya mereka sangat membantu pembangunan.

35

FIGUR

EMHA AINUN NADJIB

Budayawan yang paling banyak kena cekal ini bercerita tentang hidup dan kehidupan. Dia mengungkapkan pandangannya terhadap orang-orang yang mencekalnya, umat Islam, mahasiswa apa sebab dia tidak percaya pada dirinya sendiri.

46

SAJIAN

SEKITAR KITA

KISRUH MAMBA'UL ULUM

Kemelut di lingkungan keraton ini tidak kunjung selesai. Mungkin sengaja diperlambat agar orang lalu melupakannya. Bagaimana pendapat orang-orang yang bergelut dengan permasalahan ini ?

42

SURAT REDAKSI	3
SWARA MEREKA	6
EDITORIAL	8
ARTIKEL UTAMA	14, 16
KENTRUNG	19
APRESIASI	23
SERAMBI	26
SENTILAN	28
KOLOM	29,59
BIDIK	31
AKADEMIKA	39
OPINI	51,52
CERPEN	55
LINTAS KAMPUS	60
STOP PRESS	62

Kredit Foto : Budi Nug., Intarto, Ali R, Nurul Hz. Dok. HMI, Dok. SMID,
Cover : Basnendar H.

SWARA MEREKA

SURAT UNTUK TEMAN-TEMAN KAMPUS

Mungkin inilah lontaran dari seorang yang bingung dan absurd bahwa kita hidup ini hanya sekali, jangan disia-siakan, dan bersenang-senang kawan ! Idealis maupun perhatian pada masalah sosial hanyalah pada forum seminar, diskusi dan tataran konsep saja. Setelah selesai suatu kepanitiaan, berfoya-foyalah, gunakan uang kepanitiaan untuk makan-makan atau apa saja dan bersantailah selalu dalam kerja, sebab hanya SC, Ketua Panitia dan Sekretaris yang bekerja, kalau ditambah paling seksi perijinan dan seksi dekorasi yang biasanya di tekel perlengkapan.

Cita-cita tidak harus tinggi karena kita banyak koneksi maka rajin-rajinlah kenal dengan dosen, dekan atau pejabat-pejabat yang diperlukan. Masalah-masalah yang menyangkut problema kampus misalnya depolitisasi, intervensi dan lain-lain tidak usah ikut campur. Pusing memikirkan hal tersebut sebab hanya orang tolol dan kurang kerjaan yang memikirkan hal tersebut, apalagi demonstrasi hanya membawa ke arah mara bahaya saja.

Berlomba-lombalah menunjukkan kemewahan dengan rajin memoroti orang tua sebab orang tua kita bekerja keras buat anak- anaknya, kita di wajibkan untuk menghabiskannya, masalah rejeki itu di tangan Tuhan. Belum tentu orang bekerja keras seperti tukang becak akan lebih makmur kehidupannya dibanding dengan pengusaha. Untuk kaum yang kaya rajin-rajinlah beramal dengan maksud mendapatkan balasan. Untuk seorang pekerja keras janganlah berharap sebab hidup di negeri yang berkebudayaan ini tidak ditanggung akan menjadi bahagia. Untuk kaum marginal janganlah iri sebab takdirmu seperti ini dan selalu harus dijalani. Mungkin jatahmu di sorga nanti, itupun bila kau melakukan dengan niat yang suci.

Sebenarnya masih banyak yang ingin saya ungkapkan tetapi saya semakin bingung mungkin inilah hidup di dunia yang dilematis sehingga harus dapat berpolitik. Dan aku melihat sebuah potret buram wujud realitas idealisme mahasiswa.

ARUL & HERMUNT
FISIP '93

■

REVISI BPK ?

Akhir-akhir ini makin banyak mahasiswa yang mengecam kebijakan yang mewajibkan mahasiswa membeli buku pegangan kuliah (BPK). Alasannya karena BPK kurang bermutu (baik cetakan/kualitas keilmiahan), tidak pernah ada revisi, BPK hanya mempersempit wawasan mahasiswa, ketidakseimbangan antara biaya yang dikeluarkan dan manfaat yang diperoleh, dan mungkin masih banyak alasan yang lain.

Dalam KOME (Tabloid Fak. Ekonomi), disana dibahas tentang BPK mulai sejarahnya sampai kelanjutannya besok itu bagaimana. Dalam wawancara dengan Drs. Baharudin (dari PUSLITBANGJARI) dikatakan bahwa saat ini sedang diadakan usaha untuk merevisi BPK menjadi 'text book' yang memadai bagi mahasiswa, setidaknya sekualitas dengan text book milik universitas terbuka.

Sebagai pilot project saat ini sedang direvisi 10 BPK. Sebuah usaha yang patut untung kita acungi jempol. Namun dari usaha revisi tadi muncul berbagai macam pertanyaan antara lain :

1. Sampai kapan BPK selesai direvisi (mengingat jumlah total BPK saat ini 2600 buah). Dan apakah dosen-dosen kita mampu merevisi BPK menjadi text book yang memadai ? Sebuah pertanyaan yang cukup untuk merefleksi kembali SDD (Sumber Daya Dosen) kita, mengingat dosen-dosen kita banyak yang malas menulis.

Wisuda ? inilah kesepatan buat naik bis antik buatan adik tingkat. Ya, mumpung,lah, kapan lagi.

2. Jumlah BPK yang 2600 buah dan biaya yang 1/2 juta per buah, membuat kita harus mampu menyediakan dana 1,3 milyar. Dari mana dana itu (kata : Drs. Baharudin : yang jelas dari mahasiswa. Alhamdullilah ...). Mampukah kita menyediakan dana sebesar itu ?.

Secara pribadi saya mendukung rencana revisi tersebut. Dan sebagai rasa dukungan saya, saya mengajak kawan-kawan yang selama ini merasa jadi korban BPK untuk mengumpulkan BPK dan tidak membeli BPK lagi supaya dana untuk mencetak BPK bisa digunakan untuk biaya re-

visi/perbaikan. (Gimana Senat/BPM Fakultas).

Dan bila *ternyata* Universitas tak mampu menjawab dua pertanyaan saya diatas, maka seharusnya "BPK dihapus", diganti dengan silabus yang sementara ini banyak diterapkan oleh dosen-dosen ekonomi.

Indra Priyadi
Fak. Ekonomi/ Akuntasi.

■

Optimis dengan SMPT

Oooo... 'KENTINGAN' masih bisa bernafas too ?. Saya sempat khawatir edisi yang kedua ini tidak sempat meluncur, pasalnya alamat redaksi yang sekretariatnya di SMPT UNS itu kan nggak pernah buka. Lha wong SM UNS memang sudah nggak ada!. Tapi saya juga merasakan kesan 'lucu', kok Kentingan bisa terbit? Lha wong mahasiswa lainnya di tingkat UNS yang merupakan anggota SMPT sudah nggak terbit/loyal dan sepertinya Kentingan tidak terpengaruh kalau induknya sudah nggak ada. Tapi bagi saya hal demikian itu bukan masalah.

Bagi saya konsep SMPT atau BEM yang kita perjuangkan bukan merupakan konsep harga mati, begitu pula 'Sang Dewa' SK Mendikbud 0457/1992. Masih banyak format *baru yang mampu berfungsi*, beresensi sama dengan konsep ideal yang kita harapkan bila kita masih mau berfikir dan bicara. Saya optimis peran dan existensi Kentingan justru sangat vital untuk media komunikasi dan informasi yang distributif dan efektif bagi mahasiswa dengan segala idealismenya, disamping diskusi-diskusi kemahasiswaan yang kian berstimulan dan bersimultan diadakan oleh tiap lembaga kemahasiswaan tingkat fakultas tentunya.

Khusus untuk materi Kentingan, pada halaman Rublik Bidik tata letak foto copynya masih cukup tidak bagus, sinopsisnya kurang dan sepertinya terlalu makan halaman banyak padahal fotonya tidak banyak, dan apakah memang Rubrik 'Karya Ilmiah Mahasiswa' tidak diadakan ? Bagaimana kalau masalah Intensitas dan macam-macam kegiatan masing-masing fakultas kita angkat rame-rame. Sebab ini akan berelevansi di masalah pendanaan dan birokrasi, dengan demikian tiap fakultas akan merasa dan butuh Kentingan.

Sunarto '90
Sanggar FAPERTA

■

LIMA HARI KERJA : MENYEDIHKAN !

Program lima hari kerja menurut saya sangatlah merugikan bagi mahasiswa, istemewanya di UNS. Bayangkan, sebagai student day, hari Sabtu jarang berfungsi dengan baik, bahkan menimbulkan intrik yang aneh. Masak untuk memakai salah satu ruang di Gedung Pusat diminta untuk membayar ongkos lembur bagi karyawan ?

Yang paling menyebalkan, perpustakaan tak satu pun yang buka. Padahal banyak mahasiswa, apalagi yang menyusun tugas akhir, menggunakan hari Sabtu sebagai waktu yang strategis untuk menghabiskan waktunya di perpustakaan. Kalau hari-hari biasa 'kan tergangu oleh jam kuliah ?

Sungguh, lima hari kerja bagaikan setan bagi mahasiswa. Dan tak banyak memberi perubahan apapun juga, sebab beberapa fakultas sebelum program ini diterapkan, telah meliburkan mahasiswanya di hari Sabtu. Sekarang ?! Karyawan yang digaji, untung, mahasiswa yang membayar, buntung !

Mahasiswi Kommas '92

■

perjuangan menuju demokratisasi memang membutuhkan pengorbanan semoga bukan menjadi "tumbal" yang sia-sia.. percayalah, hilang satu, tumbuh seribu

dipersembahkan oleh Kentingan sebagai solidaritas atas pembreidelan Tabloid SAS Fak. Sastra Univ. Jember

MELEPAS BELENGGU

Hampir pasti Anda pernah mendengar atau membaca apa yang dikemukakan Emile Durkheim tentang pendidikan. Sosiolog Perancis terkemuka tersebut menilai bahwa pendidikan sebetulnya berwajah ganda. Di satu sisi pendidikan berfungsi membebaskan manusia, pendidikan akan mampu membawa peserta didik menjadi manusia yang mandiri, berinisiatif, berkemampuan -baik intelektual maupun praktis- serta sanggup memecahkan persoalan yang dihadapi. Sisi yang lain pendidikan justru dapat membelenggu manusia, pendidikan menjadikan manusia tergantung terus menerus kepada orang lain dan tidak mampu mengambil inisiatif.

Sebagai pembebas, pendidikan tentu tidak dapat dianggap hanya sebagai jembatan menuju lapangan kerja. Ia tidak sekadar menanamkan rasionalitas sasaran dengan memberikan bekal sejumlah pengetahuan dan ketrampilan, namun juga harus membekali peserta didik dengan rasionalitas nilai sehingga menjadi -meminjam harapan Ki Hadjar Dewantoro- arif dan bersetiakawan.

Memang, demikian besarnya harapan yang dibebankan pada pendidikan. Lihatlah apa yang disebutkan dalam GBHN, bahwa pendidikan merupakan proses pencerdasan kehidupan bangsa dengan tujuan pembentukan manusia Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan filosofi seperti itu maka pendidikan menganut prinsip keselmbangan antara pengembangan kualitas iman, ilmu dan amal serta termasuk didalamnya kualitas ketrampilan.

Namun ketika pendidikan tetap dituntut untuk mengalsdikan diri demi menghasilkan manusia Indonesia -YB. Mangunwijaya menyebut manusia Indonesia bukan sekadar sumber-daya-manusia- yang memiliki kemampuan ibarat "bumi dan langit" di saat yang sama derap kehidupan modern-industrial pun turut mempengaruhi orientasi penyelenggaraan pendidikan. Masyarakat semakin bersikap pragmatis, aktif dan partisipasif sebagai dampak kemajuan ekonomi dan teknologi. Pasar yang banyak menuntut tenaga profesional telah memunculkan pelbagai "sekolah kejuruan" tidak saja pada tingkat pendidikan menengah dan non formal, namun juga pada pendidikan tinggi.

Pada pendidikan tinggi, penyesuaian kurikulum, penambahan program studi, pelatihan staf akademik, pengadaan prasarana/sarana praktik dan massafikasi pun dilakukan untuk meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat dan memenuhi kebutuhan kehidupan modern-industrial tersebut. Sementara setiap tahun kita senantiasa mendengar lagu lama mengenai membludagnya lulusan SLTA yang tidak tertampung di perguruan tinggi namun tidak memiliki cukup ketrampilan untuk bertarung dilapangan kerja, serta himbauan agar tamatan SLTA tidak menempatkan perguruan tinggi sebagai batu loncatan satu-satunya. Kondisi yang terus berulang ini memang tidak terlepas dari popularitas perguruan tinggi, utamanya universitas, di masyarakat yang sarat dengan simbol-simbol kesuksesan. Meski disaat yang sama universitas juga tengah digugat karena dinilai tidak mampu menghasilkan "sarjana siap pakai".

Namun betulkah perguruan tinggi telah gagal menyelaraskan fungsi dan perannya ditengah perubahan zaman! Ataukah masyarakat dan negara yang berharap terlalu banyak serta kurang memahami hakekat perguruan tinggi ?

Mungkin, penyesuaian orientasi pragmatis-fungsional yang dilakukan tersebut merupakan tuntutan zaman yang tak dapat ditolak. Namun penyesuaian yang berjalan terlalu jauh tanpa memperhatikan azas keseimbangan dari filosofi pendidikan dapat mempertaruhkan kepentingan yang lebih besar dari masa depan bangsa ini. Krisis moral, spiritual, kehilangan identitas, pengingkaran budaya merupakan sejumlah ancaman bagi eksistensi bangsa jika pendidikan mengejar orientasi pragmatis dan mengabaikan proses pembudayaan bangsa.

Karenanya perlu ada pembatasan sejauh mana kepentingan praksis dapat diterima sehingga pendidikan ini tidak terlepas dari sosialisasi nilai-nilai dan pembudayaan bangsa. Memasuki abad ke 21 lima tahun mendatang agaknya perlu dilakukan "pemumian" penyelenggaraan pendidikan agar tidak tergoda dengan tuntutan-tuntutan modern-industrial sesaat. Sehingga memasuki ahad perdagangan bebas dan kecanggihan tekonologi tersebut pendidikan akan mampu memberikan kontribusi besar bagi pembebasan dan pencerahan bangsa ini.

Redaksi

POTRET PENDIDIKAN TINGGI KITA

Sekolah Kejuruan Dengan Titel Sarjana?

Tidak ada tanggung jawab lebih besar bagi semua pihak yang melebihi pendidikan, yang menjadi beban tidak saja bagi negara, namun keberhasilannya juga menjadi tanggung jawab masyarakat. Lewat pendidikan, terlebih perguruan tinggi, diharapkan lahir manusia manusiawi yang sanggup menghadapi persoalan-persoalan dunianya sambil membangun masa depan yang lebih tangguh. Namun, pendidikan tinggi kita masih berkutat pada sejumlah masalah yang tidak mudah yang pemecahannya memerlukan lebih dari sekadar penerapan strategi pendidikan semata.

Apa yang diharapkan seorang tamatan SMA -yang berbekal pengetahuan yang sebagian besar bersifat akademis tanpa muatan ketrampilan profesional- selain berebut peluang duduk di perguruan tinggi (terutama universitas) ? Terjun ke bursa kerja nyaris mustahil tanpa bekal ketrampilan memadai serta cantolan koneksi yang menjamin.

Karenanya tidak terlalu salah bila tamatan SLTA -yang 70 % diantaranya merupakan lulusan SMA- pun berbondong-bondong menyerbu ke perguruan tinggi. Bukan semata lantaran mental formalisme dan feodalisme yang merasuki norma-norma kehidupan sebagian masyarakat kita. Setidaknya bekal ijasah perguruan tinggi akan mampu me-ningkatkan daya sa-ing merebut kesempatan kerja, apalagi hampir semua pa-saran kerja mensyaratkan status akademik dan titel.

Menurut Ace Suryadi masyarakat kita memang cenderung mengkultuskan pendidikan sebagai lembaga yang langsung mempersiapkan tenaga yang mam-pu dan terampil bekerja. Karenanya banyak tamatan SLTA yang memasuki perguruan tinggi dengan niat sekadar ditampung, kuliah kemudian lulus.

"Pendidikan dianggap bisa menjawab apa saja," ujar Kepala Pusat Informatika Depdikbud tersebut. Disamping itu persoalan lainnya adalah adanya gejala devokasionalisasi (peng-umum-an) di tingkat SLTA, yang melahirkan penganggur-an besar pada tingkat perguruan tinggi serta lebih banyaknya tenaga akademis daripada tenaga yang memiliki keahlian profesional.

Besarnya harapan masyarakat tersebut masih ditambah lagi dengan tuntutan negara agar perguruan tinggi (baca : univ:rsitas) juga dapat berperan dan menyumbangkan kontribusi pemikiran bagi bangsa dan negara. Universitas dituntut memenuhi kebutuhan sumber daya manusia bagi percepatan pembangunan, khususnya dunia usaha/ industri.

Desakan dari berbagai sudut tersebut menjadikan universitas yang ada dalam kondisi dilematis. Apakah universitas tetap pada fungsi semula melahirkan ilmuwan dengan kemampuan analitis akademik atau mendidik tenaga ahli profesional untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja. Disamping itu proporsi perguruan tinggi pun tidak imbang. Proporsi pendidikan sosial dan humanisme masih jauh lebih besar ketimbang pendidikan sains, teknologi dan bisnis (perbandingan 60 : 40). Sementara untuk memperbesar proporsi pendidikan sains dan teknologi bukan perkara mudah, bila melihat adanya sejumlah keterbatasan seperti dana, tenaga pengajar, prasarana/ sarana fisik. Karena alasan itu pula perguruan tinggi swasta lebih banyak yang membuka progra:n-program sosial, sehingga berakibat oversupply sarjana yang berlatar akademis ilmu sosial.

Produk Perguruan tinggi tidak siap pakai ?

Namun apa sebenarnya maksud didirikannya perguruan tinggi ? Perguruan tinggi dimaksudkan untuk menciptakan manusia-manusia intelek yang manusiawi, sanggup berpikir dan bekerja untuk masyarakat dan negaranya. Dengan kata lain, ia didirikan untuk menjadikan manusia lebih manusiawi, bukan semata untuk membimbing melewati jembatan menuju lapangan pekerjaan. Karenanya perguruan tinggi integrasikan pelbagai disiplin ilmu secara kualitatif.

Dalam perjalanannya perguruan tinggi, utamanya dan dalam hal ini : universitas, menjadi tempat dikumpulkannya berbagai disiplin ilmu secara ku-antitatif dan me-luluskan sarjana - yang banyak dikeluhkan, tidak siap pakai tapi hanya siap latih. Untuk mengembalikan fungsi dasar universitas dicoba diimbangi dengan memasukkan program-program huma-niora atau ku-liah-kuliah dasar. Namun upaya ini juga tidak sepenuhnya berhasil karena adanya mata kuliah dasar bagi siswa (tidak cukup alasan menyebut siswa perguruan tinggi sebagai "mahasiswa") hanya dianggap sebagai beban yang harus dijalani sampai masa ujian, untuk kemudian menjalani beban mata kuliah yang lain, dan seterusnya.

Jalan keluarnya menurut J. Drost S.J., mantan Rektor Seminari Wacana Bhakti Jakarta, adalah dengan menyediakan ilmuwan sejati sebagai pengajar yang akan mampu membimbing dan membina siswanya menjadi manusia intelek yang mampu dan sanggup menjadi manusia demi manusia lain dalam lingkup profesi masing-masing. Ilmuwan sejati akan sanggup memanusiakan manusia lain melalui disiplin ilmu apapun.

Akademis saja tidak cukup, perlu keahlian lho !

Dengan demikian seorang intelektual pun akan dapat menempuh hidup yang menyimpang dari disiplin ilmu yang digeluti sebelumnya begitu ia lulus perguruan tinggi. Meski ada yang tetap bekerja sesuai bidangnya, namun seorang intelek akan selalu dapat berfungsi dimanapun yang membutuhkan "kemanusiaannya", bukan semata ketrampilannya.

Namun untuk menghasilkan manusia intelektual tersebut, perguruan tinggi di Indonesia masih menghadapi sejumlah kendala, diantaranya adalah "massalisasi" yang mengakibatkan turunnya mutu pendidikan. Perguruan tinggi mau tidak mau harus menerima siswa yang dijatahkan sesuai dengan kapasitas bangku yang ada, pun seandainya calon siswa tersebut tidak memenuhi kualifikasi yang diinginkan. Alasan untuk memenuhi jatah kursi yang tersedia memang bukan pertimbangan ekonomis semata, namun juga alasan sosial-politis.

Bahkan pada beberapa perguruan tinggi swasta, yang terasuki oleh orientasi profit motive, besar kecilnya sumbangan pendidikan yang dapat diberikan calon siswa akan mempengaruhi peluang diterima tidaknya kuliah, ketimbang kemampuan intelektual untuk menempuh dan menyelesaikan studi.

Persoalan di seputar kurikulum perguruan tinggi bukanlah perkara mudah, apalagi keinginan untuk memadukan studi budaya bersama ilmu pengetahuan, teknologi dan ilmu kemasyarakatan yang saling menunjang. Terlebih lagi perguruan tinggi di Indonesia merupakan mitra pemerintah dan masyarakat, sehingga tidak didudukan dalam posisi yang saling berhadap-hadapan. Sehingga kemitraan tersebut melahirkan adanya Tri Dharma yang mengharuskan perguruan tinggi, khususnya universitas, melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat. Jadi langkah perguruan tinggi memang harus menyelaraskan diri dengan gerak masyarakat karena dari sanalah perguruan tinggi berasal.

Namun kemanfaatan langsung dari keahlian yang terdapat di suatu universitas, dalam kaitannya dengan harapan "sarjana siap pakai" dan pengabdian masyarakat, tidak begitu saja dapat diharapkan karena tidak semua bidang keahlian dapat diterapkan/ diabdikan langsung pada masyarakat. Beberapa bidang keahlian memang dapat melakukan hal tersebut, seperti hukum, kedokteran, pertanian, teknik dan sebagainya. Sementara beberapa bidang tertentu harus menahan diri untuk dapat menterapkan/ mengabdikan langsung pada masyarakat, seperti filsafat, kebudayaan, sosiologi, politik, sastra dan sebagainya.

Sementara menurut Drs. Novel Ali kurikulum perguruan tinggi kita sudah lama beku, sebaiknya setiap lima tahun sekali kurikulum dikaji ulang oleh konsorsium-konsorsium yang ada.

"Asal untuk menyelaraskan dengan perkembangan, tidak masalah kalau kurikulum senantiasa berubah, khan langkah ini demi kesempurnaan," ujar Novel.

Saat ini yang penting menjadi perhatian adalah link and match, yang dapat dimanfaatkan untuk mempersiapkan sarjana yang siap pakai tapi tidak dididik menjadi tukang. Siap pakai disini juga bukan dalam artian yang konkrit. Disamping itu "siap pakai" hanya bisa digunakan kalau ada spesifikasi yang jelas, misalnya pada jurusan ilmu komunikasi yang dapat mengarahkan peserta didik pada suatu spesialisasi.

Wakil Ketua I Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa Ki Burhanoeddin Loebis menilai acuan pendidikan sebagaimana disebutkan dalam GBHN sudah lengkap dan inovatif, namun menghadapi masalah ketika harus berbenturan dengan permasalahan manusia pelaksananya. Sebagai gambaran, Taman Siswa men-

dasarkan pendidikannya pada Panca Darma Taman Siswa yaitu kemerdekaan, kodrat alam, kebudayaan, kebangsaan dan kemanusiaan.

"Kemerdekaan merupakan langkah awal manusia yang dibatasi oleh tuntutan kodrat alam. Langkah manusia semuanya menuju ke arah kebudayaan, keluhuran hidup manusia yang diletakkan atas

dasar kebangsaan serta dibingkai dalam kerangka kemanusiaan yang lebih luas," jelas Ki Burhanoeddin menjelaskan filosofi pendidikan Taman Siswa pada Kentingan.

Kiranya mengembalikan pendidikan pada tujuan pencerahan dan kebenaran manusia memerlukan lebih dari keberanian untuk membukakan pintu kebebasan dengan tidak terbelenggu oleh trauma-trauma masa silam.

Aid/N

Dihimpun dari berbagai sumber serta laporan Ali R., Nurul I.Z., Ulin Ni'am, Obi, Makarti, Hening.

BEREBUT BANGKU KULIAH DENGAN "ANAK KEJU"

Perguruan tinggi kita telah dinamai dengan banyak julukan, mulai dari menara gading, menara air sampai menara api. Namun julukan tersebut belum juga merubah adanya kenyataan bahwa kesempatan mengenyam bangku kuliah ternyata lebih banyak dinikmati segelintir anak negeri yang tergolong "bukan ekonomi lemah". Padahal beban pendidikan tersebut sebagian besar justru dipikul oleh rakyat kebanyakan lewat pajak-pajak yang ditarik negara.

Karenanya wajar jika kemudian muncul tuduhan perguruan tinggi hanya memperkuat struktur ekonomi dan kekuasaan golongan masyarakat atas yang telah mapan. Sangat sedikit rakyat kecil yang sanggup bersaing dengan "anak-anak keju" yang memiliki lebih banyak waktu belajar, akses informasi dan kemampuan ekonomi.

Drs. Novel Ali juga sependapat bahwa ada hubungan antara kemampuan ekonomi dengan kesempatan mengikuti pendidikan. Menurutnya karena kemampuan pemerintah menambah jumlah perguruan tinggi negeri sangat kecil, maka subsidi untuk perguruan tinggi swasta harus ditingkatkan agar meringankan beban mahasiswa masuk PTS.

"Mahasiswa negeri sudah disubsidi per kepala. Dan mahasiswa swasta -yang juga membayar pajak- berhak memperoleh subsidi yang lebih besar dari negara untuk meringankan biaya pendidikan swasta yang tidak murah," paparnya.

Namun Novel Ali juga menyayangkan dosen-dosen negeri yang memasang "tarif" tinggi bila diminta mengajar di perguruan swasta, sehingga akibatnya PTS -yang dijadikan lahan menambah uang saku- juga menjerat leher mahasiswanya dengan memasang biaya yang besar.

"Mahasiswa yang selalu jadi korban, jadi sapi perah," tambah dosen FISIP UNDIP yang juga mengajar pada PTS di Semarang tersebut.

Memang salah satu strategi dasar pendidikan adalah pemerataan -tiga lainnya adalah relevansi, kualitas dan efisiensi- namun kerangka pendidikan untuk semua tersebut lebih diprioritaskan pada pendidikan dasar (sembilan tahun).

Sementara adanya beasiswa yang digembar-gemborkan untuk membantu mahasiswa yang lemah ekonomi juga tidak dapat berbuat banyak. Beasiswa yang biasanya hanya berjangka waktu satu tahun tersebut tidak bisa diharapkan bakal menyokong sepenuhnya keperluan studi yang berjangka waktu 4-5 tahun. Disamping itu proses seleksi permohonan beasiswa yang tertutup semakin memperkecil harapan beasiswa bakal diterima oleh mahasiswa golongan ekonomi lemah yang lebih berhak. Apalagi persyaratan proseduralnya sendiri -dimana tahap ini belum menjamin didapatnya beasiswa- sudah memakan cukup banyak biaya.

Untuk melebarkan peluang "anak-anak singkong" merasakan bangku kuliah, salah satu langkah yang dapat ditempuh adalah dengan membuka kembali kredit studi jangka panjang pada masyarakat yang secara ekonomis berada dibawah. Kredit semacam KPR (kredit pemilikan rumah) tersebut dapat dikembalikan setelah menyelesaikan studi dan bekerja.

Begitu banyak peserta didik yang harus nyambi memeras keringat untuk mengais rejeki dan akibatnya prestasi belajar pun menurun dan terus menurun lantaran sempitnya kesempatan menggali pikiran dan kreatifitas. Karenanya tiada lain kredit studi memang sangat dibutuhkan kalau tidak ingin melihat perguruan tinggi kita kembali dibangun menjadi menara-menara -apapun jenisnya.

(Aid/N)

Novel Ali :
"Alokasi Dana Pendidikan Lebih Rendah dari Hankam"

Fenomena menarik bila kita melihat alokasi APBN untuk pendidikan ternyata lebih rendah daripada untuk pertahanan keamanan, terlebih melihat kondisi negara yang dalam keadaan damai. Meski dalam bidang pendidikan, swasta dan masyarakat turut pula berpartisipasi namun tanggung terbesar tetap berada pada pundak pemerintah. Kondisi ini berdampak, diantaranya pada semakin meningkatnya biaya pendidikan yang dipikul oleh peserta didik. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang diikuti, semakin tinggi pula biaya yang harus dikeluarkan rakyat yang mengenyam pendidikan.

Dalam kaitannya dengan kualitas lulusan perguruan tinggi, mahasiswa saat ini sebenarnya memiliki sumber belajar yang relatif lebih transparan dan lebih banyak, sehingga orang bisa pintar bukan hanya lewat lembaga pendidikan, kuliah atau perpustakaan saja. Ini era globalisasi, orang nonton TV -tergantung

yang ditonton- bisa pintar, baca koran bisa pintar, melakukan hubungan internasional juga bisa pintar.

Mahasiswa sendiri sering salah mempersepsikan sistem SKS, yang dimaksudkan untuk mempercepat studi, supaya lembaga pendidikan menjadi ilmiah, tidak ada intervensi politik. Tetapi dalam pelaksanaan, mahasiswa belajar intensif sekali sehingga terkadang

lupa memikirkan masalah lainnya. Sehingga menurut saya, kepedulian sosial adalah masalah pribadi tidak ada kaitan langsung dengan sistem SKS. Lagipula mahasiswa sekarang terjangkiti arogansi eksklusifisme, merasa sok ilmiah karena menjadi mahasiswa terus mereka menyendiri/ menepi dari masyarakat.

Kampus sebenarnya merupakan mitra pemerintah dan mitra masyarakat yang juga mencintai bangsa dan negara ini, serta kebenaran. Masak kita mau berbuat onar, kan tidak. Sehingga untuk menunjang fungsinya berikan kebebasan guna mengembangkan diri secara bertanggung jawab. Lembaga perijinan yang ada dikampus itu berarti tidak mempercayai etika kampus.

M. Arif Hakim
(Fak. Ushuludin IAIN Suka Yogyakarta):

"Mahasiswa Hendaknya diikutsertakan"

Perguruan tinggi saat ini tercemari iklim depolitisasi, dalam retorika halus misalnya dengan adanya kuliah wawasan almamater, kewiraan, pendidikan Pancasila dan sebagainya, yang kesemuanya hanya mengandung penafsiran dari atas saja. Mengutip Romo Mangun, saat ini kampus dan kampung jadi terlepas karena mahasiswa dengan retorika yang hulus dibikin menjadi penganalisa murni. Sering disebut ilmuwan yang hanya sekadar mereproduksi kata-kata yang tidak mengandung fraksi sosial politik sehingga mengakibatkan lulusan perguruan tinggi belum bisa dikatakan dewasa/ mandiri.

Oleh karena itu perguruan tinggi di Indonesia hendaknya miliki keotonomian dalam hal; penentuan kurikulum lokal yang melibatkan mahasiswa; mahasiswa hendaknya diikutsertakan dalam pemutusan kebijaksanaan yang menyangkut mahasiswa; serta peniadaan ketentuan batas minimal presensi. Peraturan batas minimal mengikuti perkuliahan hanya menentramkan dosen yang ketakutan mahasiswanya banyak yang absen. Seharusnya ini menjadi tantangan dosen untuk membuat perkuliahan yang dinamis dan diminati mahasiswa.

Pendidikan dan Industrialisasi

Oleh : Muhammad Farkhan

Pendidikan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana diamanatkan UUD 1945. Pendidikan diharapkan dapat mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas. Pengembangan sumber daya manusia ditujukan untuk mewujudkan manusia pembangunan yang berbudi luhur, tangguh, cerdas, dan trampil, mandiri dan memiliki rasa kesetiakawanan, bekerja keras, produktif, kreatif dan inovatif, berdisiplin serta berorientasi ke masa depan untu menciptakan kehidupan yang lebih baik (Cosmas Batubara 1989). Sumber daya yang berkualitas merupakan modal dasar sekaligus menjadi salah satu kunci keberhasilan pembangunan nasional.

Dalam mewujudkannya, pemerintah telah berusaha menyediakan sarana dan prasarana pendidikan, baik formal maupun informal. Pembangunan di bidang pendidikan juga melibatkan pihak swasta. Di samping itu juga menyusun program yang bertujuan untuk pemeraaan pendidikan, misalnya Program Wajib Belajar 6 tahun yang dicanangkan 2 Mei 184 serta sebagai tindak lanjutnya adalah Program Wajib Belajar 9 tahun yang dicanangkan 2 Mei 1994. Penyempurnaan di berbagai aspek pendidikan baik SD, SLTP, SLTA dan PT senantiasa dilakukan dari tahun ke tahun tidak pernah berhenti.

Seiring dengan lajunya pembangunan ekonomi yang intinya adalah industrialisasi, kebijakan bidang pendidikanpun perlu "menyesuaikan". Hal ini tak lepas dari kebijakkan Orde Baru yang menjadikan pembangunan ekonomi sebagai "panglima". Konsekuensinya, sebagaimana bidang-bidang lainnya misal politik, sosial dan budaya, kemudian bidang pendidikan, diakui atau tidak tersuborsi oleh bidang ekonomi.

ANTARA PENDIDIKAN DAN INDUSTRIALISASI

Pada dasarnya bisa dipahami bila institusi pendidikan "menyesuaikan" dengan kondisi obyektif masyarakat. Sebab, bagaimanapun harus dipahami bahwa salah satu tujuan pendidikan adalah menyiapkan sumber daya manusia atau tenaga kerja yang berkualitas. Persoalannya, adalah bagaimana agar "penyesuaian" tersebut tidak sampai menghilangkan esensi pendidikan itu sendiri. Sebagaimana dikatakan sendiri Prof. Teuku Jacob, pendidikan tidak hanya meliputi menusia sebagai sumber daya ekonomi dan industri belaka, melainkan terutama sebagai manusia itu sendiri (Jawa Pos, 12 Agustus 1994). Kalau tidak, manusia akan didominasi oleh hasil usaha teknologi dan ekonomi ciptaannya sendiri, sehingga mengurangi kemerdekaan emosional, intelektual dan mental.

Dewasa ini pemerintah menerapkan strategi pendidikan "*Link and match*". Strategi tersebut memadukan sekaligus pemerataan kesempatan, relevansi, kualitas dan efisiensi. Penekanan utamanya lebih pada pengembangan sumber daya manusia Indonesia menghadapi abad ke-21 yang makin sempit, sulit dan kompetitif akibat perkembangan teknologi dan industrialisasi yang semakin cepat (Nusa Putra, 1994). Dalam situasi seperti ini tidaklah berlebihan jika ada pihak-pihak yang khawatir bahwa pendidikan kita hanya akan menciptakan "sekrup-sekrup" untuk bisa jalannya "mesin" yang sangat besar yaitu dunia industri. Parahnya, gejala tersebut rampaknya memang terjadi. Hal ini bisa dilihat dari adanya kecenderungan dalam dunia pendidikan yang mengarahkan manusia mempunyai -- menurut Habermas -- kecerdasan instrumental bukannya kecerdasan emansipatorik. Menurut Habermas, kecerdasan instrumental adalah rasionalitas atau kecerdasan tukang yang dalam kesadaran akal budi cuma mau mengkaji kehidupan secara dangkal, pragmatis, teknokratis, praktis yaitu semuanya adalah alat untuk mencapai tujuan pribadi semata (Muji Sutrisno, 1992). Karena semuanya (termasuk sesama manusia) adalah instrumen, maka tujuan apapun dapat menghalalkan alat atau cara.

Contohnya, seorang insinyur atau teknokrat yang berkecerdasan instrumental atau berperilaku tukang itu, hanya berpikir sempit, ia tak mau pusing-pusing berdialog dengan nilai, dengan kalkulasi tumbal manusia. Bagi dia asal tujuan teknologi sudah dikalkulasi secara teknis beres dan harus menuntut tumbal, ya resikolah menumbalkan orang itu. Yang penting tujuan teknologi telah tercapai menurut pesanan. Ia tak peduli dengan perhitungan nilai ekologis, perusahaan lingkungan, apalagi lingkungan manusia di luar matriks intrumental teknokrasinya.

Sedangkan kecerdasan emansipatorik (menurut Habermas) merupakan ramuan dari kecerdasan akal budi yang menimbang jernih, dipadukan dengan nurani yang menggugatnya untuk menanyai apa sumbangan kecerdasan kecerdasan ini untuk kemanusiaan ? Apa sumbangan dialog pertimbangan rasional dengan nilai meningkatkan kualitas kehidu-

pan sesama manusia ? Sehingga kecerdasan emansipatorik berproses menjadi kecendekiawanan, yang menggugat terus rasionalitas dalam sumbangannya untuk semakin teremansipasinya orang, semakin merdekanya manusia dari kebodohan, kemiskinan, ketakutan berbicara kritis, dan ketidakberanian berkata tidak, lantaran cemas dan ditakut-takuti penguasa atau kekuasaan yang dominan, dan membungkam kemerdekaan (Muji Sutrisno, 1992).

Hal-halnya dengan Limas Sutanto, dia mengatakan bahwa peradapan modern yang bersendikan rasionalitas instrumental (menurut Habermas) atau *Zwerk rationalitaet* (rasio-nalitas tujuan -- menurut Weber) dan budaya ekonomi konsumen, maka pendidikan cenderung mengalami reduksi, yaitu menitikberatkan proses pada hominisasi menjadikan insan manusia semakin sempurna, lengkap, dan canggih otak, otot dan kemampuan finansialnya. Hominisasi memang tidak sepenuhnya negatif, namun tidak menjamin perwujudan insan manusia yang berpendidikan sendiri, memiliki otonomi wajar, merdeka, bebas dari ketergantungan irasional terhadap faktor-faktor eksternal, memiliki internal *locus of control* (pusat pengendalian kepribadian dari diri sendiri) yang handal, dan bebas dari perasaan rendah diri yang membelenggu. Proses pendidikan yang demikian ini cenderung hanya mengabdi pada industrialisasi dan bisnis raksasa (Limas Sutanto, 1994).

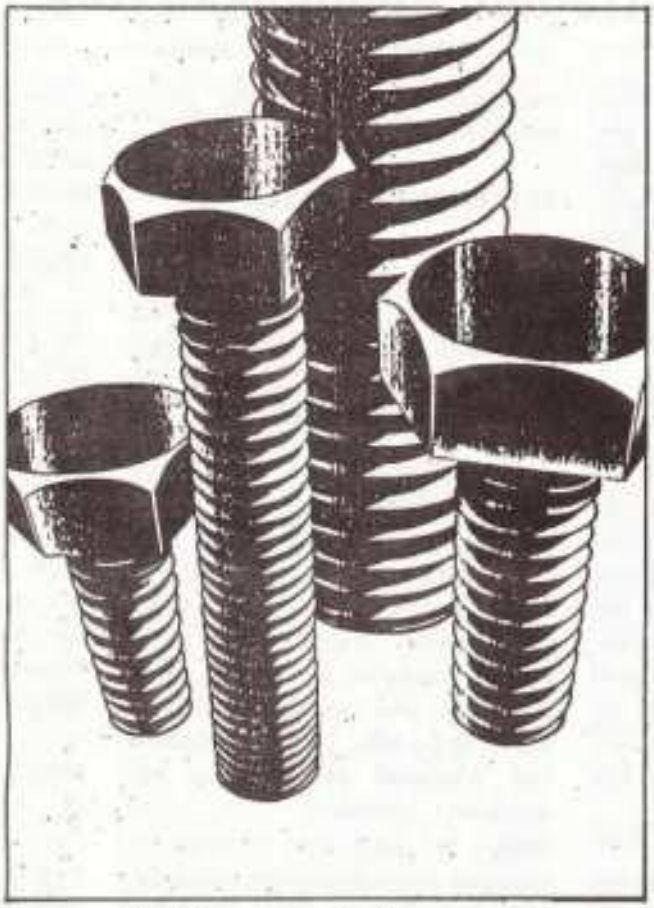

MENGACU KE "KHITTAH"

Untuk mengantisipasi dan mengatasi distorsi-distorsi sebagaimana sinyalemen-sinyalemen di atas, maka sudah krusial untuk kembali mengacu ke essensi atau ke "kitthah" pendidikan. Konsekuensinya, kita harus mau mengkaji kembali pendidikan dari "akar"nya yaitu secara filosofis. Sehingga, dalam permusan kebijakan pendidikan tidak menjadi terlalu pragmatis, namun juga tidak terlalu "idealis".

Adalah sah-sah saja menyusun kurikulum yang mengarahkan peserta didik untuk lebih mempunyai kemampuan praktis. Namun jangan sampai mengesampingkan pendidikan sebagai wahana untuk membentuk manusia Indonesia) yang seutuhnya. Ini sudah menjadi komitmen dan tekad bangsa Indonsia yang dijabarkan dalam GBHN. Manusia yang utuh adalah manusia yang sadar akan eksistensinya sebagai individu, makhluk sosial, bagian alam semesta, dan sebagai makhluk Tuhan. Untuk mencapainya maka dunia pendidikan harus menciptakan situasi yang konduktif.

JJ. Rouseau dalam "Emile" mengatakan bahwa pendidikan seharusnya menerima keunikan dan nilai individu sebagai kenyataan, dan menciptakan situasi yang memungkinkan berkembangnya potensi-potensi individu dan memberi kesempatan kepadanya untuk belajar dari pengalaman. Ketrampilan dapat menunjang pendidikan, tidak sebagai latihan yang sempit melainkan sebagai sumber bagi perkembangan moral. John Dewey lebih menegaskan Rouseau dengan mengatakan bahwa kebajikan dapat diajarkan, namun dia lebih menekankan peranan aktif individu dan kebutuhan untuk mengembangkan kemerdekaan dan otonomi individu. Cita-cita itu dapat tercapai apabila sekolah dapat menciptakan lingkungan yang demokratis. Dewey lebih lanjut mengatakan bahwa dikhotomi antara pendidikan dan ketrampilan/latihan itu dapat diatasi apabila dalam mempelajari pengetahuan praktek (peserta didik) dirangsang untuk menjelajahi ruang lingkup perkembangan intelek yang diperolehnya dari berbagai macam mata pelajaran.

Adalah suatu hal yang krusial, meluruskan dan mengembalikan dunia pendidikan kepada "kitthahnya", tampa harus menolak sama sekali perubahan-perubahan agar terjaga relevansinya dengan tantangan obyektif di masyarakat. Perubahan kebijaksanaan pendidikan, hendaknya tetap mengacu pada fungsinya sebagai pencerahan, pembebasan, dan sebagai bagian dari strategi kebudayaan dalam rangka membentuk manusia Indonesia seutuhnya. Agar konsisiten, maka tidak hanya terumuskan dalam bentuk kebijaksanaan saja, akan tetapi juga melakukan studi serta pengawasan agar pelaksanaan di lapangan tidak mengalami reduksi dan distorsi. Bila hal itu tidak dapat terwujudkan, sebagaimana dikatakan pengamat sosial budaya Solo MT. Arifin, institusi pendidikan secara fungsional akan berubah menjadi institusi ekonomi. Artinya, institusi pendidikan hanya menjadi bagian dan komponen serta tersubordinasi dari dunia industri.

Penulis adalah Mahasiswa Sosiologi FISIP UNS aktif dalam Kelompok Studi Mangkubumen (KSM) Surakarta.

Kepincangan Struktural dan Industrialisasi-Semu

Tragedi Pendidikan Kita

Oleh : Yussac F. Ananda

Berbagai kritik dan kecaman yang menjadi bagian yang absyah dari dunia pendidikan kita dewasa ini kian gencar volume dan magnitudenya. Berbagai kalangan dengan beragam latar belakang keilmuan dan bahkan kepentingan politik turut andil dalam diskursus yang kian rumit dan kompleks itu.

Disatu sisi, bertahannya polemik multi bahkan interdisipliner itu menunjukkan konsistensi perhatian pengamat terhadap isu krusial tersebut. Namun diisi lain yang perlu mendapat perhatian adalah adanya kecenderungan dari diskursus itu untuk hanya berjalan ditempat. Kecenderungan untuk tidak melangkah maju dari posisi tempat dimana isu itu bergulir dan digulirkan, menunjukkan polemik dunia pendidikan kita serasa mengalami Involusi.

Dengan ambisi untuk turut mendorong maju secara progresif kualitas diskursus pendidikan, percikan pemikiran ini mencoba memotret sisi lain yang jarang diturutsertakan dalam diskursus pendidikan. Posisi yang hendak disodorkan adalah keberanian kita semua untuk menatap dilema-dilema pendidikan sebagai refleksi kondisi struktural--berupa kepincangan struktural--yang menjadi kendala skenario populisme pendidikan. Disamping itu, tinjauan sepintas kinerja industrialisasi Indonesia, yang merupakan manifestasi kinerja modernisasi Indonesia, hendak diparkan sebagai komplementer yang menentukan dalam memperjelas pemahaman terhadap kemalut dunia pendidikan.

BERORIENTASI-PASAR

Tidak sedikit pakar yang mengkaji sekaligus menuding sistem pendidikan sebagai sentrum berbagai kemunculan tragedi pendidikan. Sinyalemen pengangguran terdidik, efisiensi yang lepas- target, dan SDM rendah merupakan isu yang paling kerap terdengar diberbagai media, yang lantas disertai berbagai himbauan untuk meningkatkan performance sistem pendidikan. Masih terasa kuat terekam dalam ingatan ketika Habibie menuding ngawurnya sistem pendidikan jika lulusannya menganggur (Tempo alm, 18/5/91). Mendikbud Wardiman sendiri kerap menegaskan himbauan agar hasrat meraih S-1 yang terus melonjak dikalangan calon mahasiswa--juga disertai pemahaman akan kebutuhan pasar, sehingga jangan sampai tidak terserap dilapangan kerja (Kompas, 23/9/94).

Bahwa sistem pendidikan harus mampu membekali anak-didiknya dengan ketrampilan yang dibutuhkannya untuk bekerja, bukanlah asumsi yang hendak dimusuhi oleh para pegiat pendidikan. Dan bahwa, memprihatinkannya kualitas pekerja kita dipandang dari latar pendidikannya, berhubungan dengan ngawurnya sistem pendidikan, juga merupakan proposisi yang sukar disangkal. Demikian pula fenomena bertimbulnya pengangguran terdidik sebagai ekor dari berbiaknya kiat *"low investation but high profit"* dalam sistem pendidikan kita, merupakan kritik pedas yang sulit dielak dan diakui ketajamannya.

Akan tetapi, juga sukar dihindari jawaban yang bernada apologetik yang mengemukakan minimnya anggaran dana pemerintah--bahkan ketika rezim Soeharto sibuk dengan kampanye SDM oleh departemen pendidikannya--sebagai kendala penting, kalau bukan yang terpenting--sebagai akar lambannya dunia pendidikan mengantisipasi kebutuhan pembanguran. Dapat dipaparkan, jika Malaisya pada tahun 1984 telah mengeluarkan sekitar 6,4% GNP-nya untuk pendidikan, atau 15,7% pengeluaran belaja negara ditahun itu, maka Indonesia baru mampu (baru-mau?) mengeluarkan Rp.6,6 trilyun atau 10,6% dari total pengeluaran, untuk tahun 1993/94. Bahkan dikalkulasikan pengamat, masih dibutuhkan tambahan sekitar 3% PDB dari 2% anggaran Repelita VI yang telah diprogramkan.

Gambaran ini sekaligus memperlihatkan bahwa kendatipun dunia pendidikan dirasa kurang mendukung mesin-pembangunan bila terlampau politis--seperti terasa kuat dikalangan perguruan tinggi--kebijakan untuk menskenariokan pendidikan sebagai Kampus "Menara Gading" tidak betul-betul dilaksanakan. Dengan lain perkataan, dihadapan rentetan berbagai ironi pendidikan yang berkisah

tentang pendapatan guru yang minim dan sering dikompas, fasilitas, perpustakaan yan compang-camping dan tarikan SPP yang meningkat akhir-akhir ini, maka ngawurnya sistem pendidikan kita dewasa ini memiliki ikatan simpul yang paralel ngawurnya dalam manajemen anggaran pembangunan.

Disamping itu, birokrasi dunia pendidikan yang menjurus kearah birokrasi yang *gigantic* dan *powerfull*, yang sekaligus memantulkan birokratisasi yang kaku dan korup pada segala bidang kehidupan dibawah manajemen rezim orde Baru, menjadi tambah- ekstra bagi pendidikan yang tidak-efisien. Para dosen kehilangan vitalitas dan dinamika berhadapan dengan style kekuasaan yang menjarah dunia Kampus. Demokratisasi iklim Akademik yang menghargai inovasi dan temuan-temuan pikiran dan fakta bebas terbentur tembok-tembok kokoh kekuasaan yang terpancang didinding-dinding Kampus.

EKONOMI-DUALISTIK

Kendatipun masalah pendidikan berkaitan erat dengan manajemen makro pembangunan, yang secara pintas memperlihatkn hubungan yang tidak intim antara proyek pembangunan makro dengan dunia pendidikan, namun kendala dana pendidikan bukan merupakan masalah satu-satunya yang terpenting. Meskipun Indonesia merupakan Negara papan-bawah dalam rasio antara kesempatn belajar dengan eksplosi penduduk, namun jumlah penduduk yang berkisar 180 juta memang masalah yang tidak ringan.

Yang hendak dikemukakn disini, meskipun hubungan yang lebih serasi antara perencanaan makro pembangunan dengan rencana sektoral perlu ditingkatkan, namun kaitan Pembangunan sebagai manifestasi pendidikan modernisasi dengan landasan struktural yang dipijakinya juga perlu mendapat sorotan. Sebagaimana dikemukakan Peter L.Berger, dalam karyanya paling spektokuler, *Revolusi-Kapitalis*, modernisasi Kapitalis yang sukses--dimana Indonesia sering dianggap satu mata rantai dalam pembangunan yang kapitalistik--diretas dari sukses didesa-desa dan baru, kemudian, ke kota-kota (Berger, 90). Pengalaman Jepang, Korsel, Taiwan dll munjukkan peranan Aktif pemerintah yang melakukan perobahan besar-besaran dalam reformasi Agraria,d an terutama Land-reform-- yang diantara contoh dua negara terakhir, dilakukan secara radikal--memberikan dasar yang kokoh bagi modernisasi yang cemerlang.

Perbedaan yang mencolok dengan Indonesia adalah, kendatipun sejak zaman kolonial Indonesia, untuk meminjam analisis Boeke ditandai dengan situasi *Ekonomi-Dualistik*, namun upaya perbaikan kondisi masyrakat tidak dilakukan secara Mendasar. Upaya pemerintah untuk mengikis ketimpangan warisan kolonial yang menandai watak eksplotatif sistem feodalisme tidak sungguh dilakukan. Padahal, Undang-Undang Reformasi Agraria telah berhasil dirumuskan sebelum Orde Baru naik ketangga kekuasaan. Demikian pula halnya regulasi yang menyangkut penanaman modal asing. Kesempatan yang berskala tinggi diberikan pada pengusaha besara dan petani- petani berdasi telah menyebabkan dibalik berbagai rekor pertumbuhan ditingkat makro tersembunyi dan muncul kemudian secara terang-terangan situasi ekonomi dualistik secara transparan. Agaknya, sinyalemen Prof.DR.Sumitro bahwa ketidakseriusan pemerintah untuk mengatasi kesenjangan merupakan akar dari kepincangan yang kian membengkak perlu mendapat tanggapan yang serius (Kompas, 11/8/94).

Dampak yang dapat dibaca dilatar depan ekonomi Dualistik itu--dimana sektor pertanian dengan cirinya yang subsisisten, agraria dan *low-technology* dijejali sebagian besar masyarakat-- dalam dunia pendidikan adalah besarnaya angka putus sekolah dikalangan siswa dasar, menengah apalagi pendidikan tinggi. Dicatat Waskito tjiptosasmito, dari sekitar 3.159.000 murid yang masuk ke sekolah dasar hanya ada 175.000 yang mampu bertahan hingga kelas 111 SLTA ditahun 1970 (fachry Ali, 1985,h.70). Selama 12 tahun itu telah terlempar keluar kira-kira 3 juta lebih. Minimnya peranan dana-negara yang berfungsi sebagai subsider bagi pendidikan dihadapan penguasaan aset yang ditandai kepincangan struktural mengakibatkn skenario pendidikan sebagi alat untuk--apa yang secara normatif-ideal--disebut sebagai "Upaya mencerdaskan kehidupan Bangsa" dan secara ekonomistik-pragmatikal sebagi sarana "mobilitas vertikal" menemui kendala- besar.

Disamping itu, kepincangan struktural dalam ekonomi Dualistik juga sering menjadi sumber rendahnya insentif output pendidikan yang dapat bekerja. Dipaparkan Umor Juoro, Di Fhlipina masyarakat melek-huruf tidak memperoleh dukungan yang kuat dari sektor-sektor lain di luar pendidikan. Ini disebabkan karena para tuan tanah mendominasi pemilikan tanah di sektor pertanian, dan intensifikasi modal yang menjadi ciri sketor industri, (Umar Juoro, Prisma, 1/90).

INDUSTRIALISASI-SEMU

Kerumitan masalah pendidikan akan semakin teraba kompleksitasnya, manakala modernisasi yang diletakkan pada infra struktur yang rapuh berproses dengan kinerja yang memprihatinkan. Kualitas perobahan sosial berencana yang dibentangkan selama lebih dua dasawarsa pembangunan orde Baru, diukur denga standart negara kapitalis Asia Timur menyodorkan data industrialisasi yang terlambat. Dalam kajian empiris yang diintrodusir Simon Kuznet dan dilengkapi Chenery dan Syrquin,

dengan sampel 111 negara melalui analisa ekonometrik, kinerja industrialisasi menunjukkan akselerasi yang lamban. Hal itu disebabkan, pergeseran sektor primer ke sektor sekunder tidak proporsional sesuai dengan skenario Asia Timur.

Apabila dinegeri-negeri tersebut, titik temu antara sektor primer dan sekunder bertemu ketika angka GNP per kapita $ 360, namun hingga GNP Indonesia mencapai angka $ 540 pada 1988, titik temu itu belum terjadi. Kinerja yang sama juga dapat dibaca dala eskalasi kemampuan masing-masing sektor dalam mengakomodasi tenaga kerja. Di 111 negara, ketika GNP mencapai $ 760 kedua sektor bertemu dengan proporsi daya serap 30 %. Ketika angka GNP mencapai $540 pada 1988, sektor primer masih mendominasi sebesar 55 %, sektor sekunder 12 %. Kenyataan ini sekaligus membuktikan bahwa kecenderungan untuk membebankan kesalahan fenomena "pengangguran-terdidik" baik dari kalangan ahli-ahli ekonomi (teknokrat), teknik (teknolog) ataupun ilmu sosial (humaniora) pada sistem pendidikan adalah analisis yang terlampau reduktif, simpel dan *Unfair*.

Pengkajian yang lebih intensif menunjukkan bahwa kinerja industrialiasi yang tentu saja berkaitan erat dengan kinerja makro pembangunan berpengaruh terhadap kualitas output pendidikan. Dalam logika dan dinamika pembangunan yang lebih gemar investasi modal-teknologi (*Capital Intensive*), pembangunan memang terdesain untuk menyerap tenaga kerja manusia seminimal mungkin. Dengan diahaikannya realita demikian seara otomatik menimbulkan kesan bahwa para pengamat dan birokrasi departemen pendidikan telah mengandung sejumlah kepentingan-politik yang patut dicurigai. Sinyalemen dari kecurigaan itu dapat ditangkap bahwa kendatipun SDM menjadi sorotan dalam PJPT II--istilah para birokrat untuk lima repelita depan--namun anggarn dunia pendidikan justru merosot. Padahal, para ahli justru melihat butuh tambahan dana untuk menggempur elitisme pendidikan. Demikian pula dengan dieliminasikannya problematik *dualisme-ekonomi* tidak mendapat kajian yang selayaknya. Sementara konflik antara eksplosi keluaran pendidikan dengan daya akomodasi dunia ketenagakerjaan yang terumuskan dalam fenomena *pengangguran-terdidik* senantiasa dikembalikan semata-mata pada dunia pendidikan.

■ *Penulis adalah Mahasiswa Fisip UGM Yogyakarta.*

KITA HARUS BERPIKIR MAJU

DIPERSEMBAHKAN OLEH KENTINGAN DALAM RANGKA DIES NATALIS UNS XIX

SEKATEN OH, SEKATEN ....

Pengantar Redaksi :

Setiap tahun, di bulan Maulud menurut kalender Jawa, pihak Kraton Kasunanan Surakarta bersama dengan pemerintah Daerah setempat mengadakan pesta rakyat sekatenan bertempat di seputar alun-alun, kraton dan Masjid Agung. Adanya perkembangan jaman yang mengedepankan rasionalisme dan jiwa pragmatisme, upaya pelestarian tradisi seperti ini patutlah kita hargai.

Dan untuk melihat lebih dekat suasana sekatenan tahun lalu, Kentingan menerjunkan Nanang BS dan Nurul Hidayati Zuhud. Berikut ini laporan hasil perburuan lapangan selama empat hari berturut-turut.

"Mundur"! Ayo, munduuur !!" seorang kerabat kraton yang mengenakan *beskap* hitam lengkap warna hitam berusaha menghalau kerumunan. Beberapa nenek nyaris tertindih oleh massa, meski banyak juga yang masih nekad menuju ke tengah prosesi. Seorang ibu terdengar mengeluhkan kalungnya yang tiba-tiba lenyap pada teman sekampungnya yang juga kehilangan kerudung barunya. Dan seorang gadis muda usia sibuk memasukkan beberapa keping renggitang (jajajan dari ketan yang dikeringkan) hasil jerih payahnya merengkuh *gunungan*.

Itulah sedikit gambaran tentang maraknya puncak budaya tradisional dalam rangka peringatan Maulud Nabi Muhammad SAW di halaman Masjid Agung, sekatenan. Meskipun upacara yang sama dilakukan setiap tahun, antusias pengunjung yang mayoritas berasal dari golongan tradisional di pedesaaan tetaplah tinggi. Apalagi mereka terlanjur memitoskan benda-benda yang ada di empat gunungan itu ber-tuah, yang bisa membawa berkah hidup. Kepercayaan seperti itulah yang membuat sekatenan dengan grebek maulidnya tak pernah surut dari perhatian wong Solo dan sekitarnya.

SEKATEN DALAM SEJARAH

Menurut sejarah, sekatenan pertama kali diadakan pada tahun 1478 oleh Raden Patah dari Kerajaaan Islam Demak. Dengan dukungan sembilan orang sunan (Walisongo), putra Raja Brawijaya V dengan putri dari Champa (Thailand sekarang) itu

Gapura Masjid Agung dengan spanduk komersilnya !

bertekad menyebarluaskan dakwah Islam ke semua wilayah kekuasaannya yang berhasil menggeser dominansi Majapahit yang menganut paham politeisme.

Upaya yang dilakukan oleh Raden Patah adalah dengan membuat dua perangkat gamelan yang istemewa. Biasanya, gamelan digunakan untuk mengiringi tari-tarian sebagai hiburan para pejabat kerajaan. Tapi alat musik itu atas usul para sunan hanya diperuntukkan mengalunkan gending-gending yang berisikan dakwah Islamiah. Pada jaman itu gending gamelan merupakan hiburan yang paling disukai, mungkin mirip konser Michael Jackson di abad ini.

Ketika peringatan hari kelahiran Nabi Muhammad tiba, gamelan yang diletakkan di serambi masjid pun ditabuhlah. Hadir pula saat itu para pemegang kekuasaan di semua wilayah yang berada di bawah panji-panji Demak lengkap dengan kereta-kereta kencana dan pasukannya yang membuat suasana di seputar kerajaan, masjid dan alun-alun menjadi gegap gempita. Apalagi masyarakat pun berdatangan, meskipun hanya bisa m enyaksikan dari kejauhan .

Bunyi tabuhan gamelan begitu memukau, sehingga masyarakat berusaha mendekati masjid yang tertutup gerbang kuat. Setelah menunggu seharian, berebutanlah mereka untuk masuk masjid. Untuk bisa mendekati gamelan, mereka melewati sebuah gapura (bahasa Arab, *ghaffura* : yang memaafkan). Di gapura itu tertulis dua kalimat *syahadatain* (kalimat yang dibaca bila seseorang masuk agama Islam). Konon, tiap orang yang melewati gapura tersebut diwajibkan mengucapkan kalimat itu sebelum dipersilakan masuk.

Menurut versi yang lain, masyarakat mengucapkan syahadat setelah dipersilakan masuk dan mendapat penjelasan tentang gamelan istemewa itu dan penjelasan tentang agama Islam. Jadi, masyarakat masuk Islam tanpa pemaksaaan. Dan karena gamelan tersebut hanya memperdengarkan gending-gending syahadatain, maka disebut *gamelan syahadatain*. Lalu berubah menjadi gamelan sekaten, untuk mempermudah ucapan.

Judi, muncul seiring perjalanan waktu.

SURGA PARA PEDAGANG

Pesta tradisional itu terus saja berlanjut hingga saat ini. Pada tahun 1994 lalu, sekatenan terbagi menjadi tiga event, yaitu keramaian perayaan sekaten, perayaan tradisional sekaten dan festival kraton.

Salah satu hal yang menyebabkan sekaten meriah adalah para pedagang. Mereka sebagian besar berasal dari luar kota Solo dan sudah menggelar dagangannya sejak hari pertama. Dagangan tradisional macam gerabah, pecut (cambuk), sampai headphone, menjadi komoditi bisnis mereka. Dan semuanya cukup optimis bahwa apa yang mereka jual akan mendapat simpati para pengunjung, tua atau muda.

Nyonya Komariah, misalnya. Wanita penjual gerabah dan boneka plastik asli Jepara ini setiap hari selama sekaten mampu mendapat penghasilan kotor sampai 90 ribu rupiah. Jumlah yang sama juga diraih oleh Bambang dan Surono, penjual gerabah dari Madiun dan Bantul .

Jenang alot pun mampu bersaing dengan pizza. Trisusilo, asal Wates, sehari bisa mengantongi uang 100 ribuan rupiah hasil berjualan makanan tradisional yang terbuat dari tepung beras, gula merah, dan irisan kelapa itu. Sedang Edi dan Ali, pedagang pecut dari Klaten, rata-rata mengumpulkan uang 60 ribu per hari.

Pengusaha hiburan pun mendapat rejeki *nomplok*. Supardi, pimpinan Wayang Wong Sriwedari yang dipercaya mengelola kereta kelinci oleh Dinas Pariwisata Surakarta, bisa meraup pemasukan minimal 250 ribu. Bahkan penyanyi dangdut senior pun selama manggung di sekatenan, bisa pulang kampung dengan membawa uang 800 ribu rupiah ! (Lihat boks) Jumlah yang besa tentunya.

Pengemis pun berusaha mengais rejeki di pesta rakyat ini. Seorang wanita tua yang terpuruk di halaman masjid Agung, yang secara khusus datang dari Sukoharjo, mengaku mendapat sedekah sekitar 50 ribu sehari. Sedang Lasmini, pengamen, mengantongi minimal 8 ribu rupiah.

MITOS dan MASA DEPAN

Sekatenan pada dasarnya mengandung unsur-unsur dakwah Isla-

miah yang kental. Akan tetapi dalam perjalanan sejarahnya tak lepas dari pengaruh budaya tradisional Jawa serta ajaran Budha dan Hindu yang semula telah melekat dalam kehidupan masyarakat Jawa. Kepercayaan membeli kinang, misalnya. Islam tak mengkultuskan ssesuatu benda. Akan tetapi dengan adanya sekatenan, membeli kinang dipercayai bakal membuat mereka awet muda sebagaimana pecut yang diyakini mampu meningkatkan hasil panen mereka. Yang rasional, mereka membeli

Lasmini, yang mengisi sekaten dengan amenannya.

celengan gerabah supaya kekayaan mereka bertambah.

Berbagai klenik memang tak bisa lepas dari setiap upacara tradisional. Ketika puncak sekatena dilangsungkan, keluarnya dua gunungan kembar yang melukiskan dua sejoli pria dan wanita, masyarakat yang sejak pagi-pagi *ngetem* di luar pagar Masjid Agung, dengan bersemangat berusaha menggerebek *hajat dalem* kraton tersebut. Berbagai jajanan lokal seperti rengginang, hiasan dari kulit pisang kering, teluir rebus, kacang panjang, sawo, tomat, dan buah-buhaan lainnya membuat khalayak histeris. Mereka yakin, dengan *ngalab berkah* (mencari keberkahan) seperti itu akan menambah peruntungan mereka, seperti kekayaan, kesehatan, panjang umur, dan sebagainya. Seperti yang dituturkan Nyonya Turino, yang datang bersama rombongannya dari Tawangmangu, "Pada jaman dahulu *ngalab berkah* benar-benar mujarab seperti yang mereka percayai selama ini".

Mitos-mitos diatas sepertinya berusaha mengusik kemurnian makna sekatenan yang berintikan pada dakwah atau penyebaran ajaran agama Islam. Penyelewengan maksud dan tujuan perayaan lambat laun bahkan bisa menurunkan hakekat sekatenan, atau malah menjadikannya sebagai ajang mengembangkan kepercayaan irasional atau menjadikannya hiburan gratis belaka.

Apalagi para kawula muda pun tak terlalu tertarik untuk memahami kedalaman makna sekatenan, dan hanya ikut larut dalam lautan manusia begitu *gerebekan* dilangsungkan.

Menurut Suyitno, 24 tahun, "Setahu saya, sekatenan adalah untuk memperingati Nuzulul Qur'an (turunnya kitab suci Al Qur'an)". Sedang Iis, 17 tahun, mengaku sama sekali tak tahu tujuan sekatenan. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Yanti, siswi SMP Kasatriyan, "Kami memilih shopping ke Beteng Plasa daripada ke sekatenan bila saja mempunyai uang banyak". Yang parah Eko, anak muda yang tinggal di kawasan Timuran, bahkan menganggap sekatenan sebagai pasar malam biasa saja.

Inti sekatenan menurut pejabat di masjid Agung adalah mendengarkan lantunan *gending syahadatain* (gending sekaten), diteruskan dengan penerangan keagamaan yang dipusatkan di Masjid Agung. Sayangnya, hal yang berbau ritual tersebut tak laku lagi di jaman ini, karena para muda lebih memberatkan dimensi hedonismenya daripada dimensi religiusnya.

Rasanya apa yang dicemaskan Drs. Marno D, Ketua DPRD Kotamadya Surakarta, menjadi kenyataan. Menurutnya, "Generasi muda sekarang cenderung menggunakan sekaten sebagai saran untuk *ngrabekne sikut* (mengawinkan sikut) dengan saling berdesakan di tengah massa, atau malah gontokan (berkelahi) dengan pengunjung yang lain. Rasanya, sosialisasi sekatenan dengan memperjelas makna yang sebenarnya perlulah terus digalakkan".

Masa depan sekatenan bisa jadi harus ditanggung oleh para intelektual muda. Seperti Umi, mahasiswi IIM (Institut Islam Mambaul Ulum), yang ketika ditanya Kentingan dengan lancarnya menjelaskan apa dan bagaimana sekatenan itu. Akan tetapi, seberapa persenkah anak muda yang mempunyai pengetahuan , minimal sebagai bekal untuk menguri-uri kebudayaan, seperti Umi ? Apalagi gencarnya modernisasi yang membuat pusat pembelanjaan yang dingin, nyaman, lengkap, dan berinterior wah, juga bioskop-bioskop *twenty one*, diskotek, dan karaoke, juga taman-taman ria mutakhir, yang lambat laun akan memperburuk masa depan sekatenan ? Akankah generasi mendatang juga akan sependapat dengan Eko yang menganggap bahwa sekatenan hanyalah pasar malam biasa saja, tempat mencari hiburan dan kesenangan , ? Sungguh ironis. (nhz/yan)

GOYANG DANGDUT di *SEKATENAN*

Tahukah Anda berapa penghasilan seorang penyanyi dangdut yang *ngepos* di alun-alun *pas* sekatenan ? Delapan ratus ribu rupiah ! Dan itupun mereka dapat hanya selama 20 hari kerja.

Penghasilan sebanyak itu didapat oleh beberapa penyanyi dangdut dengan jam terbang 4 - 5 tahun di grup dangdut Berkah Ria dan Puspita Nada yang berhasil ditemui *Kentingan*.

Pentas dangdut, tahun ini lebih sopan.

"Kami paling senang kalau ada pesta rakyat seperti ini. Sebab penghasilan kami lebih besar dibanding acara *tanggapan* lainnya," kata Dewi Puspita, asal Kroya.

Setiap penyanyi rata-rata menyanyi selama 8 ronde per hari. Satu ronde ada lima lagu yang dinyanyikan oleh lima penyanyi secara bergiliran. Setelah satu ronde selesai, grup *ngetem* sekitar 15 menit untuk menanti rombongan penonton berikutnya. Demikian seterusnya mulai jam 10 pagi sampai 11 malam.

Lalu bagaimana dengan kostum artis dangdut yang banyak disorot oleh masyarakat dan pemerintah, sampai-sampai dangdutan di sekatenan Yogyakarta dilarang pentas ?

"Kita berpakaian seperti ini 'kan buat cari penggemar," cetus Ayu Sagita, penyanyi berkah Ria asal Jombang. "Itu juga kemauan penggemar, kok," sambung Yanti yang sering mendapat *job show*, asli Semarang.

Pendapat senada juga disampaikan penyanyi Puspita nada. "Namanya saja dangdut, kalau panjang-panjang 'kan kayak artis (terkenal-Red). padahal kita 'kan beginian (artis lokal-Red)," tandas Dewi Puspita yang sedang menunggu kelahiran anak keempat. Dewi tahun lalu kena cekal di dangdut sekatenan Yogyakarta karena pakaiannya dinilai seronok.

"Baju panjang agak kurang sedap dipandang, sebab penonton suka yang mini-mini. *Rada grengsenglah !*" timpal Tatik Sagita, 24, yang menjadi ratu goyang Puspita nada.

"Mini juga *seneng*, tinggal penontonnya suka yang *gemuni*. Ciri khas dangdut 'kan mini, kalau keroncong ya *jarikan* (berkain panjang - red)," ujar Arik Subagya yang tinggal di Kleco, Solo.

"Apa *nggak risih ?*," tanya Kentingan.

"*Nggak tuh !* Udah terbiasa !" jawab Ndari, gadis Ngawi kelahiran '73 sambil tertawa.

"Itu memang sudah resiko. Makanya ketika saya menerima penyanyi baru, saya selalu menantang apakah kau siap kena gossip atau tidak," ungkap Soni "Cemplang" Sartono, pimpinan band Berkah Ria.

"*Lagian* penyanyi disini kebanyakan adalah ibu-ibu. Ada yang sudah punya anak empat, tiga, dan ada yang hendak kawin segala," sambung pria berumur 40 tahunan yang beranak tiga ini.

Itulah sedikit gambaran dunia dangdut yang setiap tahunnya hadir di tengah alun-alun dalam pesta sekatenan. Kehadiran dangdut pada memang kerap menghadirkan polemik di masyarakat karena goyang dan dandanannya yang seronok dianggap dapat menodai makna religius Sekaten. Sekarang, tetapkah kita mempersepsikannya sebagai tontonan murahan dan mengibakan ? (nhz)

Pembangunan Politik dan Politik Pembangunan

Judul	:	POLITIK, BIROKRASI dan PEMBANGUNAN
Penulis	:	Dr. Mohtar Mas'oed
Penerbit	:	Pustaka Pelajar Yogyakarta
Tahun	:	Agustus 1994
Tebal	:	185 halaman

Beberapa tahun terakhir ini banyak beredar buku-buku yang merupakan kumpulan karangan penulisnya beberapa waktu sebelumnya. Demikian pula halnya buku "Politik, Birokrasi dan Pembangunan" ini yang merupakan kumpulan makalah yang ditulis untuk berbagai keperluan seminar, ruang kelas dan sebagainya semenjak tahun 1991. Hal ini boleh dikata sebagai suatu ketertinggalan yang cukup ironis dari suatu perjalanan intelektual yang dinamis.

Pada dasarnya tulisan ini mengedepankan persoalan enpowering rakyat sebagai tujuan pokok pembangunan dan tantangan serta dilema yang dihadapinya, sebugai sentral utama, (hal. v).

Untuk itu penulis melakukan pemotretan terhadap Agenda kerja politik pembangunan yang meliputi ; (a) masalah peranan militer, (b) masalah peranan parpol, golongan karya, pemuda dan mahasiswa dalam politik, (c) proses integrasi nasional antara suku bangsa, golongan-golongan minoret dan mayoret dan proses perkembangan pengertian antara golongan-golongan beragama yang berbeda, (d) masalah perbedaan kota-desa dalam politik, (e) masalah hubungan pusat dan daerah, (f) masalah komunikasi politik dan (g) masalah hubungan kita dengan luar negeri.

Dari ketujuh agenda tersebut penulis sangat menyayangkan para ilmuan sosial dan politik Indonesia yang belum banyak memakainya sebagai referensi studi dan penelitiannya.

Lebih lanjut buku ini memaparkan "pertarungan" dalam kebijakan pembangunan yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia yang pada dasarnya mencerminkan dinamika pergulatan pemikiran mengenai pendekatan politik sebagai panglima, ekonomi sebagai panglima atau moral sebagai pembangunan yang berkembang dalam komunitas politik dinegeri ini (hal. 29).

Dalam persoalan birukrasi, buku ini melakukan kritik yang cukup "pedas" yang didasarkn pada agumen bahwa sebagian besar dari kegagalan memahami persoalan birokrasi di dunia ketiga adalah akibat dari terlalu dominannya konsepsi Weberian dalam studi mengenai birokrasi. Berdasar pengalaman Eropa Barat, Weber menggambarkan perkembangan birokrasi yang seiring dengan perkembangan modernisasi masyarakat. Peningkatan monetisasi dan demistifikasi dalam masyarakat, demokratisasi dan modernisasi sosial-ekonomi pada umumnya menimbulkan masalah administratif yang semakin lama semakin banyak dan kompleks. Akibatnya muncullah keharusan dilakukannya pembagian kerja yang jelas dalam masyarakat (hal. 69).

Di satu sisi birokrasi dianggap sebagai kekuatan perubahan revolusioner. Sementara di pihak lain birokrasi sebagai sarana ampuh suatu reaksi yang pada dasarnya menyebabkan sulit mengubah struktur kelembagaan yang sudah ada. Banyak kebiasaan baru secara tetap muncul tanpa campur tangan birokrasi, namun upaya memperkenalkan dengan sengaja inovasi sosial dalam skala besar tergantung pada metode administrasi birokrasi. Dalam hal lain misalnya penyebaran suatu bentuk pemikiran dapat disebar luaskan melalui aparat birokrasi sehingga pemikiran tersebut sampai kepada masyarakat. Penyelidikan empiris terhadap program-program reformasi serta nasibnya, menunjukkan adanya pola hubungan kompleks antara struktur-struktur birokrasi dengan perubahan dalam kebijaksanaan sosial.

Mohtar Mas'oed sadar di banyak negara dunia ketiga kebutuhan akan kesederhanaan dan efisiensi dalam kehidupan politik membuat aturan main demokratis di kesampingkan dan otoriterisme dikedepankan. Pertanyaan yang timbul, apakah yang dipaparkan diatas merupakan satu-satunya cara mengatur perpolitikan di masyarkat dunia ketiga yang sedang membangun ?

Pada akhir buku ini Mohtar mengangkat persoalan politik dan korupsi yang merupakan polemik yang cukup hangat serta mengakibatkan kerugian negara yang cukup be-

sar. Ia melihat bahwa korupsi adalah penyimpangan terhadap standard perilaku (norma-norma hukum) dari kewajiban formal suatu jabatan publik karena kehendak untuk memperoleh keuntungan ekonomis atau status bagi diri sendiri, keluarga dekat atau klik. Korupsi sudah tentu menimbulkan banyak akibat negatif. Misalnya menggagalkan pembangunan, menciptakan ekonomi biaya tinggi, merusak moral bangsa, menimbulkan sinisme terhadap pemerintah dan sebagainya. Tetapi dari segi politik yang paling menarik adalah akibat korupsi terhadap distribusi kekuasaan, terhadap penyelewengan tujuan resmi kebijaksanaan pemerintah, dan terhadap sifat dan komposisi elit politik (hal. 169).

Penyebabnya adalah faktor kultural; adanya tradisi pemberian hadiah dan sangat pentingnya ikatan keluarga dan kesetiaan parokial lainnya, dari faktor strukturalnya adalah; posisi dominan birokrasi pemerintah sebagai sumber utama barang, jasa, lapangan kerja dan sebagai pengatur ekonomi, dan dominasi negara yang mengerdilkan kekuatn lain dalam masyarakat.

Untuk pencegahan tersebut penulis menekankan tentang pembukaan aparat pemerintah bagi penaruh dari kepentingan masyarakat. Dalam hal ini yangmesti diutamakan adalah pengembangan organisasi kemasyarakatan sehingga mampu mempengaruhi proses pembuatan keputusan pemerintah.

Satu kelebihan buku ini adalah dengan menampilkan data-data statistik sebagai penunjang argumen-argumen yang disodorkan. Untuk melengkapi pemahaman buku ini ada baiknya juga melihat "Birokrasi dalam Masyarakat Modern" dari Peter. M. Blau serta "Sistem Politik Indonesia"-nya Arbi sanit, karena terdapat argumentasi yang saling menunjang dan melengkapi satu dengan yang lainnya.

BENNY RIDWAN
Pengurus Lembaga Pers Mahasiswa Islam (LAPMI) HMI Cab. Surakarta
Mahasiswa IAIN Walisongo Surakarta

Mencermati Ideologi Teks Sastra

Judul	:	Wacana Sastra Dan Ideologi. Pengantar Faruk.
Penulis	:	Kris Budiman,
Penerbit	:	Pustaka Pelajar, Yogyakarta
Tahun	:	1994
Halaman	:	xvii + 79 halaman

Teks sastra agaknya nikmat untuk dicermati. Di satu sisi ada dimensi estetika yang dapat dipetik. Dan di sisi yang lain seolah mengajak para penikmatnya untuk melakukan rekaan tafsir terhadap ide yang menyembul dari teks sastra.

Buku ini seolah ingin mengajak pembaca melihat sisi kritis dari ruang-ruang sastra. Bukan sastra sebagai sebuah karya estetis yang dapat memberi nuansa. Akan tetapi, lebih bertitik pangkal pada rekaan sastra dari kacamata kebakuan konseptual yang sudah diasumsikan oleh banyak pemikir sastra. Semacam Levi Strauss dalam kajian struktur spasial dan temporal. Asumsi Turner tentang liminalitas, Fowler dari sudut pandang ideologis, struktur kantial Greimas dan tesis sosiologis sastra yang diadaptasikan dalam gaya teatrikal menurut pandangan Geeertz dan Gurwitch.

***

Dimensi linguistik tanpa sadar telah mengacaubalaukan sekaligus memperkaya berbagai bidang ilmu. Ini harus diakui. Bahwa dalam teks bahasa verbal, ketidaktahuan akhirnya terbongkar. Memang, asumsi ini telah terabsahkan. Namun, jika kita melirik ke dalam ilmu sastra, justru ilmu inilah yang paling diperkaya. Alasannya, segala kebakuan bukan menjadi satu-satunya alternatif berpikir. Akan tetapi, ada ruang-ruang khusus bagi individu untuk melakukan tafsir subyektif.

Realitas ini muncul akibat dimensi absurditas dari ilmu sastra. Mungkin pula lebih kompleks. Sebab, sebuah fenomena yang dibahasakan melalui sastra, bukan sekadar etalase, hiasan dengan definisi yang mutlak. Yang lebih penting adalah, fenomena tersebut telah terbingkai. Nuansa estetika telah memberi pengkayaan makna yang membingkai.

Untuk lebih jelasnya, tengoklah karya Umar Khayam dalam Sri Sumarah, Blues Untuk Bonnie-nya Rendra, sajak-sajak Sapardi Joko Damono dalam Perahu Kertas, Mata Pisau, Dukamu Abadi.

Memang karya satra dari ketiga sastrawan tersebut yang menjadi bahan kajian buku ini. Setiap karya sastra lokal, memiliki kesamaan dalam membahasakan ide. Yakni berada dalam satu kerangka linguistik. Yang secara kontekstual mampu dipahami oleh para pembacanya. Yang menjadi persoalannya adalah, sejauh mana sebuah teks sastra tidak hanya mampu mewadahi sebuah pesan dalam pem-

bahasan yang transparan. Melainkan, lebih memberi ruang penafsiran nan subyektif dari para khalayaknya.

Yang jelas bukan unsur kebakuan. Perspektif resepsi estetis dan kritis ternyata mutlak bagi sebuah teks sastra. Dalam Sri Sumarah, misalnya. Problem yang dikedepankan memang kontekstual sekali. Yakni soal determinasi. Determinasi yang seolah sudah tersosialisasi menjadi sebuah wacana. Akan tetapi, jalinan komunikasi ide boleh-boleh saja dikedepankan dalam tuangan teks yang metaforis ataupun abstrak. Dan bahkan sah, seandainya ke luar dari batas pemahaman logika sekalipun.

Selain itu, Kris juga tidak mengelak pada asumsi bah-wa karya sastra yang lahir, tidak lepas dari background kreatornya. Entah nantinya punya tendensi sebagai teks religius sastra, sastra yang provokatif, sastra yang ingin bermain-main de-ngan daya imajiner dan lainnya. Takaran yang dipakai oleh Kris di sini, lebih longgar. Dalam arti, ada peluang untuk memperkaya struktur baku dalam teks sastra secara konseptual.

Jadi, latar belakang seorang sastrawan sedikit banyak akan memberi muansa tematis. Seminar perspektif dikotomis soal Tuhan dan manusia, desa-kota, masyarakat-ko-munitas, agama-religi dan lainnya. Konflik yang tertuang dalam teks sastra, sedikit banyak dari teks mana tema tersebut direkonstruksi.

***

Dalam pengantarnya, Faruk mencoba memberi sedikit "gugatan"terhadap buku ini. Buku ini memang lahir dari obrolan di kantin. Dari kegiatan bercakap-cakap, adu argumen pada gilirannya memecah ide dasar dari teks buku ini. Oleh Faruk diungkapkan, banyak suara masuk dan ditumpahkan begitu saja, terpecah-pecah.

Lebih kritis lagi Faruk mengkritik, bahwa pengarang kurang mampu memusatkan perhatiannya hanya pada laki-laki dan perempuan sebab datanya tidak ada, yang mendefinisikan keperempuannya Sri Sumarah justru perempuan sendiri, Mbah-nya (xv). Sebab, Kris mengambil karya Kayam sebagai telaah dalam buku ini.

Kecuali berbicara masalah ideologi karya sastra, pe-ngarang juga ingin membuka cakrawala baru, soal telaah sosiologis dari teks teater di akhir buku ini. Gejala yang dapat terdeteksi bahwa teks teater juga tak lepas dari background para penggagasnya. Kontekstualitas tematik dalam pembahasan teater mengalir cair di setiap gelar teater.

Tak pelak lagi, ternyata teks sastra acapkali menyimpan dimensi ideologis yang terabaikan. Ideologi memang merupakan ide-ide yang mendapatkan apologi atau tindak pengabsahan. Namun, dalam teksnya yang absurditas, karya sastra seakan ingin mensahkan muatan ideologis para kreatornya.

Tonny Trimarsanto
Mahasiswa Komunikasi Massa '89
FISIP UNS

"Waktu saya baru datang di Jakarta, ya warteg (warung Tegal) itulah tempat yang paling cocok buat masalah perut". Ungkap Putu Wijaya, melatarbelakangi mengapa ia menggarap sinetron Warteg bekerjasama dengan salah satu TV swasta.

"Di warteg itulah berkumpul berbagai kalangan, dari masyarakat bawah hingga atas. Baik mahasiswa, buruh, karyawan atau pejabat, mereka berinteraksi di sana. Diskusi, *ngobrol*, tukar pikir, *nggosip* dan lainnya jadi satu".

"Namun sekarng pengusaha Warteg ini bukan hanya orang Tegal saja tetapi orang diluar Tegal pun banyak yang mendirikan Warteg." tambahnya.

Sinetron yang diproduksi oleh rumah produksi miliknya, Santos Audio Visual, rencana akan digarap dalam 52 episode. Mengangkat seluk beluk tentang Warteg yang tersebar di Jakarta dan sekitarnya.

PUTU WIJAYA

Pria lulusan UGM Fakultas Hukum tahun '69 yang hobby makan dan mendengarkan musik ini memang orang yang sangat berpotensi baik sebagai penulis cerita/skenario, sutradara, budayawan dan sastrawan bahkan sekarang menerjuni dunia sinetron. Namun sayangnya menurut Putu, SDM kita masih rendah untuk membuat sinetron yang profesional.

Jadi buat teman-teman yang ingin bergabung dengan Mas Putu silahkan kontak ke Jl. Mimosa I/1 Sunter Mas Jakarta 14350, siapa tahu diterima jadi pemain sinetron (walau cuma figuran). (Ali)

IDA PARWATI

Salah satu permasalahan yang dihadapi kota adalah banyaknya kaum urban yang membanjiri kota dari daerah. Seperti kota Jakarta yang selalu bertambah masyarakat urbannya. Namun itu tidak menjadi masalah manakala mereka telah siap dengan bekal ketrampilan.

Seperti salah satu urban yang ditemui *Ken-tingan* yaitu Ida Parwati, salah seorang reporter dan pembaca berita di RCTI (Rajawali Citra Televisi Indonesia).

"Buktinya kita diperlukan disini " jelasnya.

"Yang penting kita datang ke Jakarta dengan berbekal ketrampilan. Jangan asal pindah saja mengadu nasib", tambah Ibu tiga putra tersebut.

Ida Parwati yang menamatkan pendidikannya pada Fakultas Ekonomi UNDIP tahun '86 selain menjadi reporter juga menjabat Redaktur Ekonomi, sesuai dengan keahliannya.

Pengalaman yang menyenangkan tentunya bila telah usai melaksanakan tugas, seperti mewawancarai seorang atau membacakan naskah berita. Menurutnya dalam kerja tim tersebut harus ada kekompakkan satu sama lain. Jangan sampai salah satu dari tim merasa lebih dari yang lain. Pengalaman yang tidak enak bila salah dalam membacakan naskah.

Ketika ditanya alamatnya, "Tulis saja ke RCTI". *Wah*, rupanya takut bila nanti banyak fans yang datang kerumahnya. (Ali).

Kalaulah mahasiswa UNS mengorganisir protes program lima hari kerja, mungkin Bu Broto, pemilik warung samping gedung percetakan UNS, tak akan ikut-ikutan.

Lho ? Bukankah keuntungannya bakal berkurang dengan adanya libur dua hari seminggu itu?

"Program lima hari kerja tak berpengaruh pada keuntungan warung kami, " kata Bu Broto didampingi suaminya purnawirawan Peltu yang masih gagah di usianya yang ke-75 tahun itu.

Memang, warung yang beraktifitas sejak jam lima pagi sampai dua belas siang itu berprospek cerah di kampus UNS. Menghabiskan beras rata-rata 30 kilogram per hari, bisa dimaklumi bila libur di hari Sabtu tak terlalu mempengaruhi omzet warung Bu Broto.

Ketika ditanya *Kentingan* tentang ulah para mahasiswa, wanita karier yang memperkerjakan 9 karyawan dengan pendapatan kotor 75 ribu sehari dan membayar pajak pada Dharma Wanita UNS 25 ribu tiap bulannya itu menjawab, "Oh, mereka baik-baik, Mbak. Nggak ada yang *ngutang*," demikian ujar nenek lima cucu yang berdiam di Perumnas Mojosongo tersebut.

Memang, mahasiswa UNS yang elitis, mana ada yang mau *ngutang*, ya ?! (**nhz**)

Bu BROTO

YB. MANGUNWIJAYA

Kalau Anda bertemu dengan YB. Mangunwijaya, arsitek, rohaniawan dan budayawan dari Yogyakarta, jangan singgung tentang Orde Baru atau Orde Lama sebagai terminologi perpolitikan negeri ini.

Ketika mengemukakan pandangannya tentang CBSA (Cara Belajar Siswa Aktif) yang dinilai banyak pengamat mengalami kegagalan dalam pelaksanaannya ia hanya berujar, "Sistem CBSA itu baik. Namun tidak akan berhasil karena sistem ini tidak akan cocok dengan sistem politik yang diterapkan ORDE SEKARANG INI."

"Saya tidak ingin menyebut orde baru, tapi OSI (Orde Sekarang Ini)," tambah Romo Mangun, panggilan akrabnya, yang disambut tawa sekaligus penasaran.

Apa pasalnya penulis novel Burung-burung Manyar ini enggan menyebut Orde Baru yang sudah menjadi satu kosa kata baru dalam perbendaharaan bahasa kita?

Alasan Romo Mangun, mengutip pendapat arkeolog dan antropolog, bangsa Indonesia sudah berumur 2 juta tahun dan diperkirakan bangsa ini masih mampu bertahan hidup sampai 4 milyar tahun lagi.

"Jadi *khan* belum orde final, masih panjang waktu ke depan. Lagian saya lebih suka menyebut demikian, OSI," jelasnya. (**Hen/AidN**)

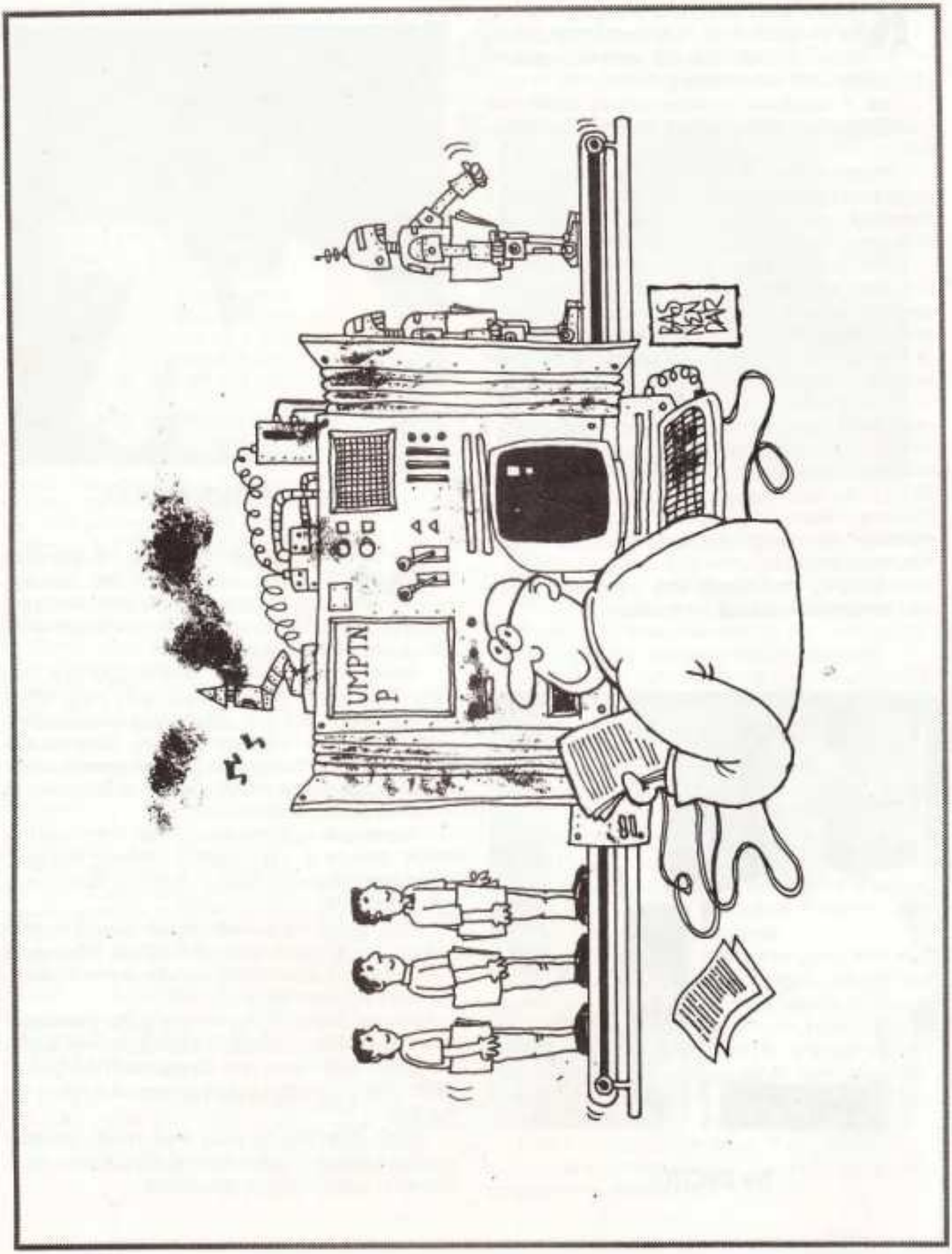
UMPTN
P
80

HARI SABTU, HARI BUDAYA

Lima hari kerja telah dicanangkan pemerintah, dan perguruan tinggi telah melaksanakan ketentuan tersebut. Tidak mudah bagi insan perguruan tinggi untuk menjalani pekerjaan dari jam tujuh tiga puluh pagi sampai jam empat sore, karena perubahan jam kerja adalah juga berubahnya ritme kehidupan. Dari kebiasaan makan siang di rumah, tidur siang, ngantor di tempat lain, bekerja di sawah, *kulakan* dagangan, kini semua itu tidak dapat dilaksanakan lagi. Kondisi semacam ini dapat menimbulkan penyakit-pe-nyakit dan kerawanan-kerawanan.

Penyakit yang muncul adalah rasa malas, rasa lelah, kurang bersemangat karena kehilangan "kebiasaan atau bah-kan pekerjaan." Kerawanan-kerawanan di keluarga karena tersedianya waktu di rumah menjadi lebih sedikit.

Untuk merubah semua itu menjadi kebiasaan, mengatasi penyakit yang mungkin muncul, dan kerawanan-kerawanan lain, seseorang memerlukan waktu dan kiat-kiat khusus dan orientasi.

Secara bersama-sama insan universitas harus melawan segala kendala. Tidak saja datang dari anggota masyarakat perguruan tinggi, tetapi juga dari pemimpinnya. Artinya, untuk mengoptimalkan potensi sumber daya manusia, diperlukan tidak saja pengertian dari karyawan dan segenap civitas akademika, tetapi juga *good will* dari pimpinan untuk memahami kondisi yang ada, seperti penyediaan fasilitas yang mendukung untuk kerja sampai sore. Terutama fasilitas ruangan yang ber-AC.

Selanjutnya, hari Sabtu yang biasanya untuk bekerja, kini menjadi hari libur. Mengisi hari libur tersebut juga memerlukan kegiatan tambahan. Hari libur tanpa suatu kegiatan dapat menyebabkan orang frustasi. Bagi mahasiswa libur panjang dalam beberapa hal menguntungkan, misalnya dapat pulang kampung lebih lama, punya waktu untuk berpacaran dll. Bagi dosen, karyawan bisa punya banyak waktu luang untuk keluarga dan mungkin mencari obyekan, tetapi waktu satu hari sangat terbatas.

Kemauan bekerja

Kebijakan lima hari kerja tidak lain adalah untuk mengoptimalkan sumber daya manusia mencapai hasil kerja yang maksimal. Mulai terasa, pengunduran waktu sampai sore hari memberikan nilai tambah, seperti cukup tersedianya waktu untuk melakukan pertemuan, melaksanakan pekerjaan yang memerlukan waktu panjang, sehingga proses pekerjaan yang biasanya tertunda dua hari menjadi cukup satu hari saja. Inilah yang disebut efisiensi. Surat-surat yang diproses dua-tiga hari dapat selesai dalam sehari, atau yang biasanya seminggu lebih cepat menjadi dua hari selesai. Semua efisiensi tersebut hanya dapat terlaksana berkat motivasi atau kemauan bekerja dari para insan perguruan tinggi, sebagai pendukung berlangsungnya kegiatan universitas. Dengan kata lain, bahwa proses kemajuan perguruan tinggi tidak dapat berjalan dengan baik tanpa sebuah birokrasi yang sehat dengan para pendukung yang punya dedikasi terhadap masalah pengembangan universitas. Jika hal itu tidak dilakukan maka program kerja lima hari kerja akan sia-sia belaka.

Fasilitas Pendukung

Berhasilnya perguruan tinggi mengoptimalkan hasil kerja, ditentukan tidak saja oleh kemauan bekerja para insan perguruan tinggi, tetapi juga adanya fasilitas pendukung. Fasilitas yang perlu direalisasikan itu antara lain:

a. Ruangan yang ber-AC

Ruangan ber-AC adalah mutlak diperlukan untuk menunjang keberhasilan kerja. Baik ruangan kantor, ruang kuliah maupun perpustakaan. Hal ini mengingat kondisi musim di Indonesia yang demikian panas dan melelahkan. Sehingga, yang ber-AC tidak pada ruangan pejabat saja, tetapi ruang karyawan dan ruang proses belajar mengajar adalah sangat penting. Dapat dibayangkan bahwa kondisi ruangan yang panas, *sumpek*, sangat tidak nyaman untuk mentransmisi iptek. Karena konsentrasi selalu terganggu dengan *kringet dléwéran* dan belum lagi suara-suara dari luar, baik suara mobil, suara mahasiswa, yang tak mengenal kompromi.

Maka sudah sewajarnya dipikirkan mulai sekarang, bahwa pembangunan fisik perguruan tinggi harus diarahkan pada kualitasnya dan bukan dari segi kuantitas saja.

b. Kantin dan Makan-minum Otomatis

Makanan adalah faktor yang menentukan dalam proses pengoptimalan tenaga kerja. Tenaga yang loyo akan menghasilkan pekerjaan yang rendah. Maka dari itu, setiap kantor perlu menyediakan kantin yang representatif untuk para mahasiswa, karyawan dan dosen. Meski selama ini sudah ada tetapi masih didesain sampai jam 10 atau jam 12 saja. Idealnya kantin dibuat untuk kepentingan seluruh insan perguruan tinggi. Misalnya, menyediakan ruangan yang nyaman dengan kapasitas yang memadai, atau katakanlah seperti "Sari Boga" yang menyediakan segala jenis makanan dari berbagai pedagang yang sekarang ada. Selain itu perlu juga menempatkan

box-box makanan kecil dan minuman otomatis, seperti teh, kopi di beberapa sudut, untuk melayani mahasiswa dan karyawan yang sewaktu-waktu memerlukannya, sehingga mereka tidak harus pergi ke kantin.

c. Fasilitas Telepon

Sudah sewajarnya bahwa di kampus-kampus, di fakultas minimal ada sebuah tilpun umum (kartu/koin) untuk memperlancar komunikasi para insan perguruan tinggi. Tersedianya alat tersebut memungkinkan pekerjaan lebih dapat diselesaikan secara cepat. Misalnya, untuk *deal* tanggal ujian mahasiswa, tidak perlu harus datang ke rumah, tetapi cukup lewat telepon saja.

Definisi Hari Budaya

Apa yang disebut hari Budaya? Hari Budaya mengacu pada kreativiatas, kualitas dan pencepatan kemajuan. Artinya, perguruan tinggi sebagai tempat pengembangan ilmu pengetahuan teknologi, sebenarnya tidak mengenal hari libur. Artinya, kerja lima hari diperuntukkan bagi mereka yang membutuhkan, sedang bagi mereka yang berkeinginan mengembangkan kreativitas, meningkatkan kualitas dan demi pencepatan kemajuan, maka di universitas mereka juga perlu disediakan tempat. Konsekuensinya adalah, laboratorium, perpustakaan, fasilitas olah raga, tempat kesenian, tempat diskusi harus tetap terbuka. Dengan pemikiran tersebut, maka dapat dikatakan hari Sabtu dan bahkan minggu selalu terbuka untuk civitas akademika dalam mengembangkan ilmunya.

Implementasi

Setiap manusia mempunyai gaya dan falfasah hidup yang berbeda-beda. Prioritas untuk meningkatkan kualitas hidup, dari waktu ke waktu juga selalu berubah-ubah, ada yang memprioritaskan pada aspek kesehatannya, ada yang memprioritaskan aspek keluarga, ekonomi, kerja sosial dll.

Menilik dari variasinya kebutuhan manusia hidup tersebut, masyarakat perguruan tinggi juga perlu menyediakan tempat yang baik untuk mengembangkan kualitas hidup mereka. Untuk jelasnya, dapat diikuti ilustrasi berikut ini:

Bagi civitas akademika (dosen dan mahasiswa) yang menginginkan kegiatan jatuh pada hari Sabtu, misalnya untuk perkuliahan dosen tamu, untuk kursus bagi pelayanan umum, untuk kegiatan ekstra bagi mahasiswa, kegiatan seminar/diskusi, rapat-rapat yang bersifat khusus, hari tersebut harus terbuka untuk kegiatan itu.

Bagi civitas akademika dan karyawan yang ingin meningkatkan kualitas hidup dengan ber-olah raga, maka hari Sabtu adalah hari yang ideal. Sudah barang tentu fasilitas olah raga di perguruan tinggi juga perlu dibuka. Demikian pula dengan tempat-tempat kesenian seperti Argobudoyo dibuka sebagai hari kreativitas.

Sedangkan bagi mahasiswa yang ingin mempercepat penyelesaian skripsi, tesis, atau tugas laboratoriumnya pada hari Sabtu juga harus disediakan tempat yang memadai. Tentu saja, secara teknis hal ini dapat di atur, misalnya untuk perpustakaan buka jam 9 sampai jam 12 dll.

Sehingga, hari Sabtu suasana perguruan tinggi diliputi oleh suasana dinamis. Di Fak. Sastra ada pameran seni lukis, di FKIP ada pertandingan olah raga, di Argo Budoyo ada pagelaran kesenian, di lembaga penelitian ada diskusi buku, di Fak. Pertanian ada penyuluhan, di Fisip ada diskusi, di laboratorium sedang mengadakan uji-coba nuklir, di perpustakaan pusat mahasiswa sedang mengerjakan skripsi. Inilah yang disebut sebagai hari Budaya, di mana kreativitas insan perguruan tinggi disediakan ladang, demi peningkatan kualitas hidup dan pencepatan kemajuan di segala bidang.

Dari yang disampaikan tersebut, merupakan pemikiran ideal bagi terciptanya perguruan tinggi sebagai pendukung kemajuan bangsa. Penulis yakin bahwa untuk melihat kemajuan suatu bangsa, cukup melihat prestasi perguruan tinggnya. Jika suatu perguruan tinggi atau universitas tidak dapat membuahkan prestasi yang membanggakan maka universitas tersebut boleh dikatakan belum berbudaya.

Andrik Purwasito
Staff Pengajar Jurusan Ilmu Komunikasi
FISIP UNS

TERLUPAKAN

SUDUT SUDUT YANG

Pertama, sebarlah pasukan kuning di seputar kota
Kedua, buatlah slogan-slogan untuk memotivasi

Maka, jadilah !
Tiap pagi, seiring irama hidup mulai ditabuh, serombongan manusia berseragam mencolok berdiri, jongkok, berjalan, mengitari balaikota, keraton, sepanjang jalan protokol, shooping centre, dan tempat-tempat yang dirasa penting lainnya, lengkap dengan sabit, sapu, cikrak dan truk bak sampahnya

Yah..... betapa itu butuh
Dan pusat kota yang bersih,
jargon-jargon yang indah
untuk dicap sebagai ka
lengkap dengan puja-puji dari

Akan tetap
Nyinyiran, cemoohan, dan ejek
sudut-sudut kota yang

Tahukah anda
bagaimana cara
untuk memboyong
Adipura Kencana
dan menjadikan
Solo sebagai
Solo Kuncoro ?

Juga, akronim BERSERI
menghiasi kendaraan abang-
abang beca, tercetak di tembok
rumah-rumah penduduk, berkibar
di pinggiran jalan, pun di tong-tong
sampah di kampung

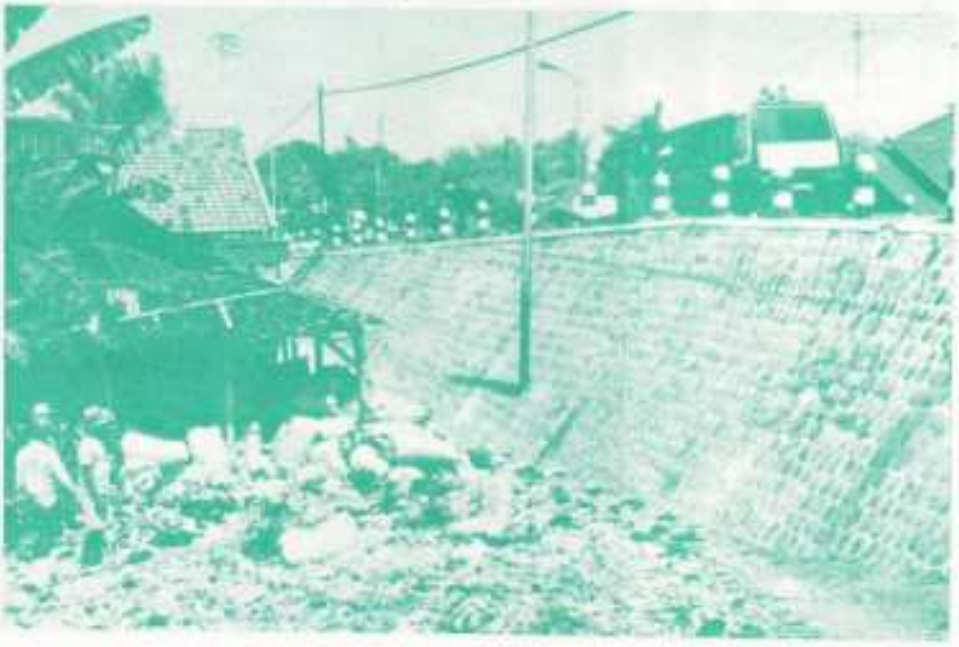

tuh kerja keras & dana besar
ih, dinas kebersihan yang rajin,
dah, telah mewajibkan Solo
kota terbersih se-Jateng
an golongan yang berkepentingan

tapi, sayang,
ejekan justru berkumandang dari
ang bisu dan terlupakan.

yang kian terpuruk
dan suram, sarah wabah
dan menambah kriteria kumuh
bagi penghuni
yang melingkunginya
yang sudah
sangat rendah status sosialnya
.....

Solo Berseri
Solo Kuncoro
Adipura Kencana
Hanyalah untuk pusat kota saja
Dan bukan untuk sudut kota yang kumuh
dan akan terus sengaja dikumuhkan (?)
untuk sebuah Adipura yang .... semu !

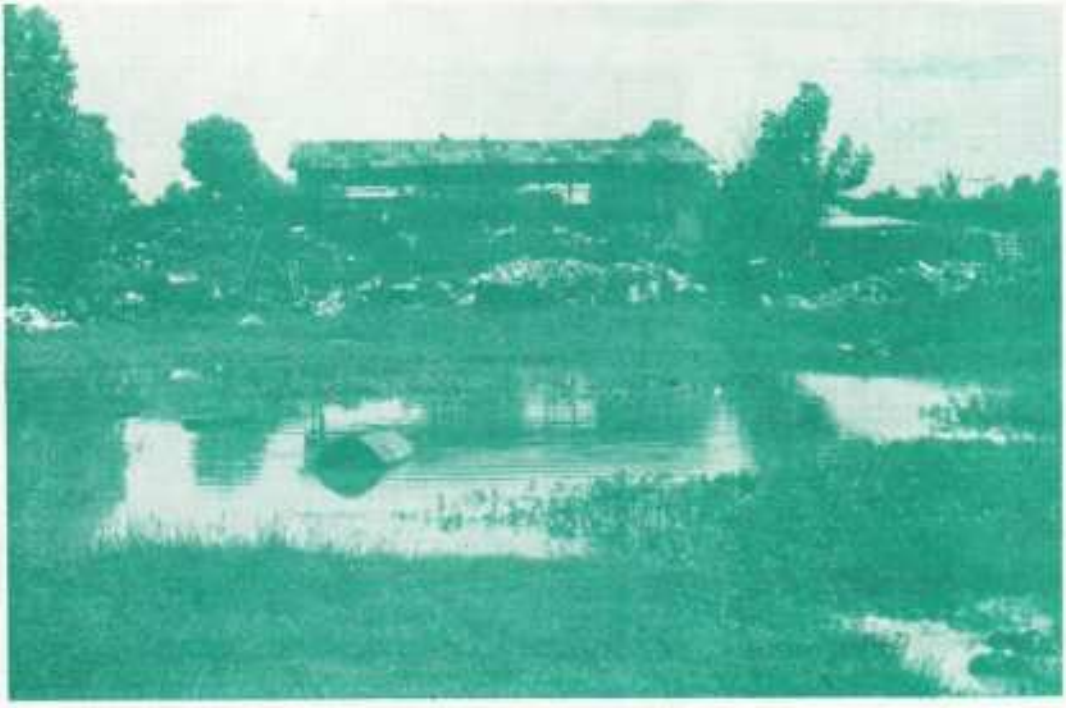

Narasi :
Nurul HZ
Foto :
Budi Nugroho
Intarto

BILA ORNOP DICURIGAI

Kebutuhan sekaligus keinginan untuk membuat rakyat lebih berdaya telah melahirkan organisasi-organisasi tersendiri yang menggarap hal-hal yang luput dari perhatian pemerintah. Pada mulanya mereka menamakan dirinya sebagai ORNOP (Organisasi Non Pemerintah) yang merupakan terjemahan langsung dari Non Goverment Organisation(NGO). Keberadan mereka telah terwujud sejak tahun 1970-an.

Delapan tahun kemudian, Dr. Sariono Mangunpranoto mengusulkan istilah LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) pada pertemuan antar ORNOP yang bergerak di bidang pembangunan pedesaan di Ungaran. Pada waktu itu, dia mengusulkan nama Lembaga Pembinaaan Swadaya Masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat.

Perkembangan LSM makin pesat setelah diberlakukannya NKK/ BKK di kampus. Sehingga pada masa tersebut, banyak akivis kampus yang menyalurkan diri dalam LSM.

Lembaga Swadaya Masyarakat, menurut Kartono Mohamad dalam tulisannya di harian Kompas 13 Nopember 1994, berdiri melalui tiga cara. Yang pertama dengan cara tradisional atau dibentuk oleh masyarakat sendiri. Contohnya adalah Banjar di masyarakat Bali, Rembug Desa di masyarakat Jawa, dan Kerapatan Adat di Masyarakat Minangkabau. LSM jenis ini bersifat paguyuban, tanpa aturan main tertulis, serta sarat dengan semangat musyawarah dan gotong royong.

Yang kedua adalah LSM yang diinisiasi oleh kelompok intelektual di masyarakat. LSM jenis ini yang sudah hadir selama berpuluh tahun adalah Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama (sebelum NU berubah menjadi parpol di tahun 50-an). Dengan makin banyaknya jumlah intelektual di Indonesia sesudah kita merdeka, LSM jenis ini makin banyak dan merupakan kelompok terbesar. Bentuk kelembagaan LSM macam ini sangat bervariasi, ada yang berbentuk yayasan, perkumpulan yang memiliki anggaran dasar tertulis dan sistem keanggotaan, dan ada bentuk paguyuban dari beberapa orang intelektual yang memiliki kepedulian sosial(semacam organisasi tanpa bentuk). Kadang kelompok jenis paguyuban ini terbentuk secara sesaat sebagai reaksi terhadap peristiwa sosial yang terjadi saat itu, dan menyebut diri LSM baru untuk kemudian sesudah itu menghilang tanpa bekas.

Yang ketiga adalah LSM yang dibentuk atas inisiasi pemerintah. PKK dan Dharma Wanita misalnya sekarang ini menggolongkan dirinya sebagai LSM.

Dalam melaksanakan kegiatannya, LSM banyak dibantu pihak asing (bantuan luar negreri). Hal ini menurut Mochtar Mas'oed tidak selalu dilakukan, dan kalangan LSM juga tidak meminta. Ketika ditanyai tentang pengaruhnya secara politis, dia mengatakan tidak selalu. Menurutnya tidak sesederhana itu, bahwa ada kegiatan yang dibiayai pihak asing membuat mereka jadi menurut pihak asing.

Perihal pembiayaan dari luar negeri ini, Mochtar Mas'oed mengatakan alasannya yaitu tidak ada orang Indonesia (yang kaya) yang mau membiayai hal-hal yang tidak menguntungkan seperti itu, tidak banyak.

Pakar politik UGM ini mencontohkan beasiswa Supersemar yang dananya besar sekali dan banyak membantu mahasiswa tetapi sesudah selesai mereka harus memberi imbalan.

"Tradisi seperti itu belum kita punyai, tradisi yang dalam agama Islam disebut Wakaf. Mereka di luar negeri tidak mengerti Qur'an tapi menjalankan badan wakaf yang disebut endomen, seperti Ford yang menyisihkan kekayaannnya untuk membuat yayasan".

Mereka bisa melakukan hal itu karena mereka mendapat keringanan pajak. Niatnya mungkin baik, mungkin tidak, tetapi yang paling penting bahwa dia terdorong untuk membuat yayasan dan yayasan itu membantu orang-orang dunia ketiga supaya bisa sekolah di luar negeri, tapi tidak meminta imbalan.

"Mengapa di luar negeri ada badan wakaf dan disini tidak, apakah orang AS kaya-kaya, belum tentu. Orang Indonesia ada yang sangat kaya dan kayanya dalam sepuluh tahun, sudah punya uang 3 triliun. Apa dia membantu orang miskin? Kan tidak",lanjutnya.

LSM sendiri tidak perlu meminta bantuan asing kalau ada Undang-undang pajak yang mengatakan siapa saja yang membantu LSM akan diberi keringanan pajak. Kalau ada Undang-undang seperti itu, setiap orang kaya akan berlomba-lomba membuat yayasan.

"Hampir semua orang UGM yang pernah keluar negeri dibiayai oleh luar negeri, tapi *what's wrong with that*, apakah lalu kami menjadi anteknya mereka, itu khan tidak selalu", tegasnya serius. "apakah kita bisa menciptakan di dalam negeri, mekanisme yang membuat mereka tidak harus menerima. Kalau pemerintah boleh minta bantuan asing, kenapa rakyat yang non pemerintah tidak boleh", lanjutnya retoris.

Yudo Pramono, aktivis LSM Solo, membenarkan pendapat Mochtar Mas'oed. "Saya kira tentang dana itu nggak apa-apa, nggak ada masalah, karena tidak ada ikatan politis. Antara LSM disini dengan diluar biasanya kegiatan atau kesepakatan proyek saja".

Tentang sumber dana, Yudo mengatakan bahwa ada kerjasama dengan LSM dari luar seperti BORDA (*Borman Overseas Riset Development Assosiation*) Jerman, ada juga kerjasama dengan pemerintah, seperti PLN yang dananya berasal dari World Bank.

Dalam perjalannnnya, LSM telah melalui proses-prose menuju kemantapan sehingga kondisi intern LSM mempunyai kemantapan untuk "menolong" rakyat. Perkembangan LSM, dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Dari segi fungsi, segi orientasi, dan segi kegiatan.

Dari segi fungsi diawali dengan fungsi sebagai "perpanjangan tangan" pemerintah, meningkat menjadi "pelengkap" program pemerintah, kemudian menjadi mitra kerja pemerintah, kemudian menjadi kontrol sosial terhadap tindakan-tindakan yang kurang manusiawi dalam proses pembangunan.

Dari segi orientasi, mula-mula sebagai organisasi yang berbasis pada perpangkalan (misalnya kampung halaman, suku dan sebagainya), kemudian berubah basis kepada kebutuhan yang sama, meningkat menjadi organisasi swadaya, yang membangkan adalah kekuatan rakyat dan lalu menjadi usaha perwujudan organisasi yang demokratis.

Dari segi kegiatan, bermula dari kegiatan karikatif, kegiatan pengembangan masyarakat, lalu kegiatan pengembangan masyarakat, meningkat menjadi kegiatan yang menuju reformasi, terakhir sebagai kegiatan yang menuju pada transformasi.

Dapat kita lihat secara nyata, bahwa LSM telah menjadi sesuatu yang setidaknya meresahkan pemerintah dengan melihat beberapa gejala yang ada. Kita dapat melihat advokasi yang dilakukan LSM-LSM baik sendiri atau bersama dengan pihak lain, dalam kasus tanah misalnya, kita dapat melihat maraknya demo rakyat yang tanahnya diserobot oleh pemerintah, militer, investor dan lain sebagainya.

Kemudian timbullah isu-isu bahwa LSM sering menunggangi aksi mahasiswa. Isu ini dibantah oleh Munief Laredo, Ketua Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi (SMID) Pusat. "Sebetulnya antara aktivis mahasiswa dan LSM, itu ada beberapa LSM yang sejalan dengan gerakan-gerakan aktivis mahasiswa, LSM mungkin hanya sebatas kampanye dalam kasus tanah, perburuhan, demokrasi, sementara aktivis-aktivis mahasiswa banyak bergerak disitu",katanya, lebih lanjut dia mengatakan,"saya kira, banyak antara aktivis mahasiswa dan LSM itu sejalan, cuma kemudian mereka mengatakan bahwa ini(aksi-red) ditunggangi oleh LSM karena aktivis-aktivis LSM lebih tua dari aktivis mahasiswa".

Sementara itu Mochtar Mas'oed menamggapi sinyalemen ini dengan mempertanyakan,"Yang intel menunggangi gerakan mahasiswa, ada tidak, ya sama saja. Siapa yang menunggangi Malari, yang membakar-bakar, merusak, intel-intel *tho*? Kenapa itu tidak diusut?". Itu semua

perang urat saraf", jelasnya.

Ketegangan antara LSM dengan pemerintah akhir-akhir ini semakin tinggi, antara lain dengan peristiwa pembubaran acara-acara yang digelar LSM di beberapa kota seperti Surabaya, Yogyakarta, dan Medan dengan alasan perijinan yang tidak diurus.

Beberapa waktu lalu, Kassospol ABRI mengatakan bahwa ada LSM yang sengaja merongrong pemerintah. Hal ini dikomentari Mochtar Mas'oed dengan mengatakan bahwa banyak pejabat yang merongrong pemerintah juga, pejabat yang korup, tentara-tentara yang melakukan pemberontakan, hal itu apa tidak merongrong pemerintah! Apakah rakyat

yang terus salah? Kalau Kassospol bilang begitu, ya itu tugas Kassospol untuk mencurigai orang. Lihat konteks semuanya ini, rakyat salah katanya merongrong, tapi ketika pemerintah merongrong rakyat, siapa yang mengatakan merongrong. Itu semua konsumsi politik untuk para elitis, untuk mengatakan bahwa kita benar mereka salah, dan itu akan terus selalu dikatakan. Siapa saja di Indonesia, ya pemerintah, rakyat, LSM, partai berhak untuk kebaikan bersama.

Sedangkan Yudo berpendapat bahwa pernyataan itu tidak benar. LSM semestinya sebagai kekuatan yang harus disyukuri, karena sebagai kekuatan mandiri dan membangun yang muncul dari *civil society*, dari masyarakat yang konsen terhadap masyarakat. Tapi sering dipandang dari segi stereotipnya saja, sisi negatifnya, dan itu tidak benar. Justru sisi lain sangat menguntungkan pemerintah. Dan sekarang banyak jargon-jargon ataupun apa yang semula dikerjakan LSM, banyak diakomodir oleh pemerintah. Misalnya isu-isu kemiskinan, kerakyatan. Itu artinya LSM merupakan sebuah kekuatan yang bagaimanapun harus dipandang positif.

Hal senada diungkapkan Munief, yang mengatakan bahwa sebenarnya LSM dan gerakan mahasiswa itu akan menyelamatkan negara dan bangsa. Karena apa yang dilaksanakan Orde Baru telah melenceng dari rel yang pernah digariskan lewat Undang-undang Dasar 1945 dan Pancasila. "Kalau mengatakan seperti itu, itu adalah pemutar balikan fakta",tegasnya,"karena isu-isu yang diangkat(oleh LSM-red) adalah permasalahan-permaslahan pokok, masyarakat Indonesia. Misalnya tentang kasus-kasus tanah, upah buruh, tentang peran militer yang terlampau besar yaitu dengan *security approach*, itu saya kira hal-hal yang mendasar dalam hak- hak asasi manusia".

Kalau Kassospol mengatakan seperti itu, kita harus mempertanyakan kenapa Kassospol atau ABRI berkata seperti itu. Berarti mereka merasa dirinya terancam, karena militer sangat punya kepentingan di Indonesia. Di negara manapun, memang militer tidak menyukai demokrasi karena mereka manjalankan fasisme. Ketika kedudukan mereka terancam, mereka gunakan termterm seperti ekstrem kri, ekstrem kanan dan cara-cara lain.

Dan ternyata bukan Kassospol saja yang khawatir, tetapi juga Presiden, yaitu dengan akan diberlakukannya Keppres tentang LSM. Menanggapi hal ini Yudo mengatakan,"Banyak lontaran- lontaran dari LSM untuk menolak Keppres itu. Karena itu merupakan campur tangan yang terlalu jauh ke rumah tangga LSM, dan saya kira, sudah beberapa forum yang melibatkan komunitas LSM untuk menolak Keppres itu".

Sementara itu Munief mengatakan,"Itu merupakan agenda dari pemerintah yang memang akan membekukan LSM dan organisasi mahasiswa dan masyarakat yang menghambat status quo. Mulanya Mendagri mengeluarkan beberapa peraturan dan daftar LSM, yang tidak terdaftar adalah illegal. Agenda lainnya adalah dicarinya sumber-sumber yang menghambat status quo, diantaranya adalah pers, dan pers akan dibredel, itu sudah jelas terbukti. Agenda yang lain adalah akan adanya pembredelan pers mahasiswa, karena ini merupakan alternatif dari pers umum".

Rencana pengaturan LSM sebenarnya pernah muncul lima tahun yang lalu sejak Insiden Brussel. LSM pada waktu itu dianggap telah menjelek-jelekkan bangsa di negeri orang. Perdebatanpun terjadi, hanya sikap pemerintah saat itu belum jelas, kalau tidak malah mendua. LSM-pun bereaksi lebih adem ayem.

Sikap mendua tampak dengan perbedaan pendapat Mendagri Rudini dan Pangkopkamtib Sudomo. Pangkopkamtib selalu mengatakan bahwa LSM (yang dianggap menyimpang) akan ditindak tegas berdasarkan UU No 8 tahu 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan- yang kini dijadikan acuan penyusunan konsep Keppres.

Sedangkan Bapak Rudini, lewat serangkaian dialog dengan LSM, cenderung menyerahkan pengaturan itu pada LSM sendiri (*self regulation*) lewat penyusunan kode etik. Akhirnya keluar Instruksi Mendagri No. 8 tahun 1990 tentang pembinaan LSM. Dan tidak ada yang bereaksi terhadap Inmendagri ini. Dalam Inmendagri tersebut, LSM disebut ebagai organisasi/lembaga yang dibentuk oleh masyarakat Warganegara Indonesia secara sukarela atas kehendak sendiri dan berminat serta bergerak di bidang kegiatan tertentu yang ditetapkan oleh organisasi/lembaga sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat yang menitikberatkan kepada pengabdian secara swadaya.

Harus diakui bahwa peran LSM di seluruh dunia pada perubahan arah pembangunan, cukup besar. Akses mereka pada proses pengambilan keputusan, mula-mula terutama memang di tingkat global tapi sekarang telah merambah ke tingkat nasional, makin kuat.

Isu-isu tentang lingkungan hidup, pemberdayaan perempuan, hak asasi, peran serta masyarakat yang semula menjadi jargon-jargon kalangan LSM, kini diambil oleh kaum birokrat dan teknokrat, bahkan di kalangan pengusaha. Pihak yang sering menjadi sasaran kritik LSM.(*eN2*)

Nanang
dari berbagai sumber serta laporan dari Ali R, Winarto dan Topik G.

EKSEPSI MEREKA

Melengkapi sajian Fokus Khusus edisi ini, kami melengkapi dengan hasil wawancara reporter Kentingan pada Ketua SMID Pusat, Munief Laredo dan aktivis LPTP (Lembaga Pengembangan Teknologi Pedesaan) Solo, Yudo Pramono. Berikut petikannya:

Yudo Pramono

Apa agenda kegiatan LPTP?

Kami membangun instalasi Biogas dengan sasaran peternak sapi. Pengembangan industri kecil dengan stressing pada elektrisasi peralatan. Dengan energi listrk untuk program SBS (*Small Bisnis Service*), pelayanan pengusaha industri kecil juga PHT (Pemberantasan Hama Terpadu), untuk melatih petani, bagaimana petani itu tahu tantang hama. Kami melatihnya de-ngan sistem parsipatori de-ngan melihat, jadi tahu betul tentang hama itu. *Planning* yang akan datang itu merupakan kebijakan lembaga.

Apakah masyarakat bereaksi curiga terhadap LSM?

Saya kira tidak, cuma selama ini keberadaan LSM ini masih belum banyak diketahui oleh masyarakat secara jelas, boleh dikata, LSM sendiri membentuk masyarakat LSM sendiri, membentuk komunitas tersendiri, dan memang ada gap, *lah*. Karena LSM banyak muncul dari golongan elit juga.

Bagaimana harapan anda pada pemerintah?

Ya, pemerintah harus *positive thinking*, bahwa LSM adalah sebuah kekuatan, mitra yang akan memperdayakan masyarakat dan tidak akan, jangan sampai dipandang LSM sebagai kutub lain dari pemerintah, bagaimanapun LSM dapat membantu pemerintah. **(eN2)**

Munief Laredo

Bagaimana awal pembentukan SMID?

Secara legal kami mendeklarasikan diri pada 3 Agustus di LBHI Jakarta. Kami tediri dari aktivis mahasiswa beberapa kota, dan kami mempunyai tujuan menuju masyarakat Indonesia yang demokratis de-ngan sistem multi partai. Kondisi politik Indonesia sangat tidak menguntungkan pihak sipil sehingga kita mendorong agar sipil mahasiswa bisa mendorong rakyat untuk memiliki kebebasan berorganisasi di berbagai sektor.

Bagaimana anda memandang organisasi mahasiswa lain yang bercorak konservatif?

Pada batasan awal memang muncul organisasi-organisasi yang berwatak "progresif", mereka menurut aturan-aturan, misalnya HMI, dulunya segagai organisasi progresif Masyumi, PMKRI bagi partai Katolik, PMII dari NU, tapi sekarang keadaan sudah berubah, organisasi tadi jadi bersifat tradisional yang hanya mengikuti apa yang digariskan bapak angkatnya. Musuh kita sekarang sudah berbeda, jadi perlu introspeksi tentang arahan-arahan organisasi, harusnya mereka berubah haluan, agar tidak ketinggalan. Karena akhirnya muncul, misalnya HMI pecah menjadi dua, GMNIjuga begitu, hal itu karena aspirasi anggota tidak tertampung. Karena disaat sekarang, siapa yang akan terlibat dalam perjuangan menuju demokratisasi atau mereka akan terlibas. Memilih perjuangan untuk demokrasi atau reaksioner. Dan reksioner akan terlibas.

Ada keinginan berjuang bersama mereka?

SMID ingin berjuang bersama, karena kita punya tujuan yang sama, kita sangat membutuhkan dan bukannya saling memusuhi. Rakyat sekarang membutuhkan kepeloporan kita karena mereka sudah tertindas begitu lama. Dan bukan organisasi mahasiswa saja, tapi juga pihak lain.

Bagamana kontrol di SMID?

Kita bisa mengontrol lewat kolektif, kolektif yang akan mengontrol kehidupan organisasi. SMID sendiri menjalankan mekanisme seperti itu, dan itu terbuka, kami melakukan kritik dan otokritik,tidak ada feodalisme disini. Cuma kedudukannya yang berbeda. Kritik itu misalnya, saya, sampai tidurpun dikontrol oleh anggota, sampai kita mau makan apa hari ini, semua anggota harus tahu, kita sama-sama nggak makan ya nggak makan.

Sektor advokasi SMID dimana?

Saya kira untuk semua sektor. Misalnya di Jakarta, sektor buruh yang kita tangani, di Semarang juga buruh, petani di Yogya, Solo dan Salatiga, Surabaya juga kebanyakan buruh. **(eN2)**

TERPUTUSNYA KOMUNIKASI POLITIK MAHASISWA

Mahasiswa dengan dosen, rektor merupakan elemen-elemen yang tak terpisahkan. Dimana antara ketiganya merupakan basic dalam nuansa kampus yang dipakai sebagai wadah aktifitas dari dari semuanya. Sehingga dalam berbagai hal, tak kan dapat dipisahkan. Komunikasi informasi dan saling tukar informasi merupakan bagian penting dalam menggulirkan idealisme dalam konteks yang aktual.

Namun tak dapat kita pungkiri adanya berbagai kendalam dalam proses tersebut. Mahasiswa sebagai sosok yang penuh idealisme selalu tidak puas dengan status quo, serta berbagai kebijakan yang tak menyentuh kebutuhan.

Dalam berbagai pertemuan selalu terlihat betapa banyak "ketidakkompakan" antara pihak mahasiswa dengan pengambil keputusan kampus. Isyarat ketidakpuasan tersebut dapat terlihat dalam berbagai hal, baik dalam dialog, diskusi surat pembaca, maupun dalam aksi yang digelar mahasiswa.

Sehingga tak kurang komentar yang miring tentang masalah tersebut. Mahasiswa sering dibilang "tak dapat berpikir rasional", sementara penguasa kampus dianggap "Bapak tak tahu diri", dan seambreg komentar yang lain.

Berkaitan dengan fenomena tersebut maka LITBANG Kentingan mengadakan penyebaran angket ke-pada mahasiswa tentang beberapa tanggapan dan keberatan keputusan yang telah diambil "penguasa kampus" berkaitan dengan berbagai hal, baik IOM, BPK dan lain sebagainya.

Angket tersebar sebanyak 200 mahasiswa, yang disebarkan pada delapan fakultas. Tentunya jumlah tersebut tidak sebanding dengan jumlah mahasiswa UNS. Namun dengan sistem pengambilan sample randim sampling, sehingga jumlah tersebut dapat merupakan representase dari jumlah mahasiswa UNS. Dengan asumsi bahwa setiap mahasiswa mempunyai kesempatan yang sama untuk mengisi angket, namun responden kita bagi menjadi delapan fakultas. Dan masing- masing fakultas kita ambil responden untuk mengisinya.

Dari jawaban-jawaban yang masuk, diperoleh hasil bahwa keputusan IOM merupakan keputusan yang paling memberatkan mahasiswa, yaitu 28,65%. Dalam jawaban tersebut terdapat 75,28% jawaban yang masuk, 3,93% abstain, 1,12% menjawab tidak peduli, 19,66% menjawab sangat memberatkan. (Lihat Tabel 1)

Tabel 1
Persepsi Mahasiswa
tentang IOM

No	Keterangan	Prosentase
1	Sangat memberatkan	28,65
2	Memberatkan	75,28
3	Abstain	3,93
4	Tidak Peduli	19,66
	Jumlah	100,00

Untuk keberatan yang terdapat dalam prioritas pertama aadalah IOM, disusul keputusan tentang BPk, sebesar 20,79%, kemudian yang ketiga tentang otomatisasi keanggotan KOPMA yang diberlakukan kepada seluruh mahasiswa UNS, yaitu sebanyak 9,58%.

Ada beberapa perbedaan dalam beberapa fakultas tentang prosentase keberatan keputusan yang dibuat penguasa kampus.

Untuk fakultas Ekonomi, Kedokteran dan Pertanian menyatakan bahwa dengan adanya keputusan BPK dianggap lebih memberatkan daripada IOM, hal ini dikarenakan kurang cocoknya BPK dalam sistem pendidikan pada saat ini, serta tidak dipakainya BPK dalam mata kuliah, padahal BPK tersebut wajib dibeli.

Sedang fakultas yang lebih keberatan dalam IOM adalah fakultas Sastra, Isipol, Hukum, Teknik serta KIP. Beberapa fakultas yang merasa keberatan tersebut dikarenakan besarnya dana IOM dan pemanfaatannya yang tidak dapat mereka nikmati dalam kampus.

Sementara untuk SPP jawaban paling keberatan adalah dari fakultas Isipol. Kemudian untuk PBB/KKN prosentase keberatan tertinggi adalah fakultas Ekonomi dengan 31,58% diikuti fakultas Teknik 8,68%, serta Kedokteran 6,25% dan Isipol 5,26%.

Sementara untuk target SKS, fakultas Teknik mempunyai prosentase terbesar yaitu 8,69%.

Berikutnya untuk kurikulum, pembatasan masa kuliah, Mnewa, dan foto wisuda terdapat prosentase keberatan yang lebih kecil..

Yang jelas proporsi jawaban yang diberikan responden dari dela-

pan fakultas memberikan jawaban, bahwa keputusan "penguasa" kampus ternyata memberatkan yaitu 75,28%, sehingga sangatlah tepat apabila kebijakan tentang beberapa keberatan yang dikemukakan mahasiswa perlu ditinjau kembali. (Lihat Tabel 2)

Bagaimanapun sebuah kebijakan harus dapat membumi sehingga tak terjadi *misaction* dalam aktualisai kebijakan tersebut. Kiranya bukan seorang penguasa yang bijak tatkala ia tak dapat mengakumulasikan aspirasi mahasiswa.

Yang jelas harus ada sikap yang akomodatif dari pembuat kebijakan kalau ia mengedepankan aspirasi mahasiswa. Sehingga mahasiswa tak seperti barang mati, namun ia dihargai sebagai makhluk akademis, yang mempunyai fikiran, gagasan yang cerdas demi kampus dan lembaga pendidikan dimana ia menimba ilmu. **(Hen, Agus, Anik, Heri, Winarto, Ali)**

Tabel 2
Jumlah dan Prosentase Keputusan yang Memberatkan Menurut Fakultas

No	Keterangan	Sastra	Isipol	Ekon.	Hukum	Kedok.	Pert.	KIP	Teknik	Jumlah
1	BPK	25	5,26	47,37	30,43	25,00	21,74	5,71	17,39	20,79
2	IDK	35	31,58	15,79	34,78	12,5	21,74	31,43	39,13	28,65
3	SPP	10	5,26	-	-	-	4,35	14,28	-	5,06
4	KDPMA	15	31,58	5,26	4,35	-	21,74	-	4,35	9,56
5	PBB/KKN	5	5,26	31,58	-	6,25	4,35	-	8,69	6,74
6	Target SKS	-	-	-	-	-	-	-	8,69	1,12
7	Kurikulum	-	-	-	-	-	-	5,71	4,35	1,68
8	Pembatasan Masa Kuliah	-	-	-	-	-	-	2,86	-	0,56
9	Manwa	5	-	-	-	-	-	-	-	0,56
10	Foto Wisuda	-	-	-	-	-	-	-	4,35	0,56
	J u m l a h									100,00

Kemegahan bisa jadi sangat membanggakan. Tapi bisa juga suatu petaka. Akibat pemagaran kampus UNS, mahasiswa terpaksa main terobos untuk masuk kampus. ***(nhz,int)***

SMPT MUNDUR ???

Munculnya SMPT UNS dari masa kepengurusan merupakan suatu gejala yang patut untuk disimak. Karena sebagai badan eksekutif tertinggi yang ada di UNS, ternyata "harus mundur".

Tentunya ada segudang pertanyaan yang terus mengalir berkaitan dengan persoalan tersebut.Juga saling tuding siapa yang memulai, siapa yang salah dan sebagainya.

SMPT harus mempunyai fungsi-fungsi normatif dan koordinatif, karena kalau kita melihat adanya berbagai orientasi mahasiswa UNS, maka jelas sekali ada perbenturan didalamnya, oleh karena itu perlu adanya "ketertiban struktural", kata Koento Wibisono, rektor UNS. Makanya kritik dan saran yang diberikan mahasiswa boleh-boleh saja, namun kalau kita lihat kondisi UNS, ternyata 60% itu *cuek* terhadap aktivitas kampus, 37% aktif dalam beberapa kegiatan kampus (HMJ,SEMA, UKM, BPM) dan 3% aktif dalam gerakan mahasiswa, tandasnya lebih lanjut.

Sehingga kemunduran SMPT terlihat justru tidak dapat menyadari situas, karenanya SMPT harus dapat "the art political playing" sehingga harus mampu membuat kegiatan-kegiatan yang pada tingkat Nasional yang konseptual, jangan hanya risau dengan kondisi dan permasalahan kampus, kalau ingin maju, katanya lebih lanjut.

Sehingga bubarnya SMPT UNS tersebut merupakan "ketidakpahaman" terhadap apa yang diinginkan oleh "Bapak dan Anak" dalam kampus UNS, dan lagi ya.... itu tidak dipunyainya "seni" dalam permainan politik di kampus, demikian kata Koento Wibisono, ketika menanggapi bubarnya SMPT.

Sementara Ubaidi, Mantan Sekretaris SMPT periode 92-93, sekaligus salah satu SC dari musywarah anggota menyatakan penyesalannya terhaap mundurnya SMPT yang disebabkan tidak diterimanya dan dilantiknya BEM oleh Rektor UNS.

Konsep tentang BEM adalah sebagai antisipasi atau Komisi Eksekutif, sehingga lebih merupakan "payung" dari SMPT. Dan BEM akan berfungsi sebagai lembaga kontrol dalam SMPT. Karena kalau BEM sebagai badan eksekutif, jelas akan memecah tugas SMPT. Dan lagi secara konstitusional kalau demikian maka BEM akan berbenturan dengan undang-undang.

Namun pada saatitu hasil *Musang* menetapkan BEM terbentuk, sebagai badan eksekutif. Maka hal tersebut kurang taktis, karena BEM diperlukan sebagai jembatan dalam lembaga eksekutif, kalaulah BEM tesebut dipaksakan ada itu hanya akan memperbesar persoalan. Mahasiswa khan punya *bargaining*, meski bukan BEM itu tak apa-apa. Selain itu Ubaidi menyatakan bahwa kemunduran SMPT tersebut ternyata tidak diikuti oleh SEMA Fakultas, hal ini merupakan belum adanya persiapan yang matang, demikian ungkapnya mengakhiri pembicaraan.

Hadirnya BEM jelas merupakan puncak kekecewaan yang merupakan perlawanan akan fenomena kampus yang selama ini terpendam, kata Tatang Badru Tamam mantan Ketua SMPT.

Karena mula awal dari hal tersebut sudah jelas, yaitu ingin dibentuknya BEM yang memang berada dalam garis struktur SMPT, kalau mau diruhah sebagai lembaga atau badan yang berdiri sendiri, karena melihat tidak efektifnya badan tersebut bila menyatu dengan struktur SMPT. Namun hal tersebut tidak mendapatkan persetujuan dari pihak rektorat, sehingga akhirnya kami mundur, lanjutnya.

Tetapi yang jelas kemunduran kami ini bukan kehendak kami, namun merupakan kesepakatan pada saat *Musang* pada tanggan 27-29 Mei 1994 yang lalu. Selain itu dikarenakan rektor tidak mau *konformatif* terhadap persoalan ini. Karena bagaimanapun rektormerupakan salah satu objek kekuasaan tertinggi yang ada di kampus. Sehingga dalam skala ini pihak rektor harus siap ketika berhadapan dengan budaya "malas" yang sudah dikondisikan.

Sehingga pengambilan posisi yang jelas dalam SMPT berakibat pada berbagai aktifitas baik di tingkat Universitas maupun pada tingkat Fakultas. Tapi yang menjadi persoalan adalah bahwa, SMPT pada saatini harus membayar mahal gerakan kemunduranya karena dinilai terlalu *frontal*, ungkap mantan Ketua SMPT itu.

Pada sisi yang lain Susanto Kartubij mengatakan bahwa kemunduran SMPT tersebut mencerminkan adanya konflik yang membentur dalam penyelesaian masalah tersebut. Artinya entah direkayasa atau tidak hal tersebut merupakan *preseden* dalam kampus UNS kali-ini.

Karenu ada dua hal yang sebenarnya layak untuk dikritisi dalam kasus pengunduran SMPT, yaitu Pertama ketidaksiapan mahasiswa untuk berdemokrasi dikalangan mahasiswa dan tidak siapnya SMPT sebagai konsep praktek demokrasi mahasiswa, karena mahasiswa harus membangun kekuasaan dan struktur "pemerintahan" yang demokratis untuk dirinya sendiri. Ironisnya masing-masing pihak mencoba untuk menang, dan lagi kurangnya otokritik dari pimpinan Universitas.

Dan akhirnya, itulah yang terjadi pengurus harus "menyerah" mengundurkan diri untuk misi di SMPT, sementara pimpinan Universitas "menuduh" mahasiswa sendirilah penyebabnya, katanya serius. **(Hen)**

KISRUH MAMBA'UL ULUM SURAKARTA

Keserakahan, ambisi jabatan, dan kesombongan adalah potensi manusia yang harus dihapuskan.

Akan kemana semuanya dan siapa yang bertanggungjawab, bahwa sebenarnya ***tidak ada kambing hitam****! Seandainya setiap manusia berbagi kesabaran dan kesadaran akan hidup yang penuh nilai kemanusiaan, dalam ruang dan waktu yang penuh kedamaian.*

Sebuah fenomena yang terjadi di Surakarta tentang adanya kasus Mamba'ul Ulum (MU) yang bermula sejak beberapa tahun lalu dan sampai sekarang tak juga terselesaikan. Fenomena yang berkaitan dengan umat Islam, Keraton, Depag, Pemda, seta TPMU (Tim Penyelamat dan Pelestarian Kewibawaan Masjid Agung dan Madrasah Mamba'ul Ulum Surakarta). Kasus tersebut muncul pertama kali pada bulan Agustus 1992, yang mana terjadi *ruislaag* (tukar bangun) antara Depag dengan Pemda serta pemanfaatkan sebagian tanah wakaf Masjid Agung Surakarta (MAS) seluas 240 meter persegi. Singkatnya tanah tersebut akan dilepaskan haknya kepada Pemda Surakarta. Oleh pihak Pemda kemudian diserahkan kepada investor. Dari similah kisruh Mamba'ul Ulum tersebut tak berakhir sampai sekarang.

Keadaan itu membuat permasalaan Mamba'ul Ulum semakin mencuat. Apalagi letaknya berhadapan dengan Pasar Klewer, sehingga sangat strategis untuk pembuatan ruko dalam upaya mengembangkan bisnis. Rencana tukar bangun disertai pula dengan program rehabilitasi gedung PGAN (bekas MMU) di samping program membangun ruko-ruko. HM Hasyim menolak keras ketika ditanyakan tentang pembangunan ruko dalam wilayah kompleks Mamba'ul Ulum. "Siapa yang bilang kalau akan dibangun ruko, itu tidak benar, karena kompleks tersebut tetapakan dimanfaatkan untuk pendidikan", demikian ungkapnya, ketika ditemui Kentingan.

Lebih lanjut ia mengatakan bahwa tanah tersebut bukan tanah wakaf, karena sejak lahirnya UU No. 5 tahun 1960, semua tanah bekas Swapraja berubah menjadi tanah negara, sehingga tanah tersebut (kompleks MU) bukan merupakan tanah wakaf. Sehingga merupakan hak Kementrian Agama untuk mengelolanya. Dan pengelolaan imilah yang akhirnya menyulut kemarahan umat Islam di Solo. "TPMU akan tetap mementang dibangunnya lokasi tersebut untuk dibangunnya ruko, dan itu akan tetap ditentang sampai kapanpun", demikian ungkap A kholiq Muhammad, sekreta-ris TPMU.

TPMU merupakan tim yang terdiri dari H. Abdul Latief sebagai ketua, A. Kholiq Muhammad sebagai sekretaris, dan beberapa anggota yaitu Muh Sadzali, Dr. Rosdi, Drs. KH Rukhani Abdul Hakim, dan H Solekhan. Tim tersebut tertuang dalam SK MUI No. 01-DP- MUI/I/ 1993 tanggal 14 Januari 1993. Tim tersebut dilengkapi penasihat hukum Thoriq Addibani SH.

"Makanya MU tersebut diserahkan kepada Kementrian Agama untuk diselamatkan, agar dirumat, biar tidak buhrah", kata HM Hasyim, "sehingga kalau dikatakan merongrong Masjid Agung, itu tidak benar. Itu khan tandanya bahwa kewibawaan

Masjid Agung masih tetap terjaga", ungkapnya lebih lanjut. Sedangkan kaitannya dengan *raislaag*, Lukaman Suryani, sekretaris umum Masjid Agung Surakarta mengatakan bahwa justru yang dilakukan pihak Depag selama ini adalah menyelamatkan Masjid secara *action* (aktivitas), sehingga berbagai aktivitas Masjid Agung tetap terlaksana, misalnya Jum'atan, Sekatenan, dan pengajian-pengajian. Kalau *toh* kuncungan masjid tersebut dibongkar, itu semata-mata untuk kebaikan saja. Sehingga yang terpenting segi manfaat yang dilakukan saat ini lebih besar dari *madlorot*-nya.

Lebih lanjut dia mengatakan, "Jelas kalau lokasi tersebut tidak lagi memungkinkan untuk tempat belajar mengajar, karena ramainya perdagangan".

Sementara Soejono Rafi'i, Kasospol Solo mengatakan bahwa yang terpenting, masyarakat tetap *adem ayem*, tidak geger. Karena saya sebagai pembina politik masyarakat hanya dapat menghimbau berbagai pihak untuk tetap mementingkan kepentingan umat, sehingga tidak terjadi aksi dalam masyarakat demi suatu stabilitas. Lebih lanjut dia mengatakan, "Lebih-lebih masalah Mamba'ul Ulum Solo merupakan masalah Kementrian Agama dalam tingkat pusat, bukan lagi masalah Kotamadya Solo secara langsung". **(hen/budiono)**

Keadaan sekitar Masjid Agung

MAMBA'UL ULUM : KEPRIHATINAN WONG SOLO

Kasus Mamba'ul Ulum yang sampai sekarang masih terjadi menunjukkan telah terjadi konflik yang membentur masing-masing pihak yang terlibat untuk menyelesaikan konflik tersebut. Terlepas dari siapakah yang bersalah dalam kasus tersebut, yang jelas, perjalanan dari awal hingga saat ini merupakan preseden bagi keprihatinan wong Solo, bahkan merupakan kejadian bagi umat Islam pada umumnya.

Sesungguhnya banyak hal yang tak dapat terelakkan dalam kasus tersebut, bak dari religiusitas, historis, kemanusiaan, bahkan kekuasaan. Wakaf atau *raislaag*, itu bukan merupakan hal yang paling esensi. Namun mengapa kasus itu sampai terjadi bahkan tak terselesaikan sampai saat ini?

Jelas kiranya kalau Mamba'ul Ulum yang didirikan 23 Juli 1905 oleh Sri Susuhunan Pakubuwono X, yang merupakan satu kesatuan dengan Masjid Agung merupakan kompleks pendidikan, bahkan berperan sebagai tempat perjuangan rakyat melawan Belanda. Banyak tokoh-tokoh terlahir dari tempat itu. Sehingga tidak heran apabila tempat tersebut merupakan tempat yang bersejarah, bukan saja secara fisik, namun juga dalam ideologi dan semangat perjuangan.

Adanya perpindahan (kalau boleh dibilang) Mamba'ul Ulum dari tangan keraton ke tangan pemerintah melalui surat kuasa untuk mengelola sebagaimana mestinya justru merupakan awal dari konflik yang berkepanjangan. Hal ini diperkuat dengan kehadiran investor yang mengelola wilayah tersebut, yaitu Sucipto alias Tan Ing Ho yang sanggup membeli bagian tanah bekas MMU dan akan dibangun ruko.

Letaknya yang strategis merupakan incaran yang empuk bagi kalangan pengusaha untuk mengembangkan usaha di tempat tersebut. Sehingga Walikotamadya Solo saat itu, R Hartomo, memecah tanah kompleks bekas MMU seluas 2.308 meter persegi, tahun 1992. Dengan perincian 2.068 meter persegi diberi sertifikat No. 5, sisanya diberi sertifikat No. 4, yang mana keduanya merupakan hak pakai.

Terlepas dari hal tersebut, beberapa kegiatan yang telah dilakukan baik penggusuran, maupun pemindahan Kuncungan, serta akan dibangunnya ruko ternyata menyulut kemarahan berbagai pihak. Sehingga muncul sejumlah "aksi", baik yang dilakukan secara prosedural maupu secara aksi massal, baik dari kalangan pecinta budaya, mahasiswa, tokoh agama, maupun TPMU.

Dirobohkan .....

Demi kepentingan umat Islam, tak layak apabila sesama "saudara" bertengkar, demi tujuan yang sama. Bahwa semuanya demi kedamaian, kemanusiaan, dan menyelamatkan cagar budaya di Solo tercinta. Oleh karena itu kiranya masing-masing pihak yang terkait dalam kasus Mamba'ul Ulum berbenah, saling peduli dan tak mencari kambing hitam. Yang jelas semua harus terselamatkan.

Dan kalaulah ada yang salah, rasanya adalah kesatria apabila dengan ikhlas meminta maaf dan kemudian membangun taubatnya dengan kerja demi kepentingan wong Solo.

Kiranya masing-masing orang tak hanya sekedar prihatin, namun tak juga sekedar emosi, karena meskipun ada berbagai kepentingan yang berbeda dalam satu "keluarga", sesungguhnya masing-masing pihak mempunyai potensi untuk menaktualisasikan komitmennya terhadap agama (Islam), budaya, dan mota kita Solo tercinta.

Hening Parlan

Abdul Khaliq Muhammad : "Kami akan terus memperjuangkan MU sampai kapanpun"

Mantan Ketua Umum HMI Cabang Surakarta yang saat ini menjabat sebagai sekretaris Tim Penyelamat dan Pelestarian Kewibawaan Masjid Agung dan Madrasah Mamba'ul Ulum (TPMU) mengatakan bahwa ia dan kawan-kawan dari TPMU akan tetap pada komitmen untuk memperjuangkan MU sebagai pusat pendidikan. "Banyak pihak yang karena faktor ekonomi, dan itulah yang sebenarnya menjadi motivasi dari oknum pejabat dalam kasus MU ini, oleh karena itulah kami yang dengan tegas menyadarkan kepada mereka bahwa benda cagar alam dan tanah Masjid Agung harus diselamatkan", demikian katanya.

"Selama ini kami (TPMU-red) telah malakukan langkah-langkah yang strategis dan prosedural, makanya kami yakin bahwa tujuan kami dapat tercapai".

Lebih lanjut dia mengharapkan kepada walikota Solo yang baru agar nantinya dapat menyelesaikan maslah ini dengan tuntas, sehingga tidak berlarut-larut. **(hen)**

GPH Dipokusumo : "Kompleks tersebut harus dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umat Islam"

Mas Dipo, salah satu kerabat keraton mengatakan bahwa MU dan wilayahnya harus dikembalikan pada tempat semula, jadi tidak dipergunakan untuk membikin ruko. Karena sampai saat ini, pengelolaan MU yang telah diserahkan pada investor, ternyata diselewengkan.

"Dikelola sebagaimana mestinya *kan* bukan berarti harus dibongkar dan diganti dengan ruko, namun tetap harus digunakan untuk kepentingan umat Islam", lanjutnya.

"Kalau memang tidak lagi digunakan untuk tempat pendidikan, ya tidak apa-apa, *kan* bisa dipakai untuk aktivitas umat Islam yang lain, perpustakaan misalnya, namun jangan dipakai untuk perdagangan, itu namanya merusak cagar budaya", tandasnya. **(hen/bud)**

RIWAYAT MAMBA'UL 'ULUM

Tahun 1988

Kepala Sekolah M.Ts.N.II Surakarta, Drs.Tuchari,lewat surat no Mts.K.39/250/KS.01.1/VII/1988 minta tanah kepada walikota/KDH TK. II Kodya Surakarta untuk lokasi MTSN II karena memang belum mempunyai tanah.

Tahun 1989

Walikota Hartomo mengirim surat pada Menag tentang rencana Rehabilitasi dan pembangunan gedung PGAN/Mamba'ul Ulum. Sinuhun Pakoe Boewono XII memberi restu upaya Pemda bersama Depag untuk merehabilitasi gedung MU (Mamba'ul Ulum).

Tahun 1991

Kepala Sekolah MTSN II SKA., kembali kirim surat pada walikota mengusulkan lokasi tanah di Pajang untuk MTSN II.

Kepala Sekolah MTSN II SKA., membuat Pernyataan di atas kertas bermaterai tentang terbelinya tanah di Pajang,dan sisa yang belum terbeli.

Kepada Kakandep Solo, Walikota Hartomo menyatakan persetujuannya tentang bakal tanah lokasi MTS.

Tahun 1992

Walikota Solo menawarkan pada Menag bahwa dalam rangka renovasi Gedung MBU dan perluasan MTSN Walikota memperoleh sebagian tanah MAsjid Agung yang ditempati MBU 4 x 60 m.

Selaku Sekjend. Depag dr. Tarmidzi Taher menyetujui tawaran Walikota Solo tersebut dengan syarat disetujui Menkeu RI. Depag minta ijin persetujuan Menkeu atas tukar-bangun (*Ruislaag*) gedung MBU. Benjamin PArwoto, Dirjen Anggaran DepKeu atas nama Menkeu menyetujui ruislaag.

Terbentuk panitia Ruislaag yang selanjutnya mengukur tanah hak pakai.Tanah Masjid Agung Yang ditempai MBU dipecah jadi dua, juga ditandatangain sertifikatnya.

14 Agustus jam 10.15 tanpa sepengetahuan PGAN/MAN, diadakan pengukuran ulang oleh pejabat Pemda dan Investor, CV Bangun Cipta Karya Sejati (BCKS), *Tan Ing Ghoe* dari pengukuran itu ada tambahan 140 m², ini di luar perhitungan "hitam di atas putih".

Walikota membentuk team pelaksana *Ruislaag* karena mendapat protes dari kepala Sekolah MAN Solo.

Sejumlah ulama menuntut walikota agar rencana pembangunan Ruko dibatalkan.

Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) melakukan prortes atas masalah yang sama dan melayangkan surat pada Gubernur Jateng, yang disusul aksi unjuk rasa mahasiswa di balaikota Solo.

Terjadi dengar pendapat antara DPRD (Komisi B dan E) dengan Depag,Pemda dan HMI. MUI Solo mengadakan pertemuan dengan umat Islam, hasilnya 99% hadirin tidak setuju dengan ruislaag dan melingdungi benda cagar budaya di Solo.

Beberapa tokoh masyarakat membentuk GGerakan Solidarita Mamba'ul Ulum (GSMU). Pembanguan ruko dilanjutkan lagi tanggal 16 November 1992. GSMU memperotes,namun Menag, Munawir Sadzali mengatakan MBU sudah tidak cocok lagi sebagai saran pendidikan dan menilai umat Islam yang membela MBU hanya emosional saja.

Tahun 1993

Walikota bersedia membatalkan Ruislaagdan pembangunan ruko di MBU. Umat Islam diharuskan mengganti biaya pada investor selama proses berlangsung sebesar Rp 318.000.000,-.

ICMI pusat bersedia membantu Tim PEnyelamat Mamba'ul Ulum (TPMU).Pertemuan TPMU dengan investor mengenai ganti beaya mengalami jalan buntu.Bahkan keraton Kasunanan menggugat Kakandepag Solo untuk mengembalikan MBU menjadi kesatuan dengan MAS.

Walikota Solo menghadap Menag,hasilnya untuk pelaksanan proses tukar bangun ditunjuk pihak ketiga,segera diadakan serah terima Depag mendapat tanah di Pajang untuk PGAN dan hasil rehab gedung MBU, pihak ketiga CV BCKS menerima tanah sebagian tanah Masjid Agung.

Sri Susuhunan Pakoe Boeono XII mengirim surat kepada Presiden RI minta penegasan kembali tentang Status dan Pengelolaan Keraton Kasunanan Surakarta.Menurut Sinuwun ruislaag tersebut bertentangan dengan Keppres no 23 th.88 dan uu RI no.5 th.92 tentang Benda Cagar Budaya.Selanjutnya kasus MBU ditangani secara koordinatif oleh Sekneg, Depdagri, Depag dan BPN.

Komisi IX DPR RI turba ke Solo mencari masukan tentang kasus MBU. DPR hanya menganjurkan pada Pemda supaya memperhatikan aspirasi masyarakat Surakarta.

Tahun 1994

Sejumlah tokoh nasional seperti Sri Bintang Pamungkas, MH Ainun Najib meninjau lokasi MBU. Yayasan Satya Mitra Solo menggelar sarasehan budaya soal MBU. Bertempat di MTsN 2 Pajang diadakan serah terima asset Ruislaag, dihadiri pejabat Depag pusat, Pemb. Gub. dan Muspida Surakarta dalam acara itu Tan Ing Goe (Investor) menyerahkan tanah di Pajang dan hasil rehab MBU pada Depag, sedang Depag menyerahkan sebagian tanah Masjid Agung.

TPMU meminta kejelasan BPN Solo tentang beredarnya berita telah dilaksanakan pengalihan hak pada pihak lain atas tanah Masjid Agung yang digunakan MBU. Sementara MUI meminta Kakandeppag untuk menghentikan proses epembangunan di atas tanah MBU.

TPMU meminta DPRD II Surakarta untuk memanggil Kakandeppag dan investor dalam forum Dewan untuk dimintai pertanggungjawabannya. **(HEN)**

Budaya
banyak ne
dengan pra
acara, mlai
teater, smi
lainnya.
tarkany
tersendiri
pilanna s
oleh p
balikya
segan-ega
Tahun l
cekal arb
teoh

R A L A T

Pada Rubrik Figur edisi 02/th. II/1995, halaman 47, terdapat kesalahan yang sangat mengganggu yaitu ...,sistem ini membuat anda menjadi *lakon* manusia, seharusnya, ..sistem ini membuat anda menjadi *bukan* manusia. Demikian harap maklum.

GUR

EMHA AINUN NADJIB:

Saya tidak percaya pada diri saya sendiri

ayawan yang satu ini telah
nembuat kagum khalayak
penampilannya di berbagai
nilai dari pembacaan puisi,
siminar dan diskusi-diskusi
nya. Kritik-kritik yang dilon-
annya menerbitkan sensasi
ndiri dan membuat penam-
nra selalu ditunggu-tunggu
len pencinta demokrasi. Se-
kiya pihak birokrat pun tak
-egan untuk mencekalnya.
un lalu, dia mencatat rekor
erbanyak di antara tokoh-
koh kontroversial lainnya.

Emha Ainun Nadjib, yang terlahir sebagai putra ke 4 dari 15 bersaudara, dibesarkan oleh orang tuanya yang suntuk dengan madrasah, langgar dan pelbagai ke-giatan sosial dengan masyarakat dusunnya di Mentoro, Sumobito, Jombang Jawa Timur.

Di sela kepadatan acaranya, Kentingan mengirim Narang BS dan Sri Wahyuningsih menemui figur yang bersama Komunitas Pak Kanjeng telah mencatatkan sukses di beberapa kota besar (namun sekaligus juga didemo generasi muda Ujung Pandang) dalam mementaskan repertoarnya. Berikut petikan perbincangan yang dilakukan menjelang dini hari pada sebuah warung lesehan di bilangan kota Yogyakarta tersebut :

Apa yang membuat anda terjun dalam dunia budaya/sastra?

Saya tidak terjun dalam dunia sastra, saya menjalani hidup saya tidak perduli apakah ini sastra atau bukan, dan bukan karena saya ingin jadi sastra-wan. Kalau saya malam ini atau besok pagi tidak nulis puisi ya tidak apa-apa. Saya tidak terikat oleh status apapun. Saya menjalankan hidup dan manusia itu lengkap, bahwa kadang-kadang ekspresi saya itu berwujud sastra, teater, keterlibatan politik kadang-kadang kultural, kadang keagamaan, semua manusia kan begitu.

Anda terlihat cenderung pada aspek budaya

Kebudayaan bukan aspek karena itu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tidak benar. Semua orang wajib berbudaya. Kalau kebudayaan berwujud departemen maka presiden berada di atas kebudayaan sehingga presiden tidak terikat untuk berbudaya. Jadi kebudayaan bukan bidang. Kebudayaan adalah prinsip-prinsip nilai hidup yang dijalani manusia. Jadi ada eko-nomi yang berbudaya ada eko-nomi yang tidak berbudaya, kebudayaan mensifati semuanya. Tiap hari kita melakukan kesalahan itu dan kita kerasaan dengan kesalahan itu. Kaum terpelajarlah yagn memisah-misahkan seperti itu dan kemudian kehilangan keutuhannya.

Lalu anda lebih cenderung kemana

Saya tidak punya kecenderungan, tujuan saya menjadi manu-sia.

Berarti sebelumnya anda belum manusia

Lingkungan, sistem ini membuat anda menjadi lakon manusia. Kalau anda jualan di supermarket apa memperhitungkan ma-nusia, disana yang berlaku bukan hukum kemanusiaan, yang berlaku hukum ekonomi. Dalam politik, pada waktu pemilu, partai-partai politik mera-yu rakyat. Itu yang dirayu bukan manusia tapi angka, coblosan. Itu namanya reduksionisme kemanusiaan. Jadi sis-tem-sistem sejak dalam sejarah ini membuat manusia diredusir. Kalau dalam ekonomi dia hanya dilihat faktor produktifnya. Dalam politik dilihat jumlah angkanya. Itu berarti mengurangi manusia menjadi satu sisi. Perjuangan hidup saya adalah saya menolak

direduksi seperti itu sehingga cita-cita saya adalah menjadi manusia utuh yang dibuat GUSTI ALLAH.

Perjuangan itu sendiri dilakukan secara bagaimana

Tergantung konteksnya, manusia hidup selalu berdialektika antara diri sendirinya dan diri sosialnya, itu selalu jadi satu Perilaku yang bersifat pribadi dan perilaku yang bersifat sosial selalu berkaitan terus menerus. Jika kita yakini demokrasi akan menolong manusia untuk mengutuhkan dirinya supaya manusia punya peluang untuk memperoleh hak-haknya, punya peluang untuk menjalankan kewajibannya. Tetapi kita tidak bisa memperjuangkan demokrasi sendirian.

Bagaimana tentang persamaan visi.

Ada yang harus sama seratus persen, ada yang cukup sama satu persen. Kalau kita mau kerja bakti hanya butuh satu persen saja pokoknya membersihkan kampung. Kalau kita hanya menuntut kesamaan visi, kapan kita mau berjuang.

Berarti pencarian kawan perjuangan tidak selalu harus melalui tahapan-tahapan tertentu.

Tidak, kecuali saya mau buat partai. Perjuangan saya perjuangan kemanusiaan dan kebudayaan. Saya tidak perduli disini ada intel, polisi menyamar, saya siap. Misalnya saya punya musuh dalam selimut, ya tidak apa-apa, saya siapkan kekebalan saya.

Ketidaksamaan visi dan terutama misi akan mengakibatkan pembiasan perjuangan.

Ya tidak apa-apa, dari dulu kapan saja ada bias. *Wong* begitu Rasulullah tidak ada sudah langsung bias, Abubakar begini Usman begitu setelah itu ada tabi'in ada aliran, ada mahdzab ada sekte, *pancen urip iki ngono kuwi lho*. Ya sudah berjuang saja terus dengan segala sakitnya dengan segala biasnya.

Sekarang tiap hari saya diundang kelompok mahasiswa kekampus apa saya harus menskrining mereka ? khan tidak kalau harus dengan kesamaan visi saya tolak semua, tidak ada yang lulus.

Dalam konteks pencarian hidup

Tidak apa-apa saya, kalau ada yang mau butuh dengan saya dan saya ada waktu, mari. Tapi *aku* terus terang, *aku wonge ngono kuwi, ojo kok kongkon sopan-sopan.*

Anda banyak berinteraksi dengan komunitas mana

Saya tidak punya target, siapa saja. Saya juga tidak punya organisasi, saya juga bukan ketuanya mereka ini. Saya tidak membuat feodalisme disini dan juga otoritas. Saya sama dengan anak-anak ini (menunjuk kawan-kawan). Anak-anak juga mengkritik saya, mengejek saya, nggarap saya, saya menggarap mereka, sama saja. Ya itulah namanya manusia. Apa itu manusia, pedoman saya Tuhan, apa kata Tuhan tentang manusia, manusia sama dihadapan-Nya, saya ya harus memperlakukan sama. Jadi bukan gerakan yang terlalu ideologis. Ideologi saya ya paling ide ologis kemanusiaan berdasar agama, berdasarkan informasi Tuhan tentang manusia dan hidup.

Peran Komunitas Pak Kanjeng dalam proses kreatif anda

Kami saling menumbuhkan, saling merangsang kreativitas, nggak ada ketuanya, nggak ada yang lebih tinggi nggak ada yang lebih rendah semua berkontribusi sesuai kapaitasnya masing-masing. Itu dalam rangka supaya kita belajar menghargai manusia sebagai sama makhluk Tuhan.

Perkembangan teater akhir-akhir ini

Ora melu-elu aku moh yen kon nilai wong liya. Orang sekarang tidak ada yang siap dikritik. Ya baik-baik sajalah semua.

Tentang iklim keterbukaan dari pemerintah

Iklim keterbukaan yang mana. Memangnya iklim keterbukaan itu milik pemerintah terus diberikan kepada kita ? Dimana terjadi iklim keterbukaanm, wong TEMPO dibredel, puisi dicoretin, keterbukaan yang mana. Yang ada keterbukaan pada sejumlah individu pejabat tapi tidak secara institusi. Instutusi tetap tertutup. Bahwa Pangdam suatu saat terbuka hatinya sedikit, sebentar, Moerdiono ngomong begini dia ndak tahu gimana polres polsek. Mana keterbukaan itu ? Perasaan saya kok tidak ada semua harus ditutupin kok.

Lalu demokrasi di Indonesia bagaimana

Pemerintah tidak mau belajar demokrasi dan tidak berniat untuk sungguh-sungguh melaksanakan demokrasi.

Bagaimana anda menanggapi pencekalan

Saya pribadi tidak apa-apa, biasa tiap hari saya dicekal, Tidak usah pemerintah wong umat Islam juga mencekal saya, mahasiswa juga mencekal saya, rakyat juga mencekal

saya, semua mencekal saya, tiap hari saya juga mencekal diri saya.

Rakyat mencekal anda itu bagaimana

Karena rakyat tidak menghendaki hal-hal tertentu dari saya, mereka menghendaki yang mereka kehendaki dari saya. Jadi ketika saya datang pada mereka yang saya siapkan hal-hal yang mereka kehendaki dari saya. Yang tidak mereka kehendaki tidak saya bawa. Mahasiswa juga begitu, coba mahasiswa saya bawakan hati saya yang sesungguhnya, apa adanya, belum tentu mau mereka, mereka khan inginnya saya ituy dipotret, dipatung seperti saya kalian kehendaki.

Kalau Umat Islam

Umat Islam apa lagi, banyak sekali. Umat Islam yang paling banyak menindas saya. Kalau saya katakan, *kobong* Indonesia Saya punya buku, saya mau tulis dalam buku besar.

Pandangan anda terhadap orang-orang yang mencekal anda

Tidak apa-apa, biasa. Manusia khan lemah bodoh jahat apalagi mereka terikat sistem-sistem, aturan-aturan dalam kekuasaan jadi kelemahannya lebih serius, kebodohannya menjadi lebih besar, kejahatannya lebih tinggi. Kalau pencekalan sebagai masalah kolektif, masalah masyarakat, masalah demokrasi yang berlaku umum itu harus dilawan.

Proses penyelesaian kekecewaan

Kalau masalah bersama, mari kita selesaikan bersama-sama. Kalau ini masalah pribadiku tidak perlu, biar saja saya menderita.

Apakah itu juga bagian dari proses menjadi manusia

Ya, saya harus kuat. Saya harus siap bahwa tidak seorangpun membela saya. Saya harus siap bahwa tidak seorangpun sungguh-sungguh percaya sama saya. Saya tidak yakin anda percaya sama saya. Bahkan saya sendiri tidak percaya pada diri saya sendiri. Emha itu apa yang bisa saya percaya. Satu-satunya yang bisa dipercaya adalah Tuhan.

Saya tidak mengharapkan. Sudah saya bolak-balik perjuangan apa saja dengan tenaga pribadi, uang pribadi semua sudah saya kasih tapi nggak ada perubahan apa-apa. Tidak percaya saya, ya tidak apa-apa tapi itu tidak mengecewakan saya itu semua hanya dorongan kepada saya tidak percaya. Ya bisa percaya pada yang satu itu thok, lainnya barengbareng demonstrasi tapi diluar itu tidak usah kita jamin. Didalam hati orang saya dengar, apa kalimat orang dalam otaknya tentang saya, saya mendengar. Hidup itu kejam, pokoknya harus kuat, harus dengan Gusti Allah, sendirian, sunyi. Bahwa kemudian kita bisa tersenyum satu sama lain, sesaat, Alhamdulillah. Kalau tidak, kalau kita GR, besok ditikam dari belakang kita kaget. Sya ngomong begini karena punggung saya sudah penuh darah. Dan saya tidak marah pada orang yang menusuk saya dari belakang. Yang penting lalu saya percayanya kepada Tuhan. Dan itu lebih produktif nantinya, perjuangannya lebih keras, staminanya lebih panjang. Anda pasti bingung, ini orang kok tidak punya cita-cita, tapi buktinya target-target yang saya capai khan lebih banyak dari orang lain. Saya tidak kepingin jadi sastrawan tapi buku puisi saya paling banyak, saya tidak kepingin jadi penulis tapi tulisan saya paling banyak. Justru karena saya tidk berpamrih.

Kelahiran Rabu Legi 27 Mei 1953 ini melanjutkan pendidikan ke SMA Muhammadiyah I Yogyakarta, setelah diusir dari Pondok Modern Gontor karena demonstrasinya tahun 1968. Fakultas Ekonomi UGM sempat dicicipinya selama 4 bulan. Pekerjaan jurnalistik pernah digelutinya ketika ia menjadi wartawan dan redaktur Harian Masa Kini Yogyakarta, sampai 1976.

Cak Nun atau Markenun, begitu panggilan akrabnya, telah banyak menulis. Beberapa karya antara lain, 'M' Frustasi, Sajak-sajak Cinta, Sajak-sajak Sepanjang Jalan, Nyanyian Gelandangn, INdonesia : Bagian Sangat Penting dari Desa Saya, Sastra Yang Membebaskan, Dari Pojok Sejarah, Ikut Tidak Melemahkan, Se-sobek Buku Harian Indonesia, Yang Terhormat Nama Saya dan Markesot Bertutur.

Apa yang membuat anda seperti itu pada awalnya.

Karena manusia hidup itu bertauhid, kamu tidak punya kemungkinan lain kecuali kamu menyatukan diri dengan sumber kamu dan hanya itu keselamatan dan hanya itu kebahagiaan.

Kenapa saya bilang saya tidak yakin bahwa anda percaya kepada saya, sebenarnya saya ingin menyatakan bahwa saya tidak menuntut anda untuk percaya dengan saya.

Apa yang anda lakukan untuk menjaga proses kreatif

Bergaul terus, menghayati terus, punya tradisi "*slulup*" terus tahu kapan masuk kegua kapan keluar ke pasar, tahu kapan latihan kapan perang, tahu dialektikanya dan terus menerus menciptakan metabolisme kehidupan yang kondusif untuk kreativitas dari soal waktu sampai intensitas. Misalnya tidur 2 jam tapi intensitasnya sama dengan 6 jam, itu dikerjakan terus menerus.

Kondisi kampus saat ini terutama otonominya bagaimana

Saya kira sangat jauh dari yang seharusnya. Seharusnya dunia kampus harus mandiri dari kekuasaan, mandiri dari ekonomisasi maksudnya kalau ingin belajar ilmu kedokteran ya belajar ilmu kedokteran tidak karena ingin kaya menjadi dokter tapi orang sekarang seperti kursus biar nanti mendapat gaji banyak. Sedang mandiri dari kekuasaan, di kampus itu kalau 2 kali 2 ya 4, tidak bisa ditawar, sekarang kan tergantung jadi tidak obyektif secara ilmu.

Adanya orientasi seperti itu kesalahan siapa

Dialektis karena pada dasarnya manusia itu homomeconomicus, tapi kemudian potensi homo ekonomicus ini dipacu sedemikian rupa oleh sistem yang menomor satukan ekonomisasi dan ekonomisme, jadi akhirnya orang sekolah itu akhirnya seperti berdagang sekarang tanam modal, besok cari untung sebanyak-banyaknya, tapi di lain pihak, kalau tidak begitu, bagaimana Kalau Sekolah tidak ada relevansinya dengan lapangan kerja ya celaka, jadi itu dilema

kita. Makanya SDM itu sebenarnya SDIM, bukannya sumber daya manusia tapi Sumber daya Industrial pada manusia. Jadi tidak ada peningkatan SDM. Kalau peningkatan SDM itu acuannya agama dan filsafat, tapi sekarang yang dimaksud adalah SDIM apakah orang punya potensi untuk produktif atau tidak, produktif tidaknya khan ditentukan ekonomi dan industri, yang disebut Habiebie sebagai SDM itu khan kapasitas produktif manusia. Kalau SDM itu kerjaannya semacam saya ini, dimana kalau dapat income, itu bukan tujuan tapi ekses kalau dlam ekonomisasi, income itu tujuan.

Tentang militer di kampus

Ya militerisme sekarang bukan hanya milik orang-orang militer itu juga milik hampir semua orang. Kecenderungan militerisasi sudah menjadi kecenderungan umum. Kita sudah berjiwa militer, tidak cocok sedikit kita paksakan. Dalam militer khan yang ada instruksi, kepatuhan, tidak ada yang lain. Dan sekarang mahasiswa kan harus siap, pak, siap, pak. Dekan ambil keputusan apapun anda khan harus siap, pak. Makanya terjadi pemecatan Arif itu kan, Arif tidak mau mengakui tradisi militer dalam kampus.

Dalam komunitas ini bagaimana

Kalau disini semua itu diredam, *dong*. Diantara teman-teman begini tidak bisa saling memaksakan, kekuasaan tidak berlaku yang berlaku rundingan, makanya itu kita pertahankan dengan menciptakan komunitas ini cair, tidak *pake* struktur yang kaku. Nah teman-teman seringkali setelah bikin organisasi terus ketika jadi ketua bahkan terus jadi ketua beneran, jadi komandan dan tidak sadar kalau itu militerisme. Lalu tersinggung kalau ditegur anak buahnya.

Peranan militer itu sendiri di kampus dan disegala aspek kehidupan.

Menwa itu kan terjemahan intervensi kekuatan militer dalam kehidupan kampus. Ya tidak enak kalau membuat Polsek didalam atau Koramil, tapi itu khan modus militerisme kampus. Itu hardwarenya, softwarenya sudah terjadi sendiri di kampus. Sekarang mahasiswa apa bisa memilih Dekan, memilih Pembantu Dekan.

Antisipasi militerisme di kampus

Wah saya tidak bisa, wong tidak ikut memiliki. Saya merubah RT saya saja tidak bisa, saya hanya bisa nduduhi. Penyakit manusia modern tidak bisa disembuhkan kecuali oleh dirinya sendiri, orang modern tidak ingin sembuh kok.

Saya hanya bisa menyumbang perlawanan-perlawanan kecil, kalau ada acara yang semua harus pake sepatu *aku ora*. Aku kekantor Sekneg pakai sandal, lumayan toh. Demonstrasi ya sudah. Kecuali kalau satu

dosen disana, saya praktekkan *mbalelo*, wong saya tidak pernah kuliah.

Proses pemberdayaan memerlukan korban, bukan

Semua harus berkorban, saya tidak mau sendirian berkorban. Membayar sekolah sejarah ini harus bersama-sama, sekolah demokrasi ini, kenapa saya harus sendirian berkorban. Dan kalau disuruh berkorban saya tidak mau, kalau saya mau berkorban itu kemauan saya sendiri jangan disuruh, itu urusan saya sendiri. Saya dukung aksi mahasiswa. teruskan.

Apakah itu juga merupakan proses menjadi manusia

Iya dong. Itu j\kan memperjuangkan manusia untuk utuh, kalau punya pikiran begini ya boleh punya pikiran begini, sekarang kan tidak boleh, pikirannya harus sama dengan GBHN sama dengan juklak, juknis, lha itu mau jadi manusia apa.

Falsafah hidup anda

Ya seperti ayam kampung. Orang hidup itu puncaknya seperti ayam kampung, sangat mandiri, tahan sakit, tidak seperti broiler atau leghorn. Sedikit-dikit masuk angin. Ayam kampung itu tidak makan lebih dari yang dibutuhkan. Mana ada manusia hanya makan hanya mengkonsumsi sesuatu yang tidak leahih dari ayang dia butuhkan. Mana manusia modern yang seperti itu. Jelek-jelek begini tanya sama Seno (kawan sebelahnya Emha), aku makan kurang dari yang saya butuhkan, makan saya tiap hari, bangga aku. Manusi modern itu yang paling tiadk rasional karena dia selalu makan lebih dari yang dibutuhkan dia mengkonsumsi barang dan lain sebagainya jauh dari yang dia butuhkan. Mereka beramai-ramai ke pusat perbelanjaan, beli barng-barang yang sebenarnya dia tidak butuh. Mereka termakan iklan. Jadi yang datang kesana itu bangkai-bangkai yang di remote control oleh Robby Tjahjadi, Liem Sui Liong, Williem, Ciputra. ya riggak. (eN2)

Mengapa Lulusan Perguruan Tinggi Harus Siap Pakai?

Sukadji Ranuwihardjo, mantan Dirjen Pendidikan Tinggi Depdikbud berpendapat bahwa hanya mereka yang tak memahami hakekat pendidikan tinggi akan menyatakan lulusan perguruan tinggi hanya siap latih bukan siap pakai. Dalam tulisan ini saya akan mencoba menjelaskan tentang mengapa hasil pendidikan PT harus siap pakai, tampa sama sekali bermaksud menyamai apalagi menandingi pernyataan Sukadji Ranuwihardjo (SR).

TUJUAN PENDIDIKAN

Pendapat SR tentang pen-didikan siap pakai sebenarnya mengingatkan kita akan tujuan pendidikan yang telah digariskan oleh pemerintah yaitu selain membentuk manusia seutuhnya, lulusannya harus siap pakai. Untuk mencapai tujuan itu, lalu kita mengenal tingkat-tingkat pendidikan sebagai berikut ; pendidikan sikap dan nilai kehidupan, yang dengan pendidikan ini diharapkan menghasilkan manusia yang berbudi luhur.

Pendidikan kewarganegaraan, dengan pendidikan ini diharapkan akan menghasilkan manusia Indonesia yang berakhlak baik. Pendidikan humaniora, bertujuan dapat menghasilkan menusia Indonesia selain warga negara yang baik juga akan menjadi manusia yang berbudaya. Pendidikan keilmuan, diharapkan akan menghasilkan manusia yang mengetahui hasil ilmu pengetahuan dan dapat berfikir ilmiah. Tetapi karena Pancasila merupakan sumber dari segala dimensi kehidupan bangsa Indonesia, pendidikan kitapun berdasar dari padanya. Ini penting ditekankan karena pendidikan memang bisa berdasar pada bermacam paham kehidupan. Misalnya pendidikan bisa saja berpaham komunis atau paham-paham lainnya.

SIAP PAKAI

Untuk mencapai tujuan kedua yaitu hasilnya siap pakai, kita mengenal pendidikan ketrampilan. Yang dalam perguruan tinggi disebut pendidikan keilmuan siap pakai. Sebetulnya semua pengetahuan pasti merupakan dasar sesuatu tindakan. Itulah sebabnya kita tak sulit menerima asumsi bahwa semua pendidikan sudah tentu hasilnya adalah berupa pengetahuan. Baik pendidikan di SD maupun di PT bahkan pendidikan di luar sekolah. Baik tukang talang yang mematri seng, tukang kayu yang membuat almari, atau seorang insiyur sekalipun yang memeras otaknya untuk memecahkan masalah banjir tahunan di daerah Tuban dan Bojonegoro itu, atau seorang filsuf yang duduk tercenung berfikir di belakang mejanya, semua itu sudah bekerja, sedang berpraktek.

Dalam kaitan inilah kita dapat memahami pernyataan SR bahwa hakekat pendidikan termasuk di PT adalah siap pakai. Untuk lebih dapat memahami pendidikan siap pakai yang sekaligus menjadi tujuan pendidikan nasional itu kita dapat membedakan praktek-praktek ilmiah sebagai berikut ;

Pure academic. Praktek ilmiah ini mencari pengetahuan demi pengetahuan. Inilah yang disebut praktek filsafati. Ilmuwan yang berpraktek demikian disebut the *makers reasonable*. Hasil praktek ilmiahnya yang dicapai tanpa suatu *frame of reference*, hanya didasarkan atas sejumlah postulat atau proposisi yang *self evident*. Data empirik yang dapat digarap tidak terbatas. Hasil kerjanya berupa teori-teori falsafi atau filsafat.

Oriented fundamental practice. Praktek ilmiah ini berangkat sebagian dari hasil riset akademik yang disebut paradigma. Karena dalam paradigma dilengkapi dengan metode yang sesuai, maka dicapailah hasil ilmu, yang disebut ilmu pengetahuan murni. Jadi praktek ilmiahnya sudah menggunakan patokan, atau yang dilengkapi dengan suatu *frame of reference*, yaitu bagian dari hasil riset akademik dan dilengkapi dengan teori atau hipotesis. Ilmuawan yang berpraktek demikian disebut the *ma-kers posible*.

Applied practice. Praktek ilmiah disini juga menggunakan patokan-patokan tertentu yang berupa sebagian dari hasil riset *oriented fundamental* menurut pilihan. Ditambah dengan teori atau hipotesis mengenai sesuatu hal atau bidang yang khusus, dan dengan menggunakan metode yang sesuai menghasilkan suatu pengetahuan terapan atau *applied knowledge*. Ilmu yang dihasilkan

disebut ilmu terapan. Pekerja ilmiah di bidang ini disebut *the makers to happen*.

Transfer of scientific knowledge tecnology. Praktek ilmiah disini ditambah dengan ketrampilan menghasilkan sesuatu yang kongkrit. Praktek ilmiahnya tidak menyusun teori lagi, tetapi yang diperlukan ialah ketrampilan. Di sini diperlukan praktikum, latihan untuk memperoleh ketrampilan yang mengubah *applied science* menjadi sesuatu yang kongkrit. Pekerja ilmiahnya disebut *the makers to pay*. Menurut uraian diatas dijelaskan bahwa hakekat pendidikan siap pakai, itu dapat siap pakai pada tingkat filsafi, pada orientasi yang mendasar tingkat ilmu murni, dan tingkat applied.

Ilmuwan dari semua tingkatan yang dihasilkan oleh PT itu dibutuhkan oleh masyarakat. Dan sebetulnya tingkat-tingkat itu bukan merupakan kategori yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya, tetapi itu merupakan suatu yang *kontinuan*. Akan tetapi untuk mencapai itu tidak mudah. Apalagi pendidikan hanya dapat menghasilkan ilmuwan yang siap pakai, harus ada pilihan, memberatkan pendidikan yang bersifat umum atau yang bersifat khusus. Terlebih mengingat tujuan pembangunan Indonesia dititikberatkan pada kesejahteraan masyarakat, maka yang harus ditekankan dan dipilih - dan ini harus dicapai- adalah pendidikan ilmuwan siap pakai dibidang teknologi. Untuk mencapainya harus ditopang dengan tiga bidang, yaitu pertama; penguasaan ilmu pengetahuan ditunjang dngan teori aplikasi teori ilmu dan filsafatnya, kedua; metode dan ketiga; praktikum untuk memperoleh ketrampilan.

Kalau toh masyarakat menilai, bahkan penilaian ini datang dari kalangan kampus termasuk pernyataan beberapa Rektor, bahwa hasil lulusan PT tidak siap pakai, hanya siap latih, barangkali karena perguruan tinggi terbatas atau minim dalam memperoleh/ mengembangkan praktikum untuk mendapatkan ketrampilan karena beberapa sebab.

J Indarto, Dosen Jurusan Sosiologi, FISIP UNS

POLITIK MAHASISWA DAN DEMOKRATISASI KEHIDUPAN KAMPUS

Mahasiswa merupakan ke-lompok " elite" pemuda yang mempunyai kesempatan untuk mengenyam pendidikan pada jenjang perguruan tinggi. Ke-elit-an inilah yang menurut Harold Laswell yang "merupakan sekelompok kecil masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan kerap kali menjadi penggerak atau dinamisator kehidupan masyarakat baik positif maupun negatif bila dilihat dari kacamata politis dan stabilitas nasional." Arti-nya bahwa sering gerakan dalam taraf gagasan dan kegiatan yang dilakukan menjadi acuan letupan untuk gerakan selanjutnya. Contoh permasalahan telah banyak kita lihat se-perti kasus tanah Rancamaya, Ke-dungombo, Nipah, perjudian SDSB, dan lain-lain, melibatkan unsur mahasiswa sebagai pembawa suara hati nurani rakyat.

Tidak sedikit mahasiswa yang mau melibatkan dirinya diluar tugas studinya, karena didorong kepedulian sosial pada masyarakat yang ditindas oleh ketidak adilan baik oleh kelompok masyarakat yang kuat ekonominya maupun yang mempunyai kedekatan dengan birokrat, bahkan oleh pihak keamanan dan birokrat sendiri dengan dalih pembangunan dan stabilitas nasional.

DIKOTOMI PERAN POLITIK MAHASISWA

Dimensi kemahasiswaan mempunyai fenomena yang unik, artinya bahwa sepak terjang mahasiswa dilandasi oleh idealisme yang jelas berbeda dengan kenyataan yang ada. Penonjolan idealisme dan rasionalisme mahasiswa sering berbenturan dengan kekakuan norma perundangan dan persepsi yang salah yang dilakukan oleh para "orang tua" atau birokrat sebagai pelaksana perundangan yang ada.

Disinilah titik kritis permasalahan yang akan menyeret mahasiswa pada posisi dipersimpangan jalan, yaitu akan murni hidup di alam idealis, realistis atau bahkan berupaya mengatur strategi untuk menggabungkan kedua alam yang kontradiktif tersebut.

Kebimbangan posisi mahasiswa akan bertambah komplek ketika kita mempersoalkan "hak politik" mahasiswa. Suara keras, aksi turun jalan, kajian ilmiah perpolitikan telah digelar, namun sayang kondisi ini tidak merubah keadaan, justru oleh oknum birokrasi dimanfaatkan untuk lebih "menekan" mahasiswa pada"kewajiban studi" jauh dari dinamika politik kenegaraan dan kemasyarakatan.

Dikotomi dunia perpolitikan mahasiswa terjadi dengan adanya gerakan politik mahasiswa yang dine-

tralisir dengan berbagai dalih. Di sisi lain mahasiswa diharapkan mempunyai kualitas politik tertentu setelah mereka terjun dalam kehidupan kemasyarakatan. Padahal fenomena yang muncul adalah adanya kecenderungan "kaderisasi politik" mengalami kemandulan pada jalur/lembaga formal atau bahkan dijalur pendidikan itu sendiri. Anehnya lagi ! institusi politik dinegara kita mengalami transformasi nilai karena pengembangan sumber daya politiknya "terkotak-kotak". Ditambah lagi "sistem rekruting elit politik" yang dilakukan dikotori oleh "budaya nepotisme". Muara fenomenologis dari permasalahan ini adalah kelompok elit politik di masyarakat adalah keluarga dari elit birokratif yang memegang kekuasaan politik maupun ekonomi.

Tersumbatnya proses kaderisasi politik dari kelompok masyarakat biasa ini yang menimbulkan gerakan reaktif terhadap kondisi perpolitikan sekarang. Muara dari permasalahan ini adalah timbulnya apatisme politik, reaksi menumbangkan establisme sistem politik atau bahkan krisis kepercayaan masyarakat terhadap elit politik yang ada. Pada posisi inilah mahasiswa kita berada, sehingga mahasiswa sering terjebak dalam ritualisme gerakan politis yang hanya sekedar letupan emosional untuk menaggapi persoalan tertentu, tidak pada hakekat dari permasalahan yang diperjuangkan. Ironisnya, ritualisme dalam diri mahasiswa didasarkan pada "kebimbangan" antara studi dan persoalan pasca kemahasiswaanya (dunia kerja), bukan pada hakekat penumbuhan kualitas manusia yang utuh.

FENOMENA NORMATIF PENDIDIKAN POLITIK MAHASISWA

Kampus merupakan lembaga tertinggi dalam jenjang pendidikan masyarakat yang berfungsi untuk menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan/atau menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian (UU Sistem Pendidikan Nasional No. 2/1989 : pasal 6 : 1). Dari klausula perundangan tersebut tidak disuratkan bahwa lembaga pendidikan tinggi menyiapkan kader-kader politik yang handal, sebab mahasiswa hanya dipersiapkan menjadi ilmuwan atau profesional bidang tertentu. Sebab diakui atau tidak bahwa kata "politik" masih menimbulkan persepsi negatif dikalangan birokrasi apabila diterapkan di kampus. Trauma sejarah adanya gerakan politik mahasiswa di kampus yang menimbulkan pertentangan antar kelompok politik dan bahkan disinyalir adanya "goverment student" atau "DPR jalanan" pada waktu masa transisi orde lama ke orde baru. Dari sinilah akhirnya timbul kebijakan yang menjauhkan mahasiswa pada kehidupan politik praktis. Tidak hanya di Indonesia tetapi dinegara maju pendidikan politik bagi mahasiswa disamarkan dengan menggunakan berbagai istilah contoh di Amerika disebut *"social studies"* yang memuat kombinasi sejarah, geografi, civics dan ekonomi. Di Inggris disebut *"civics"*, social education", dan *"social science education"* sedangkan di Perancis dan Italia dipakai istilah *"law"* atau *"philosophy"*.

Inilah kondisi kehidupan politik mahasiswa dan masyarakat pada umumnya yang secara sistematis dan sadar dijauhkan dari kenyataan politik yang melingkupinya. Bahkan alasan pembenar dari kondisi itu adalah dalih pembangunan dan stabilitas nasional. Jawaban sementara kondisi ini adalah kewajaran bagi negara yang sedang berkembang seperti Indonesia ini, namun tidak wajar apabila kita kaitkan kondisi ini de-ngan kehidupan mahasiswa yang mempunyai predikat sebagai penerus perjuangan dan kepemimpinan masa depan, sebab arah dari kondisi ini adalah terbentuknya kader yang dikatrol, pendangkalan makna perjuangan/pembangunan, dan ketidaksiapan mahasiswa nantinya memegang tongkat estafet sejarah negara dan rakyatnya.

Dari gerakan mahasiswa 66 dan 74 ada beberapa kondisi yang dapat diambil sebagai pelajaran :

1. Depolitisasi kehidupan kampus, dimana semula mahasiswa bebas melakukan aktivitas politik di kampus dan partai politik dapat menembus kehidupan kampus, sehingga sering menimbulkan pertentangan antar kelompok partai politik di dalam kampus. Kondisi inilah yang dilarang oleh pemerintah sebab akan mengganggu kehidupan kampus, stabilitas, dan proses percepatan alih ilmu pengetahuan dan teknologi. Sehingga timbulah gerakan birokratif untuk memurnikan kembali kehidupan kampus pada nuansa ilmiah murni.
2. Diberlakukannya NKK/BKK yang mengatur kegiatan intrakurikuler, dimana Dewan Mahasiswa yang waktu itu turut terlibat aktif dalam pengambilan kebijakan kampus dan bahkan mempunyai pengaruh kuat terhadap kebijakan birokrasi dihilangkan dan digantilah dengan dibentuknya senat mahasiswa yang hanya berfungsi sebagai koordinator kegiatan kemahasiswaan yang jauh dari kegiatan politis.
3. Munculnya pro dan kontra antara mahasiswa, pemerintah dan mi-liter tentang "pemurnian kembali fungsi kampus" sebagai wahana belajar/akademik mahasiswa tanpa diiringi dengan aktifitas politis mahasiswa. Sehingga disadari se-

cara perlahan dan pasti pemerintah dan militer mampu menetralisir dengan dalih bahwa politik mahasiswa dapat dilakukan diluar kegiatan intrakurikuler, disamping dalih pembangunan dan stabilitas.

Fenomena ini memunculkan pertanyaan bagaimana sistem yang tepat dalam memberikan pendidikan politik yang tepat bagi mahasiswa yang tetap menjaga makna dan fungsi kampus sesuai dengan tuntutan dunia dewasa ini. Pendidikan politik mahasiswa memang diarahkan untuk memberikan bekal tentang nilai dan norma Pancasila sebagai ideologi bangsa secara kritis rasional dan normatif yang diharapkan akan dimanifestasikan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Sehingga keberhasilan pendidikan politik bagi mahasiswa melihat norma tersebut dapat dilihat seberapa jauh mahasiswa menghayati dan mengamalkan nilai luhur Pancasila dan UUD 45 dalam kehidupannya serta menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsanya. Dengan kondisi diatas sementara ada pihak yang mengatakan itu adalah sloganistis, tujuan otopis dan lain sebagainya.

Melihat strategisnya posisi dan peranan mahasiswa dalan kehidupan dinamika kampus dan masyarakat maka perlu pendidikan politik yang tepat bagi mereka untuk persiapan kehidupanya sebagai kader masa depan. Menarik apa yang dikemukakan oleh Dr. Alfian bahwa : " Keberhasilan pendidikan politik antara lain di tentukan oleh adanya sustu persepektif yang jelas yang bisa diperoleh melalui dua dimensi. Dimensi pertama berupa gambaran jelas tentang sistem politik ideaL yang diinginkan. Dari situ akan kelihatan apa-apa yang sebenarnya yang dituntut oleh sistem politik ideal itu dari masyarakat yang menginginkannya. Dimensi kedua ialah realitas atau keadaan sebenarnya dari masyarakat itu sendiri yang langsung bisa diperbandingkan dengan tuntutan-tuntutan sistem politik ideal tadi. Melalui perbandingan itulah akan diperoleh suatu persepektif yang jelas bagi pendidikan politik yang selanjutnya akan dapat dipakai untuk memutuskanya".

Berdasar pendapat tersebut kenyataan yang ada pada lingkungan kampus sering terjadi persepektif yang bermacam-macam tentang kasus sosial politik yang mereka perjuangkan. Kasus pembebasan tanah, penggusuran ,edagang, pendekatan keamanan, penerapan kehidupan organisasi kemahasiswaan (senat mahasiswa), pengambilan kebijakan pimpinan universitas dan lain-lain semua dirasakan berbeda antara harapan dan kenyataanya. Ironisnya saluran dialog dari kedua belah pihak tidak terjadi sehingga sering terjadi unjuk rasa, pembentukan kelompok solidaritas, pengiriman surat protes yang kesemuanya diarahkan untuk mencabut/ merubah/ didudukannya kembali apa yang dirasakan menyimpang oleh mahasiswa. Ini yang belakangan menggejala dikalangan mahasiswa, dan ironisnya mahasiswa sering terpojok/kalah sebab tidak dibekali kematangan konsep dan data yang akurat dari permasalahan yang diperjuangkan.

Ada beberapa langkah alternatif dan sistematis yang dapat dilaksanakan untuk memberikan pendidikan politik pada mahasiswa

sehingga mereka sadar akan hak dan kewajibanya serta memberikan bekal pada peningkatan kualitas mahasiswa sesuai dengan predikatnya sebagai kader penerus perjuangan dan kepemimpinan masa datang, langkah tersebut adalah :

1. Memberi muatan ideal sistem politik pada mahasiswa secara formal dalam kurikulum dan bersangkutan masalah kenegaraan, kemasyarakatan, pembangunan, dan perbandingan sosioculturalpolitis dengan negara lain.
2. Dialog secara langsung dan terbuka tentang permasalahan- permasalahan politik yang ada dilapangan dengan pihak pengambil kebijakan, ahli dan pelaku dilapangan, serta menampung aspirasi mahasiswa terhadap masalah yang terjadi.
3. Mengembangkan dan memberi kemudahan segala aktivitas kegiatan mahasiswa dalam bidang minat, bakat dan penalaran yang pada akhirnya akan memberikan ruang gerak keterbukaan dan lingkungan kampus yang dinamis dalam kerangka tanggung jawab kebersamaan.
4. Komitmen dan konsistensi terhadap kebebasan mimbar, kebebasan akademik, didalam kampus mesti ditegakan secara otonom sejalan dengan perubahan zaman, sehingga terjadi tranformasi informasi yang cepat, yang pada akhirnya akan merubah penalaran dan sikap mahasiswa secara objektif rasional pada kondisi sekarang dan perkiraan masa datang.

Mahasiswa sebagai objek dan subjek didik di perguruan tinggi mempunyai tanggung jawab untuk mengkondisikan keterbukaan, kebebasan dan keluasan suasana pengembangan diri, ilmu pengetahuan dan teknologi untuk pengabdian masyarakat dan pembangunan bangsanya. Namun perjuangan ini tidak hanya dilakukan oleh mahasiswa saja tetapi juga harus diiringi oleh tenaga edukatif, administratif, birokrasi kampus dan instansi eksternal yang terkait harus juga mengalami perubahan persepektif dan orientasi pada pengembangan mahasiswa sebagai kader masa depan. Dengan upaya ini diharapkan terjalinnya keharmonisan dalam kehidupan kampus yang akan membawa nuansa demokratisasi kampus yang mampu mengintegrasikan penalaran, sikap dan tingkah laku mahasiswa dalam pembangunan.

Integritas antara daya nalar, sikap dan tingkah laku inilah yang menjadi landasan dasar keberhasilan pengembangan keterbukaan kehidupan kampus. Keluasan cakrawala dan kemampuan membandingkan *sosio-culturpolitis* mahasiswa juga memberikan andil akan langkah strategis mahasiswa dalam menjalankan perannya. Pada tahapan ini mesti didukung oleh sistem kebijakan dari birokrat secara luas dan dukungan dari lembaga eksternal lainnya. Namun dinamika kehidupan kampus mesti dijaga agar tidak terjadi stagnasi gerakan mahasiswa, sebab kalau terjadi akan memandulkan kampus sebagai lembaga ilmiah yang mempersiapkan kader masa mendatang demi pembangunan bangsa ini.

Agung Sudjatmoko
Mahasiswa FKIP UNS

Mas Marjükun

Anna Chrisna Gurnandy

Ini semua gara-gara teman lama itu. Dialah yang membuat saya tiap malam begadang di warung tenda mie ayam di trotoar ini. Saya berharap malam ini dia datang. Teman lama itu menjanjikan pekerjaan untuk saya. Rasanya sudah saatnya saya berhenti menggantungkan biaya kuliah dari orang tua.

Seperti biasa, istri penjual mie ayam itu segera menyodorkan semangkuk mie ayam mengepul, begitu gerakan jemari saya mulai kacau mengetuk-ngetuk pinggiran meja. Mendekatkan sambal, saus dan toples acar. Suaminya sibuk memompa petromaks. Kaos lampunya hampir mengarang. Saya menyantap mie ayam dalam gelap. Beberapa kali sumpit di tangan saya mencelat. Bukan apa-apa. Saya memang tidak bakat keren, selalu gagal menggunakan sumpit.

Kemudian seperti acara ritual, saya mulai ngobrol ngalor ngidul dengan pasangan suami istri penjual mie ayam itu. Mulai dari obrolan tentang cuaca awal musim penghujan yang menyengkelkan, sampai ketoprak Siswo Budoyo yang ndak jadi main di Pamedan Mangkunegaran, buntutnya ngrasani mahasiswa yang suka ngutang di warung mie ayam ini. Obrolan itu selalu menimbulkan kecerian tersendiri di hati kami.

"Yaa, wajarlah kalau mahasiswa yang ngutang," Mas Marjikun, pemilik warung itu mendapat kesempatan pertama berkomentar. "Lha, yang ndak wajar itu kalau Rektor yang ngutang mie ayam. He he he ...."pecah tawa mas Marjikun. Dari raut mukanya, dia nampaknya senang betul bisa melontarkan lelucon itu.

Istrinya juga tertawa senang. Bahkan menghentikan tangannya yang menyedu kopi susu untuk saya. Sejenak saya lupa orang yang saya tunggu. Terhibur oleh joke mas Marjikun.

"Memang Rektor ndak boleh ngutang?" Istri mas Marjikun menimpali, "Bilang sama pak Rektor, kalau mau ngutang datang saja ke warungku. Dijamin puas. Ndak bayar juga ndak papa."

"Eh, ndak bisa!" libas mas Marjikun. "Ndak bisa! Itu namanya kita memanjakan pejabat. Apa-apa dikasih fasilitas, dikasih keistimewaan. Sampai makan mie ayam saja kita yang mensubsidi. Bisa mandul nanti ...."

"Ha ha ha!" hati saya tergelak mendengar kesewotan laki-laki berkumis yang mirip Cak Nun itu. Dalam beberapa hal, penjual mie ayam itu memang persis penyair yang otaknya tak pernah aus itu. Paling tidak mas Marjikun yang ngotot memirip-kan diri dengan dia. Tanggung kalau cuma mirip di kumis saja. Sekalian mirip semua omongannya. Begitu mungkin yang ada dibenak lelaki setengah baya itu.

Sejenak saya lupa, apa yang ingin saya omongkan, gara-gara kesengsem mengamati kumis mas Marjikun yang subur.

"Kenapa kamu tertawa?" Mas Marjikun menelisi saya. Istrinya menyodorkan segelas kopi susu. Kepulan aroma kopi bercampur susu segera menjernihkan otak saya kembali.

"Omongan mas Marjikun tadi!" Saya ingat. Tambah semangat tawa saya. "Mas Marjikun nggak usah sewot. Pak Rektor itu tahu kalau sampeyan melarat. Nggak usah ditang, lama-lama juga bangkrut sendiri. He he he ...."

"Eeeeh!"

"Lagi pula malu kalau pak Rektor ngutang mie ayam. Ngutangnya pasti yang lebih mahal."

Meledak tawa mas Marjikun. Melebihi frekuensi gelombang tawa saya. Heran, orang satu ini kadang tampak aneh. Sepertinya selera humor yang dia miliki terlalu tinggi. Untuk orang biasa kalimat saya pasti cuma ditanggapi dengan senyum ala kadarnya. Paling tidak senyum basa basi untuk menghargai mulut saya yang terlanjur membuka. Tapi mas Marjikun tidak. Dia tertawa geli. Seolah dia mampu memaknai dibalik ucapan saya.

Saya meringis. Sudah tiga malam ini saya nongkrong di warung tenda mas Marjikun. Sudah sering saya ngobrol dengan dia, maupun dengan istrinya. Mulanya saya tidak suka dengan laki-laki yang nampak lusuh itu. Matanya terlalu tajam untuk seorang penjual mie ayam. Dan kebiasaannya membetulkan sarungnya yang suka melorot membuat saya jengah. Mas Marjikun memiliki kumis japlang. Dahinya agak lebar. Padahal mas Marjikun itu paling-paling cuma lulusan SMP. Mungkin bahkan SD saja tidak tamat. Dia cuma penjual mie ayam yang mangkal dekat kampus. Barangkali karena sering bergaul dengan anak-anak kuliahan, ia ketularan gaya mereka yang sok pintar. Ngomongnya melambung tinggi. Bahkan kadang seperti skripsi, pakai mengutip pendapat ahli disana-sini.

Saya tengok arloji. Hampir pukul sepuluh. Istri mas Marjikun sudah mulai menguap. Mas Marjikun mencari gelombang wayang kulit. Terdengar Anom Suroto sedang memainkan Limbuk Cangik. Mas Marjikun tertawa terpingkal-pingkal. Limbuk sudah kursus komputer. Sudah ikut seminar Implikasi Peran Ganda Wanita. Limbuk sudah pandai menasehati. Mas Marjikun semakin tergelak-gelak. Istrinya memberengut. Pelan-pelan mewyingkir kepojokan. Mencari tempat nyaman untuk terkantuk-kantuk.

Saya teringat drama Waiting for Godot-nya Samuel Beckett. Seperti itulah saya. Ditekan rasa tak menentu karena menunggu. Tapi saya bukan menunggu sesuatu yang tak berujud. Saya sedang menunggu

teman lama yang menjanjikan pekerjaan.

Seorang laki-laki gondrong memasuki warung. Saya kira orang yang saya tunggu. Ternyata dia hanya memesan es batu untuk dibawa pulang. Kemudian datang lagi seorang. Membawa persoalannya sendiri. Saya mulai jengah. Kopi susu yang tinggal lethekan itu saya teguk tandas.

"Edaaan ....!" Mas Marjikun tiba-tiba berseru. "Wayang-wayang ini makin hari semakin pintar saja." decaknya kagum. Kepalanya menggeleng-geleng seperti bangau. "Yang namanya Limbuk itu waktu saya kecil bisanya cuma sambat bagaimana caranya supaya cepet dapat jodoh. Wajah jelek ndak jadi soal, asal setia sampai mati. Eee, sekarang ndak. Limbuk maunya yang bagus, sugih, mantore akeh. Ha ha ha ...."

Saya tidak tertarik jokenya.

"Kamu kok diam?" Mas Marjikun usil.

"Jamannya memang begitu."

"Begitu gimana?"

"Ya, begitu."

Mas Marjikun tidak puas dengan jawaban saya. "Ayolah, kamu kan mahasiswa, jangan kasih jawaban apatis begitu dong."

"Yang pinter itu dalangnya, mas. Wayangnya dari dulu ndak pernah berubah. Wayangnya tetap bodoh, wong memang ndak pernah disekolahkan. Bahkan kalau ada satu wayang yang pinter harus segera dimatikan. Dosanya apa? Yaa, karena dalang ndak mau kalau wayang-wayangnya lebih pinter." Tau-tau saya nyerocos seperti itu.

"Waaah."

"Sampeyan ingat ndak, sebuah lagu kanak-kanak?"

"Yang mana?" Mas Marjikun terjingkat. Semangatnya melambung. Sekuat tenaga dia berusaha menggali kenangannya tentang lagu kanak-kanak yang dihapalnya. Tapi tak berhasil rupanya. Mas Marjikun menggeleng pasrah.

Saya mulai asyik menyanyikan lagu sambil mempermainkan kelima jari. "Jenthik ...jenthik, si Penunggul patenana." Saya menggoyang-goyangkan jari manis. "Gek dosane apa?" jawab si kelingking saya. "Dosane ngungkul-ngungkuli." Bergoyang lagi si jari manis. "Aja, dhi ...aja, dhi, sedulur tuwa kuwi malati." Saya gerak-gerakkan telunjuk. "Bener-bener, ager-ager enak segeer ....!" Akhirnya saya menggoyang-goyangkan ibu jari. Mas Marjikun tertawa tergelak-gelak karena kegirangan. Dia senang bisa mengikuti nyanyian itu sambil membuat sandiwara kecil dengan kelima jarinya. Kami berdua tertawa gembira. Lagu kanak-kanak yang diajarkan orang tua dulu saat mengaso membuat kami terhibur.

"Dulu kakekku yang mengajari nyanyi begini!" seru mas Marjikun, "aah, kamu membuat aku jadi ingat masa kecil."

Kami tertawa bersama. Indah.

Malam kian larut. Degup jantung kota yang tak pernah tidur itu kian lemah. Istri mas Marjikun telah tertidur sambil ngorok dengan suaranya yang halus. Siaran wayang kulit makin sering terhenti, karena operatornya ngantuk. Namun orang yang saya tunggu belum juga muncul.

"Ayo, kita bicara soal filsafat si Penunggul." usik mas Marjikun.

"Ah, sudahlah. Saya kemari bukan ingin ngomong." tukas saya. "Saya sedang menunggu seseorang. Kalau mas Marjikun ingin diskusi, pergi ke tukang bakso sebelah saja." Hilang sopan santun saya. Mungkin terbawa kejengkelan hati menunggu teman lama yang tak kunjung muncul.

Mas Marjikun tersenyum arif. "Kalau sama tukang bakso itu aku cuma bisa ngobrol soal harga brambang bawang di pasar. Aku ingin tahu soal lain, yang lebih intelek. Makanya aku bikin warung dekat kampus. Aku ingin sekolah dari kalian."

"Sudahlah, mas Marjikun jangan ndagel."

"Aku serius."

"Lalu, apa maunya mas Marjikun?"

Laki-laki setengah baya itu menggaruk dahinya sekilas. Ujung telunjuknya ditempelkan pada mulutnya. Ia menggumam. "Mmm ... begini saja." Mas Marjikun menjentikkan jarinya. "Kita bikin perjanjian bilateral."

"Maksudnya?"

"Sebentar, aku jelaskan dulu." Mas Marjikun duduk persis dihadapanku. Lagaknya persis seperti seorang panglima perang yang akan mengatur strategi pertempuran. "Kamu kan sering datang kemari, ya?"

Saya mengangguk. Seperti dihipnotis, saya terseret permainan yang dibuat mas Marjikun.

Setelah beberapa jenak terpekur, mas Marjikun berucap, "Perjanjiannya aku tetapkan seperti ini." Mas Marjikun menyikut lengan saya. "Kamu dengarkan, ya?" Setiap kali kami makan mie ayam disini, kamu harus menerangkan kembali pelajaran yang kamu dapat dari kuliahmu padaku. Dan kamu boleh makan gratis sampai kenyang. Bagaimana? Ini namanya simbiosis mutualisma. Aku dapat ilmu dari kamu. Kamu dapat makan gratis tiap hari. Setuju ?"

Saya terpekur. Persis dibawah cahaya lampu petromaks. Mas Marjikun yang berada dibalik jangkauan cahaya itu nampak bagaikan silhouette sosok misterius. Setiap kali saya lihat wajahnya, dia nampak berubah-ubah. Sebentar seperti Togog yang jenaka. Sebentar seperti Puntodewo yang bijaksana. Sebentar seperti .... "Baik, saya setuju." Saya segera menyahut, sebelum wajah mas Marjikun nampak seperti wajah almarhum bapak saya, yang saat men-

inggal menginginkan anaknya menjadi sarjana.

***

Sosok mas Marjikun kian misterius bagi saya. Jika saya terketuk untuk selalu datang ke warungnya, itu semata karena rasa penasaran saya terhadapnya. Disamping itu saya harus menepati perjanjian yang kami buat.

Namun malam berikutnya saya sedang sial. Saya tidak melihat mas Marjikun ada di warungnya. Alhasil, niat saya untuk makan gratis juga kandas. Sebagai gantinya saya melihat seorang laki- laki muda berpakaian rapi sedang duduk dengan sikap santun di bangku warung itu.

"Selamat malam." Laki-laki itu menyapa saya.

"Selamat malam juga." Saya perhatikan laki-laki muda itu. Umurnya sebaya saya. Tapi ia jauh lebih rapi. Kemeja dan celananya nampak baru diangkat dari papan setrika. Rambutnya harum. Bau pomade Kenzo yang khas. Sepasang kakinya dibungkus sepatu. Tangannya mengepit sebuah map.

"Mas menunggu teman, ya ?" Saya mencoba akrab.

"Tidak."

"Mau makan ?"

"Oh, ndak."

"Lantas ?"

"Saya mau konsultasi."

"Konsultasi ?" Saya geli. "Konsultasi apa ?"

"Konsultasi skripsi. Begini, pak Marjikun, pemilik warung ini adalah dosen pembimbing skripsi saya. Beliau bilang saya boleh menemuinya kapan saja di warungnya."

Saya terlongong. Entah bagaimana rupa wajah saya saat ini. Yang jelas perut saya yang keroncongan setengah mati menuduk jadi kenyang. Kuliah yang ingin saya terangkan kembali pada mas Marjikun mendadak ambyar. Lalu, entah mendapat dorongan dari mana, saya mengambil langkah seribu.

***

Tentang Penulis:

Anna Chrisna Gurnandy, kelahiran Solo 29 Januari 1973, sejak 1992 kuliah pada Jur. Sastra Inggris Fakultas Sastra UNS. Aktif dalam kegiatan teater selain juga menjabat sebagai redaktur Majalah Kalpadruma FS UNS. Di bangku sekolah dasar sudah menulis puisi serta pernah menjuarai beberapa lomba penulisan/ baca puisi di Jawa Tengah. Sementara karya-karya cerpennya banyak dipublikasikan berbagai media massa.

Tahukah anda
yang lebih penting dari
Bahkan hukum pun
tak lepas dari
UANG
DIPERSEMBAHKAN OLEH KENTINGAN UNTUK KEADILAN HUKUM INDONESIA TERCINTA

REFUNGSIONALISASI WACANA KKN

Problema Kasustik dan Analisisnya

Diskursus Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang sudah 20 tahun diprogramkan dengan mahasiswa sebagai aktor dan perguruan tinggi (PT) sebagai lembaganya telah menjadi polemik yang menghangat kembali. Alasannya adalah disamping KKN mempunyai *unikum-unikum* sekitar romantisme, *kejumudan* bahkan rutinitas belaka, di sisi lain juga menuntut adanya pembenahan kembali akan fungsi-fungsi yang melekat didalamnya. Artinya KKN yang dilaksanakan mahasiswa sebenarnya menjanjikan banyak pembelajaran yang positif bagi mahasiswa dan pemberdayaan (*empowerment*) bagi masyarakat.

Visi KKN yang diantaranya adalah memberikan pengalaman belajar tentang pemba-ngunan masyarakat dan pengalaman kerja nyata pembangunan, mendewasakan kepribadian mahasiswa dan memperluas wawasan, memacu pembangunan masyarakat dengan menumbuhkan motivasi dan kekuatan sendiri serta mendekatkan perguruan tinggi pada masyarakat yang merupakan salah satu bentuk konkrit pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Adalah sebuah realitas sejarah ketika dalam pelaksanaannya KKN semakin dihadapkan kepada permasalahan yang melingkar (*vicious circle*) yang disebabkan oleh banyak faktor. Diantaranya adalah (1) model dan strategi pembangunan nasional semakin dituntut untuk dapat menjangkau *social needs* dan berfungsi sebagai strategi pemberdayaan, (2) tingkat pendidikan masyarakat dan pesatnya arus informasi yang semakin membaik, (3) potensi geografis, struktural dan kultural masyarakat yang berpenganuh pada sistem sosialnya.

Dari faktor-faktor tersebut secara dinamis berjalan beriringan dengan entitas masyarakat yang dipengaruhi oleh faktor informasi, yang kesemuanya mengisyaratkan adanya modernisme yang bertendensi pada semangat konsumerisme dan kebaharuan-kebaharuan ide yang belum tentu masyarakat memiliki cukup kesiapan menerimanya.

Kembali pada visi KKN yang berbasis pada komitmen mahasiswa atas adanya Tri Dharma Perguruan Tinggi, maka secara otomatis (*conditio sine quanon*) mahasiswa tidaklah menjalankan rutinitas an sich apalagi pelaksanaan KKN menjadi jumud dengan selalu berdasar pada pelaksanaan KKN sebelumnya yang akhirnya akan memperparah mentalitas masyarakat dan mahasiswa sendiri. Hal ini bisa terlihat dari pengamatan pelaksanaan KKN diberbagai daerah, dimana masyarakat beranggapan bahwa dengan adanya KKN berarti ada pembangunan fisik yang didanai dan dilaksanakan oleh mahasiswa padahal mahasiswa tidak memiliki dana yang cukup, pada gilirannya nanti permasalahan ini akan semakin besar dan kompleks.

Permasalahan diatas muncul akibat lemahnya *elan* vital dan interpretasi mahasiswa untuk menterjemahkan kedudukan, fungsi dan peranannya dalam masyarakat. Fatalnya lagi adalah dilaksanakannya proyek fisik yang monumental menjadi *image* dan obsesi mahasiswa dengan alasan klise untuk mendapatkan perhatian khusus dari masyarakat dengan pihak perguruan tinggi. Yang setelah itu sepertinya selesai dengan luntas dan tak berdampak. Maka tidak salah jika akhirnya muncul jargon-jargon sekitar KKN, misalnya *Kisah Kasih Nyata, Kesana Kesini Ngeceng, Kuliah Kurang Nyata, Kumpul-Kumpul Nganggur, Ke-sini Karena Nilai* dan banyak lagi yang bernada minor.

Hal tersebut jika tidak segera diantisipasi dengan tindakan yang subtansial akan menjadi bumerang bagi pembangunan nasional. Alasannya adalah KKN telah mengalami sublimasi dengan pendidikan yang mengarah pada mental peminta dan berdampak mental inferior. Hal ini dialami oleh mahasiswa dengan menawarkan proposal dengan berbagai imbalan dan pada masyarakat yang menghendaki pemberian. Anggapan ini tetap bisa dibenarkan mengingat mahasiswa sebagai kelompok strategis tidak bisa memberikan penyadaran dan pemberdayaan.

Memformat Kembali Fungsi KKN

Adalah wajar adanya jika KKN yang sudah dua dasawarsa (dilaksanakan sejak tahun 1976/1977 untuk semua PTN diseluruh Indonesia) melakukan otokritik terhadap semua rutinitas dan kebekuan ini, mengingat pola dan struktur kehidupan masyarakat sudah berbeda dan variatif yang diakibatkan oleh perubahan kondisi sosial, ekonomi dan politik serta peran arus informasi.

Sebenarnya selama ini kita telah mengenal program pemerintah yang menyangkut masalah pembinaan pedesaan, selain KKN, seperti ABRI Masuk Desa (AMD) dan sekarang Inpres Desa Tertinggal (IDT). Dengan adanya tiga perlakuan tersebut dapat disimpulkan bahwa kegiatan yang mengarah pada pembinaan desa selama ini tidak mengenai sasaran yaitu peningkatan kesejahteraan (penulis mengambil paradigma kesejahteraan dari IDT) dengan konsep, strategi dan taktik yang tepat, yang bertujuan untuk penguatan dan pemberdayaan masyarakat yang telah sekian lama hidup dalam kondisi marginal dan periferal.

Program KKN jika masih bisa disebut sebagai garda depan pengabdi masyarakat yang bernilai ganda maka sekaranglah saatnya memanage kembali pelaksanaan KKN dengan format yang jelas. Hal ini bisa dilimitkan dengan adanya sinergi kerja antara lembaga perguruan tinggi, pemerintah daerah, lembaga dana dan mahasiswa KKN itu sendiri yang gerak langkahnya selalu mengacu pada misi pembangunan nasional Indonesia yaitu terciptanya kualitas masyarakat yang maju dan mandiri.

Memang konkritisasi atas makna pengabdian adalah pekerjaan yang tidak mudah apalagi dengan waktu dan semua yang serba terbatas. Maka untuk menindaklanjuti permasalahan tersebut diperlukan sebuah forum yang khusus yang dihadiri oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan permasalahan ini untuk meninjau kembali pelaksanaan KKN yang disesuaikan dengan perkembangan masyarakat serta selalu melihat aspek struktural dan kultural yang ada.

Yanuar Ahmad Ichsanuddin
Mahasiswa FISIP UNS '88
Mantan Korcam KKN Wonosegoro Boyolali 1993

KOMPENI, AKSI LAGI, AKSI LAGI

Kelompok pejuang otonomi kampus, KOMPENI (Komite Mahasiswa Penegak Otonomi), mengadakan aksi menggugat biaya pendidikan yang semakin tinggi yang diantaranya ditandai dengan semakin tingginya SPP dan adanya sumbangan IOM.

"Jangan Peras Orang Tua Kami", "Hapuskan IOM", "Turunkan SPP" demikian bunyi sebagian poster yang digelar dalam aksi tersebut.

Aksi tersebut diadakan 13 Agustus lalu bertepatan dengan hari pertama masuknya mahasiswa baru. "Aksi ini utamanya kami tujukan untuk kampanye politik dan sosialisasi kepada mahasiswa baru agar mahasiswa baru nantinya tidak cuma diam", jelas koordinator aksi kepada KENTINGAN.

Namun, mahasiswa baru tampaknya tidak berani ikut terlibat dalam aksi. Banyak diantara mereka yang langsung pulang. Rupanya mereka sudah diwanti-wanti untuk menghindari aksi tersebut.

Sebulan berselang kemudian, kompeni kembali mengadakan aksi. Kali ini mereka mengambil format aksi yang lain yaitu dengan berjalan pawai mengelilingi kampus yang diakhiri apel siaga Sumpah Mahasiswa. Aksi dimulai pukul 09.00 wib dari kampus FKIP lalu melewati FH, FISIP, FE, FS dan berakhir di boulevard kampus. Sepanjang jalan mereka tidak meneriakkan yel-yel sebagaimana biasanya namun hanya diam sambil mengacung-acungkan atau mengalungi poster-poster yang dibawa.

Di bagian depan barisan terpampang spanduk bertuliskan Cabut SK Mendikbud No 0457/U/1990. Format aksi seperti ini terhitung yang pertama sejak kelahiran UNS. Turut mendukung aksi ini adalah mahasiswa UNIBA Surakarta yang menampilkan happening art serta sejumlah mahasiswa dari kota lain dan kalangan buruh.

Dalam pernyataan sikapnya yang ditujukan kepada Mendikbud, KOMPENI menyatakan ; cabut SK Mendikbud No 0457/U/1990 tentang tata urutan lembaga kemahasiswaan intra kampus; tegakkan otonomi kampus dan menolak segala bentuk intervensi ke dalam kampus; serta tegakkan organisasi mahasiswa yang bebas, independen dan demokratis.

"Perjuangan belum selesai, kawan!" kata salah seorang pendukung KOMPENI menutup aksi. (yan)

UNS PUNYA REKTOR BARU

Setelah memimpin UNS sejak 5 Nopember 1986, akhirnya Prof. Dr. Koento Wibisono Siswomihardjo harus pulang kandang ke Fakultas Filasafat UGM. Dan sesuai Keputusan Presiden Nomor 2/M/1995 bertanggal 6 Januari 1995, diangkatlah Prof. Drs. Harris Mudjiman, MA, Ph.D untuk menjabat sebagai rektor baru UNS masa bakti 1995-1999.

Boleh jadi suksesi kali ini adalah hal yang sangat penting bagi UNS dalam hal asal orang yang memim-pinnnya, sebab Pak Harris, panggilan orang nomor satu UNS kini itu, adalah "orang dalam" UNS sendiri, bukan drop-dropan seperti tiga rektor sebelumnnya. Terhitung sejak tahun 1969, beliau menjadi dosen di IKIP Surakarta, dan setelah melebur menjadi FKIP UNS, Pak Harris tetap setia dengan program studi Geografinya, 1976 hingga kini.

Dalam pidato sambutannya setelah upacara pelantikan, 31 Januari 1995 lalu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI mengingatkan rektor baru untuk lebih meningkatkan kekompakkan diantara seluruh unsur pimpinan dan civitas akademika UNS sehingga program kerja yang disusun dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, dengan hasil yang maksimal. Dan dengan sumber dana yang terbatas seperti sekarang ini, agar fasilitas yang ada, yang diadakan dengan investasi yang sangat besar (termasuk hutang luar negeri) dapat dimanfaatan secara efisien.

Ketika ditanya wartawan tentang garis kebijaksanaan dalam penyusunan program kerja kepemimpinannya, Pah Harris belum bisa memastikan, sebab,"Saya harus mempelajari memorandum akhir jabatan terlebih dahulu", katanya. Akan tetapi, sebagaimana disiarkan oleh RRI Surakarta, lulusan Geografi IKIP Yogyakarta yang telah menulis 21 judul buku dan karya ilmiah ini, akan memberi perhatian besar pada keberadaan perpustakaan.

Selamat jalan Pak Koento. Selamat datang Pak Harris, perpustakaan yang lengkap adalah harapan kami semua. (nhz)

SEMINAR NASIONAL SAMBUT DIES NATALIS UNS

Setelah anda lulus dari kuliah anda, cobalah untuk memahami diri anda, apakah anda termasuk sarjana penganggur atau bukan. Sebab menurut Dr. Nasikun, sosiolog dari UGM, mengutip pendapat Harsja Bachtiar, yang dimaksud sarjana penganggur adalah sarjana yang berijasah sarjana tapi tidak mempunyai kemampuan intelektual dan keterampilan bekerja yang seharusnya dilambangkan oleh ijasah dan gelarnya itu.

Hal tersebut terungkap dala acara Seminar Nasional yang bertema Pengembangan Budaya Intelektual bagi Peningkatan Kualitas SDM di Perguruan Tinggi yang diadakan oleh Fakultas Sastra UNS tanggal 30-31 Januari 1995 di aula Perpustakaan Pusat untuk memperingati dies natalis UNS ke-19. Menurut Nasikun juga, sarjana menganggur timbul karena ada kesan kelebihan jumlah sarjana dalam ilmu pengetahuan tertentu, karena pekerjaan sarjana selalu dipikirkan dalam hubungannya dengan kebutuhan tenaga kerja golongan atasan dan menengah kota, dan kebutuhan di desa diabaikan.

Dr. Andrik Purwasito, DEA yang membicarakan Kultur Birokrasi di Perguruan Tinggi, menyoroti tentang tidak lepasnya birokrasi perguruan tinggi dari budaya lokal setem-

pat. Jadi bila PT itu berada di Jawa ia tidak akan lepas dari kutur Jawa yang menjauhkan konflik, bergantung pada pimpinan, patuh pada kebijakan dan bergantung pada pengayoman kekuasaan. Ia mengidealkan sosok pimpinan di perguruan tinggi yang harus memiliki semangat ilmiah karena pada dasarnya, sebelum mereka diangkat menjadi birokrasi intelektual, mereka adalah tenaga edukatif yang mempunyai tanggung jawab ilmiah.

Sedangkan Dr. Heru Nugroho, juga sosiolog dari UGM , yang membahas Demokratisasi Pendidikan Tinggi, Pengembangan Intelektual dan SDM, mengatakan bahwatinggi rendahnya mutu SDM tergantung kebijakan negara terhadap institusi pendidikannya. Pelatihan SDM yang marak belakangan ini sebenarnya tidak perlu ada bila saja institusi perguruan tinggi di Indonesia cukup berkualitas.

Selain menghadirkan tiga pembicara berbobot di atas, seminar yang dibuka oleh Prof. Dr. Koento Wibisono Siswomihardjo tersebut, juga mengundang Prof. Dr. Sartono Kartodihardjo dan Dr. Suyatno Kartodirdjo sebagai pembicara. Seminar bertarap nasional seperti ini hendaknyalah terus digalakkan, tentunya bukan yang bermutu rendah, sebagai sumbangsih UNS kepada masyarakatnya (**nhz**).

KSR ADAKAN REKRUITMENT

Pertolongan pertama pada kecelakaan merupakan hal yang sangat vital dalam penanganan korban kecelakaan, kesalahan pada pertolongan pertama ini dapat mengakibatkan nyawa korban melayang. Hal ini menjadi landasan bagi Korps Sukarela Palang Merah Indonesia Universitas Sebelas Maret untuk mengadakan DIKLATSAR Angkatan V pada bulan Nopember lalu.

Organisasi yang bekerja untuk kemanusiaan ini menyeleksi calon anggotanya melalui beberapa tahap, yaitu test tertulis, test wawancara, dan test fisik sebagai seleksi awal. Mereka yang lulus seleksi tahap awal diwajibkan untuk diseleksi kembali pada diklat ruang yang diadakan pada 14-18 Nopember 1994 dan dianjutkan diklat lapang pada 19-20 Nopember 1994.

"Kami tidak menyangka bahwa minat mahasiwa tahun ini sangat besar. Terbukti dengan banyaknya pendaftar yang melebihi target yang kta harapkan", demikian penuturan Sulistyo yang bertindak sebagai Ketua Panitia.

Pada DIKLATSAR Angkatan V ini, calon peserta yang mendaftar tidak kurang dari 130 mahasiswa dari berbagai fakultas di lingkungan UNS. Sedangkan yang lulus seleksi tahap awal sebanyak 91 orang, dan yang berhasil melewati seluru proses seleksi sekitar 70 mahasiswa.

Diklat ruang diadakan di Aula kampus Mesen, dibuka oleh Drs. Sarsito(Ka Biro Kemahasiswaan), sedangkan Diklat lapang diadakan di lapangan GOR UNS. "Mereka yang lulus dari seluruh proses seleksi masih berstatus sebgai Anggota Muda dan diwajibkan untuk menjalani masa pengabdian selama kurang lebih 3 bulan untuk bisa menjadi anggota penuh", demikian ungkap Komandan KSR UNS, Sudez Nazaruddin.

Sebelumnya KSR UNS sempat mangalami masa vakum selama 4 tahun, kemudian pada Oktober 1993 KSR UNS terbentuk kembali melalui DIKLATSAR Angkatan IV (eN2).

POLITICAL ACTION UNTUK DORONG FILM NASIONAL

Kelesuan produksi perfilman nasional, yang diikuti turunnya kualitas sejumlah besar film Indonesia, disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kuatnya serbuan film-film Amerika sebagai akibat ancaman MPEAA (importir film-film Amerika Serikat) yang dikaitkan dengan fasilitas GSP; kurangnya antisipasi kemajuan teknologi audio visual, termasuk televisi; terbatasnya sumber daya manusia berkualitas di bidang perfilman.

Sutradara Chaerul Umam mengemukakan hal tersebut dalam sebuah dialog budaya yang digelar Jamaah Nurul Huda UKMI UNS. Ditambahkannya terjadinya kondisi tersebut lebih diakibatkan rendahnya keinginan pemerintah untuk meningkatkan keahlian sineas Indonesia yang berbakat serta minimnya kemampuan lembaga pendidikan sinema.

"Maraknya film-film biru dan laga lebih diakibatkan langkah by pass yang dilakukan beberapa produser untuk menghadapi persaingan yang tidak lagi sehat dengan film-film Amerika," papar sutradara film Al Kautsar, Titian Serambut Dibelah Tujuh, Nada & Dakwah serta Ramadhan & Ramona.

Menurut Umam upaya untuk lebih mengembangkan dunia perfilman di tanah air tidak cukup dengan sekadar political will namun lebih penting political action dari segenap lembaga yang terkait dengan pembinaan perfilman nasional Indonesia.

Sementara itu Dr. Andrik Purwasito berpendapat film sebagai produk media massa modern dinilai telah menisbikan nilai-nilai kemanusiaan, seperti terlihat pada beberapa film yang secara terbuka memperlihatkan eksploitasi seks dan kekerasan. Menurut dosen komunikasi FISIP UNS tersebut dalam batas tertentu film-film Indonesia tersebut

dapat dikatakan merefleksikan realita masyarakat kita. Film-film Indonesia akhir-akhir ini lebih banyak ditonton terutama oleh kalangan masyarakat bawah. Kondisi tersebut juga disebabkan masyarakat Indonesia yang berada di persimpangan jalan ditengah hingar bingar globalisasi.

Dialog yang bertemakan "Sadisme dan Pornografi dalam Film; Suatu Tinjauan Sosial Budaya dan Islam" tersebut juga menampilkan pembicara Dr. Andrik Purwasito dan Wahid Ahmadi, Lc. Acara ini digelar pada tanggal 26 Oktober 1994 di Auditorium UNS. (**bng**)

STOP PRESS

DARI BALIK DIALOG dan SARASEHAN LPM Se-SURAKARTA

long rasaya hati kami, crew Kentingan, usai mengadakan acara ini pada tanggal 3 Nopember tahun lalu. Plong yang lebih mantap, terlebih karena hajat kami, yang baru pertama kalinya itu, telah mancapai apa yang terpendam beberapa waktu.

Adalah keinginan kami untuk menjalin komunikasi aktif dengan sesama orang pers mahasiswa, seperti halnya kawan-kawan kami yang lain di luar Solo tanpa bermaksud untuk latah. Sederhana saja, bahwa perjuangan akan lebih ringan dengan kebersamaan, karena beban yang terasa, terkurangi beratnya karena dipikul bersama, segala sesuatunya dirasakan bersama. Dan yang paling penting, menambah angka probabilitas untuk mencapai tujuan menjadi lebih besar.

Jelaslah, bahwa diperlukan jaringan tersendiri yang dilingkupi ikatan emosional dalam sebuah wadah tersendiri.

Sarasehan yang diadakan usai diskusi "pemanasan" dengan beberapa pembicara yaitu Drs. Darmanto Jatman, SU (UNDIP), Dr. Andrik Purwasito,DEA (UNS), dan Sekjen PPMI(Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia), Rommy Fibri, telah menyepakati apa yang kami tawarkan . Maka lahirlah rekomendasi untuk mempersiapkan embrio sebuah wadah semacam forum komunikasi.

Saat itu forum masih belum bisa memberi jawaban pasti atas bentuk wadah ini, beberapa orang utusan menyetujui usulan untuk menjadikan format wadah ini hanya sebatas tukar informasi dan permasalahan, namun hal ini langsung disanggah oleh banyak peserta.

Sebagian lagi mengusulkan agar wadah ini langsung berafiliasi dengan PPMI, dengan memakai nama PPMS (Perhimpunan Pers Mahasiswa Surakarta). Sebagian lagi menyepakati bentuk forum komunikasi tanpa harus, atau tidak terlebih dahulu bergabung dengan PPMI, nampaknya usulan terakhir ini mendapat banyak perhatian.

Seperti biasa, perdebatan pun terjadi. Muncul usulan tentang kekhuwatiran bahwa nantinya wadah yang akan dibentuk mempunyai kecenderungan untuk terjebak pada kegiatan-kegiatan aksi dan semacamnya.

Peserta lain mengusulkan bahwa lebih baik dibentuk forum komunikasi alumni aktivis pers mahasiswa, dengan pertimbangan forum itu nantinya akan lebih langgeng. Usulan ini langsung dikomentari banyak peserta yang menyatakan ketidaksetujuannya. Peserta lain tampak ingin mendinamisasikan kehidupan dunia pers mahasiswa (khususnya di lingkup Surakarta), agar lebih eksis.

Salah seorang utusan lalu menyatakan bahwa tidak mungkin untuk membentuk sebuah organisasi yang lengkap dalam satu kali pertemuan saja, atau organisasi itu akan tidak cukup matang. Adu pendapat ini akhirnya menyetujui untuk membagi agenda dalam beberapa komisi, dengan kesepakatan bahwa setelah masing-masing komisi menuntaskan pembahasannya, akan di plenokan dalam pertemuan khusus.

Timbul masalah baru tentang dimana akan diadakan pertemuan itu. Maka Kentingan menyatakan kesediaannya untuk menjadi fasilitator pertemuan tersebut.

Kini tinggallah menunggu hasil kerja komisi-komisi untuk merumuskan wadah yang paling cocok untuk mendapatkan format yang paling tepat.

Bila menengok pembahasan pada diskusi sebelumnya, patutlah diungkapkan disini bahwa mahasiswa adalah kekuatan ke-lima yang mampu mendorong perubahan sosial tidak saja lewat kata-kata tetapi juga aksi. Dengan sebutan kekuatan ke-lima, berarti bahwa mahasiswa berpotensi berperan lebih aktif dalam pengembangan iptek. Dengan adanya pers mahasiswa, peluang untuk mengembangkan ide dan mendorong kearah perubahan sosial, pengelola pers mahasiswa harus memehami posisi dan perannya tersebut. Hal ini diungkapkn oleh Dr. Anrik Purwasito, DEA (eN2)

Bapak,.....
Biarkan kami berjuang
dengan jalan kami

Jangan penggal kami
jangan hentikan kami
(itu tak kan pernah
mematikan semangat kami)

Mereka perlu dibela
yang lemah
yang tertindas

Tuhan kami
Telah nista kami dalam dosa bersama
Bertahun membangun kultus ini
Dalam pikiran yang ganda
Dan menutupi hati nurani

Ampunilah kami
Ampunilah
Amin

Tuhan kami
Telah terlalu mudah kami
Menggunakan AsmaMu
Bertahun di negeri ini
SemogaKau rela menerima kembali
Kami dalam barisanMu

Ampuni kami
Ampunilah
Amin

(Doa, Taufiq Ismail)

Selamat Hari Raya Tedhul Fithri

1 Syawal 1415 H

MOHON MAAF LAHIR DAN BATHIN

Keluarga Besar
LPM Kentingan UNS